KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA 2018

PERJANJIAN KINERJA 2018

DAFTAR ISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 i

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN v

DEPUTI I Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana 1

- Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana 5
- Asisten Deputi Tanggap Cepat Bencana 19
- Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana 25
- Asisten Deputi Urusan Konflik Sosial 35

DEPUTI 2 Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial 45

- Asisten Deputi Penanganan Kemisikinan 49
- Asisten Deputi Jaminan Sosial 61
- Asisten Deputi Kompensasi Sosial 69
- Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia 75

DEPUTI 3 Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan 85

- Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan 89
- Asisten Deputi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 103
- Asisten Deputi Pelayanan Kesehatan 113
- Asisten Deputi Kependudukan dan KB 121

DEPUTI 4 Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan Dan Agama 131

- Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja 135
- Asisten Deputi PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat 151
- Asisten Deputi Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan Iptek 161
- Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama 173
- Asisten Deputi Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan 183

DEPUTI 5 Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan 193

- Asisten Deputi Kepemudaan 197
- Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya 211
- Asisten Deputi Warisan Budaya 221
- Asisten Deputi Keolahragaan 229

DEPUTI 6 Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan Dan Anak 237

- Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 241
- Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan 255
- Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan 265
- Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak 275

DEPUTI 7 Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan **285**

- Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat 289
- Asisten Deputi Pemberdayaan Desa 305
- Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Pedesaan 319
- Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus 331

INSPEKTUR KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN **343**

STAF AHLI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN **351**

- Staf Ahli Bidang Kependudukan 353
- Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan 355
- Staf Ahli Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial, dan Jati Diri Bangsa 357
- Staf Ahli Bidang Sustainable Development Goals Pasca 2015 359

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN **361**

- Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kepala 363
- Biro Perencanaan dan kerjasama 365
- Kepala Biro Umum 389
- Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan 423

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL **450**

- Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional 452

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, danakuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Puan Maharani
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Maret 2018

Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Puan Maharani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Kementerian : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Tahun Anggaran : 2018

SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualita skoordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Tingkat capaian K/L terhadap target Indikator IPM di Bidang Pendidikan	100%
	Tingkat capaian K/L terhadap target Indikator IPM di Bidang Kesehatan	100%
	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,05 (Skala 6)

Program	Anggaran (Rp)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK	150.733.720.000,-
Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	231.369.590.000,-
Jumlah Anggaran T.A. 2018	382.103.310.000,-

Jakarta, Maret 2018
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Puan Maharani

DEPUTI 1

Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Y.B. Satya Sananugraha
Jabatan	:	Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Puan Maharani
Jabatan	:	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Menteri Koordinator	Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan
Bidang Pembangunan Manusia dan	Sosial dan Dampak Bencana,
Kebudayaan,	
Puan Maharani	**Y.B. Satya Sananugraha**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Unit Organisasi Eselon I : Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) Mendukung Kemantapan Pelayanan Dasar dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
	Jumlah RK Mendukung Kemantapan Pemberdayaan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,05 (Skala 6)
	Jumlah RK Mendukung Kemantapan Gotong Royong di Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	1
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK	Nilai SAKIP	73,51

Program	Anggaran (Rp)
Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	20.425.000.000,-

Jakarta, Maret 2018

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Puan Maharani

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana,

Y.B. Satya Sananugraha

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Iwan Eka Setiawan, M.Sc
Jabatan : Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Y.B. Satya Sananugraha
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana/Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana/ Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,	Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana,
Y.B. Satya Sananugraha	**Ir. Iwan Eka Setiawan, M.Sc**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengurangan Risiko Bencana untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengurangan Risiko Bencana dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengurangan Risiko Bencana untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengurangan Risiko Bencana dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan (URK) di bidang Pengurangan Risiko Bencana dalam mendukung indikator pemberdayaan URK Peningkatan Kapasitas Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam PRB	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengurangan Risiko Bencana yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengurangan Risiko Bencana yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,05 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Pengurangan Risiko Bencana yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong 1. URK Pengarusutaman PRB di Seluruh Sektor Pembangunan 2. URK Penurunan Tingkat Kerentanan Terhadap Bencana	2
	Laporan hasil pelaksanaan Ekspedisi NKRI	1
Dokumen Program dan Administratif Kegiatan di Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana	Jumlah dokumen Program dan Administratif Kegiatan di Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana	2

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana	13.200.000.000,-

Jakarta, Mei 2018

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana/
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Y.B. Satya Sananugraha

Asisten Deputi
Pengurangan Risiko Bencana,

Ir. Iwan Eka Setiawan, M.Sc

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sachran Saputra, SE, M.AP.
Jabatan : Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Iwan Eka Setiawan, M.Sc
Jabatan : Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Pengurangan Risiko Bencana,	Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,
Ir. Iwan Eka Setiawan, M.Sc	**Sachran Saputra, SE, M. AP.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Draf Dokumen Penguatan Kegiatan dan Administrasi Tata Kelola di Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana	Jumlah Draf Dokumen Penguatan Kegiatan dan Administrasi Tata Kelola di Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana	2

Jakarta, Mei 2018

Asisten Deputi
Pengurangan Risiko Bencana,

Ir. Iwan Eka Setiawan, M.Sc

Kepala Bidang
Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,

Sachran Saputra, SE, M.AP.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tustyn Wahyuny
Jabatan : Kepala Subbidang Tata Kelola

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sachran Saputra, SE, M.AP.
Jabatan : Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,	Tata Kelola,
Sachran Saputra, SE, M.AP.	**Tustyn Wahyuny**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Draf Dokumen Administratif Tata Kelola di Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana	Jumlah Bahan Draf Dokumen Administratif Tata Kelola di Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana	1

Jakarta, Mei 2018

Kepala Bidang
Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,

Sachran Saputra, SE, M.AP.

Kepala Subbidang
Tata Kelola,

Tustyn Wahyuny

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rossi Agung Pramudyo, S.T
Jabatan : Kepala Subbidang Penguatan Kegiatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sachran Saputra, SE, M.AP.
Jabatan : Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,	Penguatan Kegiatan,
Sachran Saputra, SE, M.AP.	**Rossi Agung Pramudyo, S.T.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Draf Dokumen Penguatan Kegiatan di Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana	Jumlah Bahan Draf Dokumen Penguatan Kegiatan di Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana	1

Jakarta, Mei 2018

Kepala Bidang
Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,

Sachran Saputra, SE, M.AP.

Kepala Subbidang
Penguatan Kegiatan,

Rossi Agung Pramudyo, S.T.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yasrif, S.Stp, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Mitigasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Iwan Eka Setiawan, M.Sc
Jabatan : Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang Mitigasi,
Pengurangan Risiko Bencana,	
Ir. Iwan Eka Setiawan, M.Sc	**Yasrif, S.Stp, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Mitigasi untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Mitigasi dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Draft URK Mitigasi dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam PRB	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Mitigasi yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Mitigasi yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong 1. Draft URK Mitigasi dalam rangka Pengarusutamaan PRB di seluruh Sektor Pembangunan 2. Draft URK Mitigasi dalam rangka Penurunan Tingkat Kerentanan Terhadap Bencana	2

Jakarta, Mei 2018

Asisten Deputi
Pengurangan Risiko Bencana,

Ir. Iwan Eka Setiawan, M.Sc

Kepala Bidang Mitigasi,

Yasrif, S.Stp, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham, S.E, M.A.
Jabatan : Kepala Bidang Penguatan Kapasitas Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Iwan Eka Setiawan, M.Sc
Jabatan : Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Pengurangan Risiko Bencana,	Penguatan Kapasitas Masyarakat,
Ir. Iwan Eka Setiawan, M.Sc	**Ilham, S.E, M.A.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penguatan Kapasitas Masyarakat untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Draft URK Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam PRB	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penguatan Kapasitas Masyarakat yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Penguatan Kapasitas Masyarakat yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong 1. Draft URK Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam rangka Pengarusutamaan PRB di seluruh Sektor Pembangunan 2. Draft URK Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam rangka Penurunan Tingkat Kerentanan Terhadap Bencana	2

Jakarta, Mei 2018

Asisten Deputi
Pengurangan Risiko Bencana,

Ir. Iwan Eka Setiawan, M.Sc

Kepala Bidang
Penguatan Kapasitas Masyarakat,

Ilham, S.E, M.A.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lenny Fatmasari, S.Sos
Jabatan : Kepala Subbidang Penguatan Kesadaran Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ilham, S.E, M.A.
Jabatan : Kepala Bidang Penguatan Kapasitas Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Penguatan Kapasitas Masyarakat,	Penguatan Kesadaran Masyarakat,
Ilham, S.E, M.A.	**Lenny Fatmasari, S.Sos**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penguatan Kesadaran Masyarakat untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Penguatan Kesadaran Masyarakat dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft URK Penguatan Kesadaran Masyarakat dalam penyusunan Draft URK Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam PRB	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penguatan Kesadaran Masyarakat yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Penguatan Kesadaran Masyarakat yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong 1. Bahan Draft URK Penguatan Kesadaran Masyarakat dalam penyusunan Draft URK Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam rangka Pengarusutamaan PRB di seluruh Sektor Pembangunan 2. Bahan Draft URK Penguatan Kesadaran Masyarakat dalam penyusunan Draft URK Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam rangka Penurunan Tingkat Kerentanan Terhadap Bencana	2

Jakarta, Mei 2018

Kepala Bidang
Penguatan Kapasitas Masyarakat,

Ilham, S.E, M.A.

Kepala Subbidang
Penguatan Kesadaran Masyarakat,

Lenny Fatmasari, S.Sos

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Djoko Joewono, MSi
Jabatan : Asisten Deputi Tanggap Cepat Bencana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Y.B. Satya Sananugraha
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana/Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana/ Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,	Pihak Pertama: Asisten Deputi Tanggap Cepat Bencana,
Y.B. Satya Sananugraha	**Ir. Djoko Joewono, MSi**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Tanggap Cepat Bencana
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Tanggap Cepat Bencana untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Tanggap Cepat Bencana dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Tanggap Cepat Bencana dalam mendukung indikator pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar 1. URK Penguatan Kelembagaan dan Regulasi 2. URK Pelayanan Dasar Kebencanaan 3. URK Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup	3
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Tanggap Cepat Bencana untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Tanggap Cepat Bencana dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Tanggap Cepat Bencana yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Tanggap Cepat Bencana yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,05 (Skala 6)

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kebijakan Tanggap Cepat Bencana	2.000.000.000,-

Jakarta, Mei 2018

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana/
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Y.B. Satya Sananugraha

Asisten Deputi
Tanggap Cepat Bencana,

Ir. Djoko Joewono, MSi

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda Irawati Purwaningsih, S.Sos, MAP
Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Pengungsi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Djoko Joewono, M.Si
Jabatan : Asisten Deputi Tanggap Cepat Bencana

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Tanggap Cepat Bencana,	Penanganan Pengungsi,
Ir. Djoko Joewono, M.Si	**Linda Irawati Purwaningsih, S.Sos, MAP**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Tanggap Cepat Bencana
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanganan Pengungsi untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Penanganan Pengungsi dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar 4. Draft URK Penanganan Pengungsi dalam rangka Penguatan Kelembagaan dan Regulasi 5. Draft URK Penanganan Pengungsi dalam rangka Pelayanan Dasar Kebencanaan 6. Draft URK Penanganan Pengungsi dalam rangka Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup	3

Jakarta, Mei 2018

Asisten Deputi
Tanggap Cepat Bencana,

Ir. Djoko Joewono, M.Si

Kepala Bidang
Penanganan Pengungsi,

Linda Irawati Purwaningsih, S.Sos, MAP

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nelwan Harahap, S.P.
Jabatan : Kepala Bidang Bantuan Darurat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Djoko Joewono, M.Si
Jabatan : Asisten Deputi Tanggap Cepat Bencana

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Tanggap Cepat Bencana,	Bantuan Darurat,
Ir. Djoko Joewono, M.Si	**Nelwan Harahap, S.P.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Tanggap Cepat Bencana
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Bantuan Darurat untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Bantuan Darurat dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar 1. Draft URK Bantuan Darurat dalam rangka Penguatan Kelembagaan dan Regulasi 2. Draft URK Bantuan Darurat dalam rangka Pelayanan Dasar Kebencanaan 3. Draft URK Bantuan Darurat dalam rangka Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup	3

Jakarta, Mei 2018

Asisten Deputi
Tanggap Cepat Bencana,

Ir. Djoko Joewono, M.Si

Kepala Bidang
Bantuan Darurat,

Nelwan Harahap, S.P.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Detty Rosita, M.Pd
Jabatan : Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Y.B. Satya Sananugraha
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana/Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana/ Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,	Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana,
Y.B. Satya Sananugraha	**Dra. Detty Rosita, M.Pd**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanganan Pasca Bencana untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanganan Pasca Bencana dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanganan Pasca Bencana untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanganan Pasca Bencana dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan (URK) di bidang Penanganan Pasca Bencana dalam mendukung indikator pemberdayaan 1. URK Pembangunan serta Penyediaan Logistik dan Peralatan Kebencanaan 2. URK Pengembangan Ekonomi di Daerah Pascabencana	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanganan Pasca Bencana yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanganan Pasca Bencana yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,05 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Penanganan Pasca Bencana dalam mendukung indikator gotong royong URK Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi Penanggulangan Bencana	1

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kebijakan Penanganan Pasca Bencana	1.950.000.000,-

Jakarta, Mei 2018

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana/
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Y.B. Satya Sananugraha

Asisten Deputi
Penanganan Pasca Bencana,

Dra. Detty Rosita, M.Pd

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Hotman Irwandy Sihite, AP, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pemulihan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Detty Rosita, M.Pd
Jabatan : Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang Pemulihan,
Penanganan Pasca Bencana,	
Dra. Detty Rosita, M.Pd	**Drs. Hotman Irwandy Sihite, AP, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemulihan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemulihan dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan 1. Draft URK Pemulihan dalam rangka Pembangunan serta Penyediaan Logistik dan Peralatan Kebencanaan 2. Draft URK Pemulihan dalam rangka Pengembangan Ekonomi di Daerah Pascabencana	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemulihan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemulihan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Draft URK Pemulihan dalam rangka Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi Penanggulangan Bencana	1

Jakarta, Mei 2018

Asisten Deputi
Penanganan Pasca Bencana,

Dra. Detty Rosita, M.Pd

Kepala Bidang Pemulihan,

Drs. Hotman Irwandy Sihite, AP, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kusuma Pata Mangiri, ST, M.Si
Jabatan : Kepala Subbidang Rehabilitasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Hotman Sihite, AP, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pemulihan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang Pemulihan,	Kepala Subbidang Rehabilitasi,
Drs. Hotman Sihite, AP, M.Si	**Kusuma Pata Mangiri, ST, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Rehabilitasi dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan 1. Bahan Draft URK Rehabilitasi dalam penyusunan Draft URK Pemulihan dalam rangka Pembangunan serta Penyediaan Logistik dan Peralatan Kebencanaan 2. Bahan Draft URK Rehabilitasi dalam penyusunan Draft URK Pemulihan dalam rangka Pengembangan Ekonomi di Daerah Pascabencana	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Rehabilitasi yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Bahan Draft URK Rehabilitasi dalam penyusunan Draft URK Pemulihan dalam rangka Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi Penanggulangan Bencana	1

Jakarta, Mei 2018

Kepala Bidang Pemulihan,

Drs. Hotman Sihite, AP, M.Si

Kepala Subbidang Rehabilitasi,

Kusuma Pata Mangiri, ST, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hery Wijayanto, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Detty Rosita, M.Pd
Jabatan : Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Penanganan Pasca Bencana,	Pemberdayaan Masyarakat,
Dra. Detty Rosita, M.Pd	**Hery Wijayanto, SE, MM**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan 1. Draft URK Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pembangunan serta Penyediaan Logistik dan Peralatan Kebencanaan 2. Draft URK Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pengembangan Ekonomi di Daerah Pascabencana	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Draft URK Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi Penanggulangan Bencana	1

Jakarta, Mei 2018

Asisten Deputi
Penanganan Pasca Bencana,

Dra. Detty Rosita, M.Pd

Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat,

Hery Wijayanto, SE, MM

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suryanuddin, S.Sos, MPP
Jabatan : Kepala Subbidang Pemberdayaan Ekonomi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hery Wijayanto, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pemberdayaan Masyarakat,	Pemberdayaan Ekonomi,
Hery Wijayanto, SE, MM	**Suryanuddin, S.Sos, MPP**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Ekonomi untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemberdayaan Ekonomi dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan 1. Bahan Draft URK Pemberdayaan Ekonomi dalam penyusunan Draft URK Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pembangunan serta Penyediaan Logistik dan Peralatan Kebencanaan 2. Bahan Draft URK Pemberdayaan Ekonomi dalam penyusunan Draft URK Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pengembangan Ekonomi di Daerah Pascabencana	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Ekonomi yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemberdayaan Ekonomi yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Bahan Draft URK Pemberdayaan Ekonomi dalam penyusunan Draft URK Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi Penanggulangan Bencana	1

Jakarta, Mei 2018

Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat,

Hery Wijayanto, SE, MM

Kepala Subbidang
Pemberdayaan Ekonomi,

Suryanuddin, S.Sos, MPP

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Ponco Respati Nugroho, M.Si
Jabatan : Asisten Deputi Urusan Konflik Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Y.B. Satya Sananugraha
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana/Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana/ Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,	Asisten Deputi Konflik Sosial,
Y.B. Satya Sananugraha	**Drs. Ponco Respati Nugroho, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Konflik Sosial
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Konflik Sosial untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Konflik Sosial dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan (URK) di bidang Konflik Sosial dalam mendukung indikator pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar URK Penanggulangan Konflik Sosial	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Konflik Sosial untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Konflik Sosial dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Konflik Sosial dalam mendukung indikator pemberdayaan URK Optimalisasi Peran Kelembagaan Penyelesaian Konflik	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Konflik Sosial yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Konflik Sosial yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,05 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Konflik Sosial dalam mendukung indikator gotong royong URK Pemulihan Pasca Konflik	1
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial	1

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kebijakan Konflik Sosial	3.275.000.000,-

Jakarta, Mei 2018

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana/
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Y.B. Satya Sananugraha

Asisten Deputi
Konflik Sosial,

Drs. Ponco Respati Nugroho, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noegroho Andy Handoyo, S.Si, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan Konflik Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Ponco Respati Nugroho, M.Si
Jabatan : Asisten Deputi Konflik Sosial

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Konflik Sosial,	Pencegahan Konflik Sosial,
Drs. Ponco Respati Nugroho, M.Si	**Noegroho Andy Handoyo, S.Si, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Konflik Sosial
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pencegahan Konflik Sosial untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pencegahan Konflik Sosial dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Pencegahan Konflik Sosial dalam rangka Penanggulangan Konflik Sosial	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pencegahan Konflik Sosial untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pencegahan Konflik Sosial dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Draft URK Pencegahan Konflik Sosial dalam rangka Optimalisasi Peran Kelembagaan Penyelesaian Konflik	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pencegahan Konflik Sosial yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pencegahan Konflik Sosial yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Draft URK Pencegahan Konflik Sosial dalam rangka Pemulihan Pasca Konflik	1

Jakarta, Mei 2018

Asisten Deputi
Konflik Sosial,

Drs. Ponco Respati Nugroho, M.Si

Kepala Bidang
Pencegahan Konflik Sosial,

Noegroho Andy Handoyo, S.Si, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad, S.AP
Jabatan : Kepala Subbidang Pemetaan Konflik Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Noegroho Andy Handoyo, S.Si, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan Konflik Sosial

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pencegahan Konflik Sosial,	Pemetaan Konflik Sosial,
Noegroho Andy Handoyo, S.Si, M.Si	**Muhamad, S.AP**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Konflik Sosial
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemetaan Konflik Sosial untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemetaan Konflik Sosial dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Pemetaan Konflik Sosial dalam penyusunan Draft URK Pencegahan Konflik Sosial dalam rangka Penanggulangan Konflik Sosial	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemetaan Konflik Sosial untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemetaan Konflik Sosial dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft URK Pemetaan Konflik Sosial dalam penyusunan Draft URK Pencegahan Konflik Sosial dalam rangka Optimalisasi Peran Kelembagaan Penyelesaian Konflik	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemetaan Konflik Sosial yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemetaan Konflik Sosial yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Bahan Draft URK Pemetaan Konflik Sosial dalam penyusunan Draft URK Pencegahan Konflik Sosial dalam rangka Pemulihan Pasca Konflik	1

Jakarta, Mei 2018

Kepala Bidang
Pencegahan Konflik Sosial,

Noegroho Andy Handoyo, S.Si, M.Si

Kepala Subbidang
Pemetaan Konflik Sosial,

Muhamad, S.AP

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ma'fud Salatunlayl, S.STP, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pemulihan Pasca Konflik Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Ponco Respati Nugroho, M.Si
Jabatan : Asisten Deputi Konflik Sosial

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Konflik Sosial,	Pemulihan Pasca Konflik Sosial,
Drs. Ponco Respati Nugroho, M.Si	**Ma'fud Salatunlayl, S.STP, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Konflik Sosial
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemulihan Pasca Konflik Sosial untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemulihan Pasca Konflik Sosial dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Pemulihan Pasca Konflik Sosial dalam rangka Penanggulangan Konflik Sosial	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemulihan Pasca Konflik Sosial untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemulihan Pasca Konflik Sosial dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Draft URK Pemulihan Pasca Konflik Sosial dalam rangka Optimalisasi Peran Kelembagaan Penyelesaian Konflik	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemulihan Pasca Konflik Sosial yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemulihan Pasca Konflik Sosial yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Draft URK Pemulihan Pasca Konflik Sosial dalam rangka Pemulihan Pasca Konflik	1

Jakarta, Mei 2018

Asisten Deputi
Konflik Sosial,

Drs. Ponco Respati Nugroho, M.Si

Kepala Bidang
Pemulihan Pasca Konflik Sosial,

Ma'fud Salatunlayl, S.STP, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suyarto Mangiri, SE
Jabatan : Kepala Subbidang Pemulihan Fisik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ma'fud Salatunlayl, S.STP, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pemulihan Pasca Konflik Sosial

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pemulihan Pasca Konflik Sosial,	Pemulihan Fisik,
Ma'fud Salatunlayl, S.STP, M.Si	**Suyarto Mangiri, SE**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Konflik Sosial
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemulihan Fisik untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemulihan Fisik dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Pemulihan Fisik dalam penyusunan Draft URK Pemulihan Pasca Konflik Sosial dalam rangka Penanggulangan Konflik Sosial	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemulihan Fisik untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemulihan Fisik dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft URK Pemulihan Fisik dalam penyusunan Draft URK Pemulihan Pasca Konflik Sosial dalam rangka Optimalisasi Peran Kelembagaan Penyelesaian Konflik	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemulihan Fisik yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemulihan Fisik yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Bahan Draft URK Pemulihan Fisik dalam penyusunan Draft URK Pemulihan Pasca Konflik Sosial dalam rangka Pemulihan Pasca Konflik	1

Jakarta, Mei 2018

Kepala Bidang
Pemulihan Pasca Konflik Sosial,

Ma'fud Salatunlayl, S.STP, M.Si

Kepala Subbidang
Pemulihan Fisik,

Suyarto Mangiri, SE

DEPUTI 2

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ir. Tb. A. Choesni, MA, M.Phil
Jabatan	:	Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Puan Maharani
Jabatan	:	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Menteri Koordinator	Deputi Bidang Koordinasi
Bidang Pembangunan Manusia dan	Penanggulangan Kemiskinan dan
Kebudayaan,	Perlindungan Sosial,
Puan Maharani	**Ir. Tb. A. Choesni, MA, M.Phil**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) Mendukung Kemantapan Pelayanan Dasar dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
	Jumlah RK Mendukung Kemantapan Pemberdayaan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,05 (Skala 6)
	Jumlah RK Mendukung Kemantapan Gotong Royong di Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	1
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK	Nilai SAKIP	73,51

Program	Anggaran (Rp)
Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	12.100.000.000,-

Jakarta, Maret 2018

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan,

Puan Maharani

Deputi Bidang Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan dan
Perlindungan Sosial,

Ir. Tb. A. Choesni, MA, M.Phil

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suarmansyah, SH
Jabatan : Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Tb. A. Choesni, MA, M.Phil.
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi	Asisten Deputi
Penanggulangan Kemiskinan dan	Penanganan Kemiskinan,
Perlindungan Sosial,	
Ir. Tb. A. Choesni, MA, M.Phil.	**Suarmansyah, SH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanganan Kemiskinan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanganan Kemiskinan dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Penanganan Kemiskinan dalam mendukung indikator pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar 1. URK Penyediaan Layanan Dasar untuk Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Sarana Lingkungan bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Rentan 2. URK Terbentuknya Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Rujukan dan Layanan Terpadu	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanganan Kemiskinan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanganan Kemiskinan dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Penanganan Kemiskinan dalam mendukung indikator pemberdayaan URK Pengembangan Modal Awal Usaha	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanganan Kemiskinan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanganan Kemiskinan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,05 (Skala 6)
Dokumen Program dan Administratif Kegiatan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	Jumlah dokumen Program dan Administratif Kegiatan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	2

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan	4.050.000.000,-

Jakarta, Maret 2018

Deputi Bidang Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan dan
Perlindungan Sosial,

Ir. Tb. A. Choesni, MA, M.Phil.

Asisten Deputi
Penanganan Kemiskinan,

Suarmansyah, SH

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Eka Ningrum
Jabatan : Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Suarmansyah, SH
Jabatan : Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Penanganan Kemiskinan,	Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,
Suarmansyah, SH	**Dra. Eka Ningrum**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Draf Dokumen Penguatan Kegiatan dan Administrasi Tata Kelola di Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	Jumlah Draf Dokumen Penguatan Kegiatan dan Administrasi Tata Kelola di Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	2

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Penanganan Kemiskinan,

Suarmansyah, SH

Kepala Bidang
Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,

Dra. Eka Ningrum

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiwiek Setiowati, S.AP
Jabatan : Kepala Subbidang Penguatan Kegiatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Eka Ningrum
Jabatan : Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,	Penguatan Kegiatan,
Dra. Eka Ningrum	**Wiwiek Setiowati, S.AP**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Draf Dokumen Penguatan Kegiatan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	Jumlah Bahan Draf Dokumen Penguatan Kegiatan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,

Dra. Eka Ningrum

Kepala Subbidang
Penguatan Kegiatan,

Wiwiek Setiowati, S.AP

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad, ST, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Sinkronisasi Data Kemiskinan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Suarmansyah, SH
Jabatan : Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Penanganan Kemiskinan,	Sinkronisasi Data Kemiskinan,
Suarmansyah, SH	**Ahmad, ST, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Sinkronisasi Data Kemiskinan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Sinkronisasi Data Kemiskinan dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar 1. Draft URK Sinkronisasi Data Kemiskinan dalam rangka Penyediaan Layanan Dasar untuk Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Sarana Lingkungan bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Rentan 2. Draft URK Sinkronisasi Data Kemiskinan dalam rangka Terbentuknya Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Rujukan dan Layanan Terpadu	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Sinkronisasi Data Kemiskinan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Sinkronisasi Data Kemiskinan dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Draft URK Sinkronisasi Data Kemiskinan dalam rangka Pengembangan Modal Awal Usaha	1

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Penanganan Kemiskinan,

Suarmansyah, SH

Kepala Bidang
Sinkronisasi Data Kemiskinan,

Ahmad, ST, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Slamet Gurindo PA, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Suarmansyah, SH
Jabatan : Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Penanganan Kemiskinan,	Penanganan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan,
Suarmansyah, SH	**Slamet Gurindo PA, S.Sos**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanganan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Penanganan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar 1. Draft URK Penanganan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan dalam rangka Penyediaan Layanan Dasar untuk Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Sarana Lingkungan bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Rentan 2. Draft URK Penanganan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan dalam rangka Terbentuknya Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Rujukan dan Layanan Terpadu	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanganan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Penanganan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Draft URK Penanganan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan dalam rangka Pengembangan Modal Awal Usaha	1

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Penanganan Kemiskinan,

Suarmansyah, SH

Kepala Bidang
Penanganan Kemiskinan Perkotaan
dan Perdesaan,

Slamet Gurindo PA, S.Sos

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuhendra, SE, MAB
Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Slamet Gurindo PA, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Penanganan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan,	Penanganan Kemiskinan Perkotaan,
Slamet Gurindo PA, S.Sos	**Yuhendra, SE, MAB**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanganan Kemiskinan Perkotaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Penanganan Kemiskinan Perkotaan dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar 1. Bahan Draft URK Penanganan Kemiskinan Perkotaan dalam penyusunan Draft URK Penanganan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan dalam rangka Penyediaan Layanan Dasar untuk Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Sarana Lingkungan bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Rentan 2. Bahan Draft URK Penanganan Kemiskinan Perkotaan dalam penyusunan Draft URK Penanganan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan dalam rangka Terbentuknya Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Rujukan dan Layanan Terpadu	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanganan Kemiskinan Perkotaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Penanganan Kemiskinan Perkotaan dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft URK Penanganan Kemiskinan Perkotaan dalam penyusunan Draft URK Penanganan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan dalam rangka Pengembangan Modal Awal Usaha	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Penanganan Kemiskinan Perkotaan dan
Perdesaan,

Slamet Gurindo PA, S.Sos

Kepala Subbidang
Penanganan Kemiskinan Perkotaan,

Yuhendra, SE, MAB

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Togap Simangunsong, M.App, Sc
Jabatan : Asisten Deputi Jaminan Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Tb. A. Choesni, MA, M.Phil.
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi	Asisten Deputi
Penanggulangan Kemiskinan dan	Jaminan Sosial,
Perlindungan Sosial,	
Ir. Tb. A. Choesni, MA, M.Phil.	**Ir. Togap Simangunsong, M.App, Sc**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Jaminan Sosial
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Jaminan Sosial untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Jaminan Sosial dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Jaminan Sosial dalam mendukung indikator pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar URK Penguatan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bersyarat	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Jaminan Sosial untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Jaminan Sosial dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Jaminan Sosial dalam mendukung indikator pemberdayaan URK Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Jaminan Sosial yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Jaminan Sosial yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,05 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Jaminan Sosial dalam mendukung indikator gotong royong URK Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan	1
	Jumlah laporan pelaksanaan PKH	1

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kebijakan Jaminan Sosial	4.175.000.000,-

Jakarta, Maret 2018

Deputi Bidang Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan dan
Perlindungan Sosial,

Ir. Tb. A. Choesni, MA, M.Phil.

Asisten Deputi
Jaminan Sosial,

Ir. Togap Simangunsong, M.App, Sc

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nefolina Situmorang MBA
Jabatan : Kepala Bidang Asistensi Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Togap Simangunsong, M.App.Sc
Jabatan : Asisten Deputi Jaminan Sosial

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Jaminan Sosial,	Asistensi Sosial,
Ir. Togap Simangunsong, M.App.Sc	**Nefolina Situmorang MBA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Jaminan Sosial
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Asistensi Sosial untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Asistensi Sosial dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Asistensi Sosial dalam rangka Penguatan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bersyarat	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Asistensi Sosial untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Asistensi Sosial dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Draft URK Asistensi Sosial dalam rangka Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Asistensi Sosial yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Asistensi Sosial yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Draft URK Asistensi Sosial dalam rangka Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan	1

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Jaminan Sosial,

Ir. Togap Simangunsong, M.App.Sc

Kepala Bidang
Asistensi Sosial,

Nefolina Situmorang MBA

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mujiningsih
Jabatan : Kepala Subbidang Kerjasama Asistensi Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nefolina Situmorang MBA
Jabatan : Kepala Bidang Asistensi Sosial

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua
Kepala Bidang
Asistensi Sosial,

Nefolina Situmorang MBA

Pihak Pertama
Kepala Subbidang Kerjasama
Asistensi Sosial,

Mujiningsih

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Jaminan Sosial
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kerjasama Asistensi Sosial untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kerjasama Asistensi Sosial dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Kerjasama Asistensi Sosial dalam penyusunan Draft URK Asistensi Sosial dalam rangka Penguatan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bersyarat	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kerjasama Asistensi Sosial untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kerjasama Asistensi Sosial dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft URK Kerjasama Asistensi Sosial dalam penyusunan Draft URK Asistensi Sosial dalam rangka Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kerjasama Asistensi Sosial yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kerjasama Asistensi Sosial yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Bahan Draft URK Kerjasama Asistensi Sosial dalam penyusunan Draft URK Asistensi Sosial dalam rangka Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Asistensi Sosial,

Nefolina Situmorang MBA

Kepala Subbidang Kerjasama
Asistensi Sosial,

Mujiningsih

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angga Jaya Pratama, S.IP
Jabatan : Kepala Subbidang Program Asistensi Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nefolina Situmorang MBA
Jabatan : Kepala Bidang Asistensi Sosial

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua Kepala Bidang Asistensi Sosial,	Pihak Pertama Kepala Subbidang Program Asistensi Sosial,
Nefolina Situmorang MBA	**Angga Jaya Pratama, S.IP**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Jaminan Sosial
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Program Asistensi Sosial untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Program Asistensi Sosial dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Program Asistensi Sosial dalam penyusunan Draft URK Asistensi Sosial dalam rangka Penguatan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bersyarat	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Program Asistensi Sosial untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Program Asistensi Sosial dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft URK Program Asistensi Sosial dalam penyusunan Draft URK Asistensi Sosial dalam rangka Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Program Asistensi Sosial yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Program Asistensi Sosial yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Bahan Draft URK Program Asistensi Sosial dalam penyusunan Draft URK Asistensi Sosial dalam rangka Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Asistensi Sosial,

Nefolina Situmorang MBA

Kepala Subbidang Program
Asistensi Sosial,

Angga Jaya Pratama, S.IP

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herbin Manihuruk, SE., M.Kes.
Jabatan : Asisten Deputi Kompensasi Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Tb. A. Choesni, MA, M.Phil.
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi	Asisten Deputi
Penanggulangan Kemiskinan dan	Kompensasi Sosial
Perlindungan Sosial,	
Ir. Tb. A. Choesni, MA, M.Phil.	**Herbin Manihuruk, SE., M.Kes.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Kompensasi Sosial
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kompensasi Sosial untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kompensasi Sosial dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kompensasi Sosial dalam mendukung indikator pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar 1. URK Peningkatan Efektivitas Penyaluran Bantuan Pangan 2. URK Pemantapan Pelaksanaan Subsidi Energi Tepat Sasaran 3. URK Pelaksanaan Bantuan Sosial Non Tunai	3
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kompensasi Sosial untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kompensasi Sosial dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kompensasi Sosial yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kompensasi Sosial yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,05 (Skala 6)

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kebijakan Kompensasi Sosial	2.000.000.000,-

Jakarta, Maret 2018
Asisten Deputi
Kompensasi Sosial,

Herbin Manihuruk, SE., M.Kes.

Deputi Bidang Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan dan
Perlindungan Sosial,

Ir. Tb. A. Choesni, MA, M.Phil.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luh Made Ayu Citraninda Paramita, S.Kom, MM
Jabatan : Kepala Bidang Kompensasi Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Herbin Manihuruk, SE., M.Kes.
Jabatan : Asisten Deputi Kompensasi Sosial

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua: Asisten Deputi Kompensasi Sosial,	Pihak Pertama: Kepala Bidang Kompensasi Pangan,
Herbin Manihuruk, SE., M.Kes.	**Luh Made Ayu Citraninda Paramita, S.Kom, MM**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Kompensasi Sosial
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kompensasi Pangan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kompensasi Pangan dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar 1. Draft URK Kompensasi Pangan dalam rangka Peningkatan Efektivitas Penyaluran Bantuan Pangan 2. Draft URK Kompensasi Pangan dalam rangka Pemantapan Pelaksanaan Subsidi Energi Tepat Sasaran 3. Draft URK Kompensasi Pangan dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Sosial Non Tunai	3

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Kompensasi Sosial,

Herbin Manihuruk, SE., M.Kes.

Kepala Bidang
Kompensasi Pangan,

Luh Made Ayu Citraninda Paramita, S.Kom, MM

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Fermi Taruna, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Subbidang Kompensasi Pangan Tidak Bersyarat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Luh Made Ayu Citraninda Paramita, S.Kom, MM
Jabatan : Kepala Bidang Kompensasi Pangan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Kompensasi Pangan,	Kompensasi Pangan Tidak Bersyarat,
Luh Made Ayu Citraninda Paramita, S.Kom, MM	**Fajar Fermi Taruna, SE, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Kompensasi Sosial
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kompensasi Pangan Tidak Bersyarat untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kompensasi Pangan Tidak Bersyarat dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar 1. Bahan Draft URK Kompensasi Pangan Tidak Bersyarat dalam penyusunan Draft URK Kompensasi Pangan dalam rangka Peningkatan Efektivitas Penyaluran Bantuan Pangan 2. Bahan Draft URK Kompensasi Pangan Tidak Bersyarat dalam penyusunan Draft URK Kompensasi Pangan dalam rangka Pemantapan Pelaksanaan Subsidi Energi Tepat Sasaran 3. Bahan Draft URK Kompensasi Pangan Tidak Bersyarat dalam penyusunan Draft URK Kompensasi Pangan dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Sosial Non Tunai	3

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Kompensasi Pangan,

Luh Made Ayu Citraninda Paramita, S.Kom, MM

Kepala Subbidang
Kompensasi Pangan Tidak Bersyarat ,

Fajar Fermi Taruna, SE, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Ade Rustama, MP
Jabatan : Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Tb. A. Choesni, MA, M.Phil.
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi	Asisten Deputi
Penanggulangan Kemiskinan dan	Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia,
Perlindungan Sosial,	
Ir. Tb. A. Choesni, MA, M.Phil.	**Drs. Ade Rustama, MP**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia dalam mendukung indikator pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar URK Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lansia dan Penyandang Disabilitas Berat	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Penanganan Kemiskinan dalam mendukung indikator pemberdayaan 1. URK Penyediaan Literasi Khusus Bagi Penyandang Disabilitas 2. URK Pemberian Pelayanan Home Care Bagi Lanjut Usia	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,05 (Skala 6)

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia	1.875.000.000,-

Jakarta, Maret 2018
Asisten Deputi
Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia,

Drs. Ade Rustama, MP

Deputi Bidang Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan dan
Perlindungan Sosial,

Ir. Tb. A. Choesni, MA, M.Phil.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurhayati, SH
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Lansia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Ade Rustama, MP
Jabatan : Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia	Pemberdayaan Lansia,
Drs. Ade Rustama, MP	**Siti Nurhayati, SH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Lansia untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemberdayaan Lansia dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Pemberdayaan Lansia dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lansia dan Penyandang Disabilitas Berat	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Lansia untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemberdayaan Lansia dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan 1. Draft URK Pemberdayaan Lansia dalam rangka Penyediaan Literasi Khusus Bagi Penyandang Disabilitas 2. Draft URK Pemberdayaan Lansia dalam rangka Pemberian Pelayanan Home Care Bagi Lanjut Usia	2

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia

Drs. Ade Rustama, MP

Kepala Bidang
Pemberdayaan Lansia,

Siti Nurhayati, SH

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erlia Rahmawati, S.Si, MAB
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Disabilitas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Ade Rustama, MP
Jabatan : Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia	Pemberdayaan Disabilitas,
Drs. Ade Rustama, MP	**Erlia Rahmawati, S.Si, MAB**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Disabilitas untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemberdayaan Disabilitas dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Pemberdayaan Disabilitas dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lansia dan Penyandang Disabilitas Berat	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Disabilitas untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemberdayaan Disabilitas dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan 1. Draft URK Pemberdayaan Disabilitas dalam rangka Penyediaan Literasi Khusus Bagi Penyandang Disabilitas 2. Draft URK Pemberdayaan Disabilitas dalam rangka Pemberian Pelayanan Home Care Bagi Lanjut Usia	2

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia

Drs. Ade Rustama, MP

Kepala Bidang
Pemberdayaan Disabilitas,

Erlia Rahmawati, S.Si, MAB

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R.A. Syuri Hatiasari, S.IP
Jabatan : Kepala Subbidang Kelembagaan Lansia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Siti Nurhayati, SH
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Lansia

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pemberdayaan Lansia	Kelembagaan Lansia,
Siti Nurhayati, SH	**R.A. Syuri Hatiasari, S.IP**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kelembagaan Lansia untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kelembagaan Lansia dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Kelembagaan Lansia dalam penyusunan Draft URK Pemberdayaan Lansia dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lansia dan Penyandang Disabilitas Berat	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kelembagaan Lansia untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kelembagaan Lansia dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan 1. Bahan Draft URK Kelembagaan Lansia dalam penyusunan Draft URK Pemberdayaan Lansia dalam rangka Penyediaan Literasi Khusus Bagi Penyandang Disabilitas 2. Bahan Draft URK Kelembagaan Lansia dalam penyusunan Draft URK Pemberdayaan Lansia dalam rangka Pemberian Pelayanan Home Care Bagi Lanjut Usia	2

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Pemberdayaan Lansia

Siti Nurhayati, SH

Kepala Subbidang
Kelembagaan Lansia,

R.A. Syuri Hatiasari, S.IP

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Afandi, SE
Jabatan : Kepala Subbidang Kesejahteraan Disabilitas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Erlia Rahmawati, S.Si, MAB
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Disabilitas

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pemberdayaan Disabilitas,	Kesejahteraan Disabilitas,
Erlia Rahmawati, S.Si, MAB	**Ahmad Afandi, SE**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Disabilitas untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kesejahteraan Disabilitas dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Kesejahteraan Disabilitas dalam penyusunan Draft URK Pemberdayaan Disabilitas dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lansia dan Penyandang Disabilitas Berat	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Disabilitas untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kesejahteraan Disabilitas dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan 1. Bahan Draft URK Kesejahteraan Disabilitas dalam penyusunan Draft URK Pemberdayaan Disabilitas dalam rangka Penyediaan Literasi Khusus Bagi Penyandang Disabilitas 2. Bahan Draft URK Kesejahteraan Disabilitas dalam penyusunan Draft URK Pemberdayaan Disabilitas dalam rangka Pemberian Pelayanan Home Care Bagi Lanjut Usia	2

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Pemberdayaan Disabilitas,

Erlia Rahmawati, S.Si, MAB

Kepala Subbidang
Kesejahteraan Disabilitas,

Ahmad Afandi, SE

DEPUTI 3

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	dr. Sigit Priohutomo, MPH
Jabatan	:	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Puan Maharani
Jabatan	:	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Menteri Koordinator	Deputi Bidang Koordinasi
Bidang Pembangunan Manusia dan	Peningkatan Kesehatan,
Kebudayaan,	
Puan Maharani	**dr. Sigit Priohutomo, MPH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KESEHATAN

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kesehatan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Tingkat capaian K/L terhadap Pelayanan Dasar dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Peningkatan Kesehatan dalam mendukung target IPM Bidang Kesehatan	100%
	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kesehatan dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) Mendukung Kemantapan Pelayanan Dasar dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Bidang Peningkatan Kesehatan	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kesehatan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kesehatan dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
	Jumlah RK Mendukung Kemantapan Pemberdayaan di Bidang Peningkatan Kesehatan	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kesehatan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kesehatan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,05 (Skala 6)
	Jumlah RK Mendukung Kemantapan Gotong Royong di Bidang Peningkatan Kesehatan	1
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK	Nilai SAKIP	73,51

Program	Anggaran (Rp)
Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	34.725.000.000,-

Jakarta, Maret 2018

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan,

Puan Maharani

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kesehatan,

dr. Sigit Priohutomo, MPH

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meida Octarina, MCN
Jabatan : Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Sigit Priohutomo, MPH
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan,	Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan,
dr. Sigit Priohutomo, MPH	**Meida Octarina, MCN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan

Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan (URK) di bidang Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan dalam mendukung target IPM Bidang Kesehatan URK Ketahanan Gizi	1
	Jumlah URK di bidang Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan dalam mendukung indikator pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar URK Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan dalam mendukung indikator pemberdayaan URK Kesehatan Lingkungan	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,05 (Skala 6)
Dokumen Program dan Administratif Kegiatan di Bidang Peningkatan Kesehatan	Jumlah dokumen Program dan Administratif Kegiatan di Bidang Peningkatan Kesehatan	2

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kebijakan Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan	4.475.000.000,-

Jakarta, Maret 2018

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kesehatan,

dr. Sigit Priohutomo, MPH

Asisten Deputi
Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan,

Meida Octarina, MCN

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Wuryanto S, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Meida Octarina, MCN
Jabatan : Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak,	Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,
dan Kesehatan Lingkungan,	
Meida Octarina, MCN	**R. Wuryanto S, S.Sos**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Draf Dokumen Penguatan Kegiatan dan Administrasi Tata Kelola di Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan	Jumlah Draf Dokumen Penguatan Kegiatan dan Administrasi Tata Kelola di Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan	2

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak,
dan Kesehatan Lingkungan,

Meida Octarina, MCN

Kepala Bidang
Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,

R. Wuryanto S, S.Sos

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurnaningsih
Jabatan : Kepala Subbidang Tata Kelola

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : R. Wuryanto S, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,	Tata Kelola,
R. Wuryanto S, S.Sos	**Siti Nurnaningsih**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Draf Dokumen Administratif Tata Kelola di Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan	Jumlah Bahan Draf Dokumen Administratif Tata Kelola di Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,

R. Wuryanto S, S.Sos

Kepala Subbidang
Tata Kelola,

Siti Nurnaningsih

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anang Suryana, S.Kom
Jabatan : Kepala Subbidang Penguatan Kegiatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : R. Wuryanto S, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,	Penguatan Kegiatan,
R. Wuryanto S, S.Sos	**Anang Suryana, S.Kom**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Draf Dokumen Penguatan Kegiatan di Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan	Jumlah Bahan Draf Dokumen Penguatan Kegiatan di Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,

R. Wuryanto S, S.Sos

Kepala Subbidang
Penguatan Kegiatan,

Anang Suryana, S.Kom

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Kusuma Dewi, SST, M.Kes.
Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Meida Octarina, MCN
Jabatan : Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang Ketahanan Gizi dan
Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak,	Kesehatan Ibu dan Anak,
dan Kesehatan Lingkungan,	
Meida Octarina, MCN	**Ratna Kusuma Dewi, SST, M.Kes.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dalam mendukung target IPM di Bidang Kesehatan Draft URK Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dalam rangka Ketahanan Gizi	1
	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dalam rangka Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Draft URK Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dalam rangka Kesehatan Lingkungan	1

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak,
dan Kesehatan Lingkungan,

Meida Octarina, MCN

Kepala Bidang Ketahanan Gizi dan
Kesehatan Ibu dan Anak,

Ratna Kusuma Dewi, SST, M.Kes.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Martini, S.K.M.
Jabatan : Kepala Subbidang Mutu Gizi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ratna Kusuma Dewi, SST, M.Kes.
Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak,	Kepala Subbidang Mutu Gizi,
Ratna Kusuma Dewi, SST, M.Kes.	**Sri Martini, S.K.M.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Mutu Gizi untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Mutu Gizi dalam mendukung target IPM di Bidang Kesehatan Bahan Draft URK Mutu Gizi dalam penyusunan Draft URK Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dalam rangka Ketahanan Gizi	1
	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Mutu Gizi dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Mutu Gizi dalam penyusunan Draft URK Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dalam rangka Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Mutu Gizi untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Mutu Gizi dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft URK Mutu Gizi dalam penyusunan Draft URK Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dalam rangka Kesehatan Lingkungan	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak,

Ratna Kusuma Dewi, SST, M.Kes.

Kepala Subbidang Mutu Gizi,

Sri Martini, S.K.M.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Sukmawati Manti Putri, SKM
Jabatan : Kepala Subbidang Sanitasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Meida Octarina, MCN
Jabatan : Asisten Deputi Ketahan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Subbidang
Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak,	Sanitasi,
dan Kesehatan Lingkungan,	
Meida Octarina, MCN	**Indah Sukmawati Manti Putri, SKM**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Sanitasi untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Sanitasi dalam mendukung target IPM di Bidang Kesehatan Bahan Draft URK Sanitasi dalam penyusunan Draft URK Kesehatan Lingkungan dalam rangka Ketahanan Gizi	1
	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Sanitasi dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Sanitasi dalam penyusunan Draft URK Kesehatan Lingkungan dalam rangka Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Sanitasi untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Sanitasi dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft URK Sanitasi dalam penyusunan Draft URK Kesehatan Lingkungan dalam rangka Kesehatan Lingkungan	1

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak,
dan Kesehatan Lingkungan,

Meida Octarina, MCN

Kepala Subbidang
Sanitasi,

Indah Sukmawati Manti Putri, SKM

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg. Naalih Kelsum, MPH
Jabatan : Asisten Deputi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Sigit Priohutomo, MPH
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan,	Asisten Deputi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit,
dr. Sigit Priohutomo, MPH	**drg. Naalih Kelsum, MPH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan (URK) di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dalam mendukung target IPM Bidang Kesehatan URK Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan 1. URK Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 2. URK Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,05 (Skala 6)

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	2.550.000.000,-

Jakarta, Maret 2018

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kesehatan,

dr. Sigit Priohutomo, MPH

Asisten Deputi
Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit,

drg. Naalih Kelsum, MPH

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Wulan Sari, S.K.M.
Jabatan : Kepala Subbidang Penyakit Tidak Menular

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drg. Naalih Kelsum, MPH
Jabatan : Asisten Deputi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Subbidang
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit,	Penyakit Tidak Menular,
drg. Naalih Kelsum, MPH	**Ari Wulan Sari, S.K.M.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penyakit Tidak Menular untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Penyakit Tidak Menular dalam mendukung target IPM di Bidang Kesehatan Bahan Draft URK Penyakit Tidak Menular dalam penyusunan Draft URK Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1
	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Penyakit Tidak Menular dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar 1. Bahan Draft URK Penyakit Tidak Menular dalam penyusunan Draft URK Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 2. Bahan Draft URK Penyakit Tidak Menular dalam penyusunan Draft URK Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dalam rangka Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah	2

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit,

drg. Naalih Kelsum, MPH

Kepala Subbidang
Penyakit Tidak Menular,

Ari Wulan Sari, S.K.M.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aji Ibrahim Nasution, SE
Jabatan : Kepala Subbidang Dampak Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drg. Naalih Kelsum, MPH
Jabatan : Asisten Deputi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Subbidang
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit,	Dampak Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya,
drg. Naalih Kelsum, MPH	**Aji Ibrahim Nasution, SE**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Dampak Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Dampak Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dalam mendukung target IPM di Bidang Kesehatan Bahan Draft URK Dampak Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dalam penyusunan Draft URK Penyakit Tidak Menular dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1
	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Dampak Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar 1. Bahan Draft URK Dampak Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dalam penyusunan Draft URK Penyakit Tidak Menular dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 2. Bahan Draft URK Dampak Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dalam penyusunan Draft URK Penyakit Tidak Menular dalam rangka Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah	2

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit,

drg. Naalih Kelsum, MPH

Kepala Subbidang
Dampak Narkotika, Alkohol, Psikotropika,
dan Zat Adiktif Lainnya,

Aji Ibrahim Nasution, SE

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Sinurtina Sihombing, M.Kes
Jabatan : Kepala Bidang Penyakit Menular

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drg. Naalih Kelsum, MPH
Jabatan : Asisten Deputi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit,	Penyakit Menular,
drg. Naalih Kelsum, MPH	**dr. Sinurtina Sihombing, M.Kes**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penyakit Menular untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Penyakit Menular dalam mendukung target IPM di Bidang Kesehatan Draft URK Penyakit Menular dalam rangka Draf URK Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1
	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Penyakit Menular dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar 1. Draft URK Penyakit Menular dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 2. Draft URK Penyakit Menular dalam rangka Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah	2

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit,

drg. Naalih Kelsum, MPH

Kepala Bidang
Penyakit Menular,

dr. Sinurtina Sihombing, M.Kes

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drh. Rama Prima Syahti Fauzi
Jabatan : Kepala Subbidang Zoonosis

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Sinurtina Sihombing, M.Kes
Jabatan : Kepala Bidang Penyakit Menular

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Penyakit Menular,	Zoonosis,
dr. Sinurtina Sihombing, M.Kes	**drh. Rama Prima Syahti Fauzi**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Zoonosis untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Zoonosis dalam mendukung target IPM di Bidang Kesehatan Bahan Draft URK Zoonosis dalam penyusunan Draft URK Penyakit Menular dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1
	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Zoonosis dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar 1. Bahan Draft URK Zoonosis dalam penyusunan Draft URK Penyakit Menular dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 2. Bahan Draft URK Zoonosis dalam penyusunan Draft URK Penyakit Menular dalam rangka Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah	2

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Penyakit Menular,

dr. Sinurtina Sihombing, M.Kes

Kepala Subbidang
Zoonosis,

drh. Rama Prima Syahti Fauzi

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Andi Rahmadi, M.Sc
Jabatan : Asisten Deputi Pelayanan Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Sigit Priohutomo, MPH
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi	Asisten Deputi
Peningkatan Kesehatan,	Pelayanan Kesehatan,
dr. Sigit Priohutomo, MPH	**Ir. Andi Rahmadi, M.Sc**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pelayanan Kesehatan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pelayanan Kesehatan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pelayanan Kesehatan dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan (URK) di bidang Pelayanan Kesehatan dalam mendukung target IPM Bidang Kesehatan URK Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1
	Jumlah URK di bidang Pelayanan Kesehatan dalam mendukung indikator pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar URK Peningkatan Pengawasan dan Pemenuhan Obat dan Alat Kesehatan	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pelayanan Kesehatan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pelayanan Kesehatan dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pelayanan Kesehatan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pelayanan Kesehatan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,05 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Pelayanan Kesehatan dalam mendukung indikator gotong royong URK Peningkatan Pembiayaan SJSN	1

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan	2.375.000.000,-

Jakarta, Maret 2018

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kesehatan,

dr. Sigit Priohutomo, MPH

Asisten Deputi
Pelayanan Kesehatan,

Ir. Andi Rahmadi, M.Sc

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nani Rohani, SKM, MARS
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Dasar dan Rujukan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Andi Rahmadi, M.Sc
Jabatan : Asisten Deputi Pelayanan Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Pelayanan Kesehatan,	Pelayanan Dasar dan Rujukan,
Ir. Andi Rahmadi, M.Sc	**Nani Rohani, SKM, MARS**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pelayanan Kesehatan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pelayanan Dasar dan Rujukan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pelayanan Dasar dan Rujukan dalam mendukung target IPM di Bidang Kesehatan Draft URK Pelayanan Dasar dan Rujukan dalam rangka Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1
	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pelayanan Dasar dan Rujukan dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Pelayanan Dasar dan Rujukan dalam rangka Peningkatan Pengawasan dan Pemenuhan Obat dan Alat Kesehatan	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pelayanan Dasar dan Rujukan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pelayanan Dasar dan Rujukan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Draft URK Pelayanan Dasar dan Rujukan dalam rangka Peningkatan Pembiayaan SJSN	1

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Pelayanan Kesehatan,

Ir. Andi Rahmadi, M.Sc

Kepala Bidang
Pelayanan Dasar dan Rujukan,

Nani Rohani, SKM, MARS

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widya Agustini Munggaran, S.Kep, M.K.M
Jabatan : Kepala Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nani Rohani, SKM, MARS
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Dasar dan Rujukan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pelayanan Dasar dan Rujukan,	Pelayanan Kesehatan Dasar,
Nani Rohani, SKM, MARS	**Widya Agustini Munggaran, S.Kep, M.K.M**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pelayanan Kesehatan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pelayanan Kesehatan Dasar untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pelayanan Kesehatan Dasar dalam mendukung target IPM di Bidang Kesehatan Bahan Draft URK Pelayanan Kesehatan Dasar dalam penyusunan Draft URK Pelayanan Dasar dan Rujukan dalam rangka Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1
	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pelayanan Kesehatan Dasar dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Pelayanan Kesehatan Dasar dalam penyusunan Draft URK Pelayanan Dasar dan Rujukan dalam rangka Peningkatan Pengawasan dan Pemenuhan Obat dan Alat Kesehatan	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pelayanan Kesehatan Dasar yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pelayanan Kesehatan Dasar yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Bahan Draft URK Pelayanan Kesehatan Dasar dalam penyusunan Draft URK Pelayanan Dasar dan Rujukan dalam rangka Peningkatan Pembiayaan SJSN	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Pelayanan Dasar dan Rujukan,

Nani Rohani, SKM, MARS

Kepala Subbidang
Pelayanan Kesehatan Dasar,

Widya Agustini Munggaran, S.Kep, M.K.M

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg. Diana Sista Dewi, MBA
Jabatan : Kepala Bidang Pembiayaan Kesehatan dan Farmasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Andi Rahmadi, M.Sc
Jabatan : Asisten Deputi Pelayanan Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Pelayanan Kesehatan,	Pembiayaan Kesehatan dan Farmasi,
Ir. Andi Rahmadi, M.Sc	**drg. Diana Sista Dewi, MBA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pelayanan Kesehatan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pembiayaan Kesehatan dan Farmasi untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pembiayaan Kesehatan dan Farmasi dalam mendukung target IPM di Bidang Kesehatan Draft URK Pembiayaan Kesehatan dan Farmasi dalam rangka Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1
	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pembiayaan Kesehatan dan Farmasi dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Pembiayaan Kesehatan dan Farmasi dalam rangka Peningkatan Pengawasan dan Pemenuhan Obat dan Alat Kesehatan	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pembiayaan Kesehatan dan Farmasi yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pembiayaan Kesehatan dan Farmasi yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Draft URK Pembiayaan Kesehatan dan Farmasi dalam rangka Peningkatan Pembiayaan SJSN	1

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Pelayanan Kesehatan,

Ir. Andi Rahmadi, M.Sc

Kepala Bidang
Pembiayaan Kesehatan dan Farmasi,

drg. Diana Sista Dewi, MBA

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Pasli, S.STP, M.Si
Jabatan : Asisten Deputi Kependudukan dan KB

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Sigit Priohutomo, MPH
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi	Asisten Deputi
Peningkatan Kesehatan,	Kependudukan dan KB,
dr. Sigit Priohutomo, MPH	**Imam Pasli, S.STP, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Kependudukan dan KB
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kependudukan dan KB untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kependudukan dan KB dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan (URK) di bidang Kependudukan dan KB dalam mendukung target IPM Bidang Kesehatan URK Peningkatan Pemahaman Remaja Mengenai Penyiapan Kehidupan Berkeluarga dan Kesehatan Reproduksi (KBKR)	1
	Jumlah URK di bidang Kependudukan dan KB dalam mendukung indikator pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar URK Kebijakan Pembangunan Kependudukan	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kependudukan dan KB untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kependudukan dan KB dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kependudukan dan KB yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kependudukan dan KB yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,05 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Kependudukan dan KB dalam mendukung indikator gotong royong URK Penguatan Kelembagaan KB	1
	Jumlah Laporan pelaksanaan Kampung KB	1

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kebijakan Kependudukan dan KB	3.725.000.000,-

Jakarta, Maret 2018

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kesehatan,

dr. Sigit Priohutomo, MPH

Asisten Deputi
Kependudukan dan KB,

Imam Pasli, S.STP, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sudiya, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Kependudukan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Imam Pasli, S.STP., M.Si.
Jabatan : Asisten Deputi Kependudukan dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Kependudukan dan Keluarga Berencana,	Kependudukan,
Imam Pasli, S.STP., M.Si.	**Sudiya, S.Sos, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Kependudukan dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kependudukan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kependudukan dalam mendukung target IPM di Bidang Kesehatan Draft URK Kependudukan dalam rangka Peningkatan Pemahaman Remaja Mengenai Penyiapan Kehidupan Berkeluarga dan Kesehatan Reproduksi (KBKR)	1
	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kependudukan dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Kependudukan dalam rangka Kebijakan Pembangunan Kependudukan	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kependudukan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kependudukan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Draft URK Kependudukan dalam rangka Penguatan Kelembagaan KB	1

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Kependudukan dan Keluarga Berencana,

Imam Pasli, S.STP., M.Si.

Kepala Bidang
Kependudukan,

Sudiya, S.Sos, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Lestari, S.Sos, M.M.
Jabatan : Kepala Subbidang Administrasi Kependudukan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sudiya, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Kependudukan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Kependudukan,	Administrasi Kependudukan,
Sudiya, S.Sos, M.Si	**Dwi Lestari, S.Sos, M.M.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Kependudukan dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Administrasi Kependudukan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dalam mendukung target IPM di Bidang Kesehatan Bahan Draft URK Administrasi Kependudukan dalam penyusunan Draft URK Kependudukan dalam rangka Peningkatan Pemahaman Remaja Mengenai Penyiapan Kehidupan Berkeluarga dan Kesehatan Reproduksi (KBKR)	1
	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Administrasi Kependudukan dalam penyusunan Draft URK Kependudukan dalam rangka Kebijakan Pembangunan Kependudukan	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Administrasi Kependudukan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Bahan Draft URK Administrasi Kependudukan dalam penyusunan Draft URK Kependudukan dalam rangka Penguatan Kelembagaan KB	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Kependudukan,

Sudiya, S.Sos, M.Si

Kepala Subbidang
Administrasi Kependudukan,

Dwi Lestari, S.Sos, M.M.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nevo Suryani, S.E.
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Imam Pasli, S.STP., M.Si.
Jabatan : Asisten Deputi Kependudukan dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Kependudukan dan Keluarga Berencana,	Keluarga Berencana,
Imam Pasli, S.STP., M.Si.	**Nevo Suryani, S.E.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Kependudukan dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Keluarga Berencana untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Keluarga Berencana dalam mendukung target IPM di Bidang Kesehatan Draft URK Keluarga Berencana dalam rangka Peningkatan Pemahaman Remaja Mengenai Penyiapan Kehidupan Berkeluarga dan Kesehatan Reproduksi (KBKR)	1
	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Keluarga Berencana dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Keluarga Berencana dalam rangka Kebijakan Pembangunan Kependudukan	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Keluarga Berencana yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Draft URK Keluarga Berencana dalam rangka Penguatan Kelembagaan KB	1

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Kependudukan dan Keluarga Berencana,

Imam Pasli, S.STP., M.Si.

Kepala Bidang
Keluarga Berencana,

Nevo Suryani, S.E.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyuni Aristyanti, S.KM
Jabatan : Kepala Subbidang Partisipasi Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nevo Suryani, S.E.
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Keluarga Berencana,	Partisipasi Masyarakat,
Nevo Suryani, S.E.	**Wahyuni Aristyanti, S.KM**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Kependudukan dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Partisipasi Masyarakat untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Partisipasi Masyarakat dalam mendukung target IPM di Bidang Kesehatan Bahan Draft Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Draft URK Keluarga Berencana dalam rangka Peningkatan Pemahaman Remaja Mengenai Penyiapan Kehidupan Berkeluarga dan Kesehatan Reproduksi (KBKR)	1
	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Partisipasi Masyarakat dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Draft URK Keluarga Berencana dalam rangka Kebijakan Pembangunan Kependudukan	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Partisipasi Masyarakat yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Partisipasi Masyarakat yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Bahan Draft Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Draft URK Keluarga Berencana dalam rangka Penguatan Kelembagaan KB	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Keluarga Berencana,

Nevo Suryani, S.E.

Kepala Subbidang
Partisipasi Masyarakat,

Wahyuni Aristyanti, S.KM

DEPUTI 4

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A
Jabatan	:	Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Puan Maharani
Jabatan	:	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Menteri Koordinator	Deputi Bidang Koordinasi
Bidang Pembangunan Manusia dan	Pendidikan dan Agama,
Kebudayaan,	
Puan Maharani	**Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENDIDIKAN DAN AGAMA

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Tingkat capaian K/L terhadap Pelayanan Dasar bidang Pendidikan dan Agama dalam mendukung target IPM di Bidang Pendidikan	100%
	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) Mendukung Kemantapan Pelayanan Dasar dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Bidang Pendidikan dan Agama	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
	Jumlah RK Mendukung Kemantapan Pemberdayaan di Bidang Pendidikan dan Agama	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,07 (Skala 6)
	Jumlah RK Mendukung Kemantapan Gotong Royong di Bidang Pendidikan dan Agama	2
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK	Nilai SAKIP	73,51

Program	Anggaran (Rp)
Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	25.550.000.000,-

Jakarta, Maret 2018

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Puan Maharani

Deputi Bidang Koordinasi
Pendidikan dan Agama,

Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raden Wijaya Kusumawardhana, ST, MMIB
Jabatan : Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi	Asisten Deputi
Pendidikan dan Agama,	Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja,
Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A	**Raden Wijaya Kusumawardhana, ST, MMIB**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan (URK) di bidang Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja dalam mendukung target IPM di bidang Pendidikan URK Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja	1
	Jumlah URK di bidang Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja dalam mendukung indikator pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar URK Penguatan Pendidikan Vokasi di Pendidikan Menengah	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja dalam mendukung indikator pemberdayaan URK Akreditasi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,07 (Skala 6)
Dokumen Program dan Administratif Kegiatan di Bidang Pendidikan dan Agama	Jumlah dokumen Program dan Administratif Kegiatan di Bidang Pendidikan dan Agama	2

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kebijakan Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja	5.000.000.000,-

Deputi Bidang Koordinasi
Pendidikan dan Agama,

Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A

Jakarta, Maret 2018
Asisten Deputi
Pendidikan Menengah dan
Keterampilan Bekerja,

Raden Wijaya Kusumawardhana, ST, MMIB

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendri Jupiter, S.Pt, MAP, MPP.
Jabatan : Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Raden Wijaya Kusumawardhana, ST, MMIB
Jabatan : Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Pendidikan Menengah dan	Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,
Keterampilan Bekerja,	
Raden Wijaya Kusumawardhana, ST, MMIB	**Hendri Jupiter, S.Pt, MAP, MPP.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Draf Dokumen Penguatan Kegiatan dan Administrasi Tata Kelola di Bidang Pendidikan dan Agama	Jumlah Draf Dokumen Penguatan Kegiatan dan Administrasi Tata Kelola di Bidang Pendidikan dan Agama	2

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Pendidikan Menengah dan
Keterampilan Bekerja,

Raden Wijaya Kusumawardhana, ST, MMIB

Kepala Bidang
Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,

Hendri Jupiter, S.Pt, MAP, MPP.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Haryono, S.Sos
Jabatan : Kepala Subbidang Penguatan Kegiatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hendri Jupiter, S.Pt, MAP, MPP.
Jabatan : Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,	Penguatan Kegiatan,
Hendri Jupiter, S.Pt, MAP, MPP.	**Dwi Haryono, S.Sos**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Draf Dokumen Penguatan Kegiatan di Bidang Pendidikan dan Agama	Jumlah Bahan Draf Dokumen Penguatan Kegiatan di Bidang Pendidikan dan Agama	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,

Hendri Jupiter, S.Pt, MAP, MPP.

Kepala Subbidang
Penguatan Kegiatan,

Dwi Haryono, S.Sos

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Maskur, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Menengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Raden Wijaya Kusumawardhana, ST, MMIB
Jabatan : Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Pendidikan Menengah dan	Pendidikan Menengah,
Keterampilan Bekerja,	
Raden Wijaya Kusumawardhana, ST, MMIB	**Drs. Maskur, M.Pd**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan Menengah untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pendidikan Menengah dalam mendukung target IPM di Bidang Pendidikan Draft URK Pendidikan Menengah dalam rangka Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja	1
	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pendidikan Menengah dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Pendidikan Menengah dalam rangka Penguatan Pendidikan Vokasi di Pendidikan Menengah	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan Menengah untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pendidikan Menengah dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Draft URK Pendidikan Menengah dalam rangka Akreditasi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja	1

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Pendidikan Menengah dan
Keterampilan Bekerja,

Raden Wijaya Kusumawardhana, ST, MMIB

Kepala Bidang
Pendidikan Menengah,

Drs. Maskur, M.Pd

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ivan, S.Pd, M.Si
Jabatan : Kepala Subbidang Ketenagaan dan Kesiswaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Maskur, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Menengah

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pendidikan Menengah,	Ketenagaan dan Kesiswaan,
Drs. Maskur, M.Pd	**Muhammad Ivan, S.Pd, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ketenagaan dan Kesiswaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Ketenagaan dan Kesiswaan dalam mendukung target IPM di Bidang Pendidikan Bahan Draft URK Ketenagaan dan Kesiswaan dalam penyusunan Draft URK Pendidikan Menengah dalam rangka Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja	1
	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Ketenagaan dan Kesiswaan dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Ketenagaan dan Kesiswaan dalam penyusunan Draft URK Pendidikan Menengah dalam rangka Penguatan Pendidikan Vokasi di Pendidikan Menengah	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ketenagaan dan Kesiswaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Ketenagaan dan Kesiswaan dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft URK Ketenagaan dan Kesiswaan dalam penyusunan Draft URK Pendidikan Menengah dalam rangka Akreditasi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Pendidikan Menengah,

Drs. Maskur, M.Pd

Kepala Subbidang
Ketenagaan dan Kesiswaan,

Muhammad Ivan, S.Pd, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Sofiana Lestari, S.Pi, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Keterampilan Bekerja

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Raden Wijaya Kusumawardhana, ST, MMIB
Jabatan : Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Pendidikan Menengah dan	Pendidikan Keterampilan Bekerja,
Keterampilan Bekerja,	
Raden Wijaya Kusumawardhana, ST, MMIB	**Ratna Sofiana Lestari, S.Pi, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan Keterampilan Bekerja untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pendidikan Keterampilan Bekerja dalam mendukung target IPM di Bidang Pendidikan Draft URK Pendidikan Keterampilan Bekerja dalam rangka Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja	1
	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pendidikan Keterampilan Bekerja dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Pendidikan Keterampilan Bekerja dalam rangka Penguatan Pendidikan Vokasi di Pendidikan Menengah	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan Keterampilan Bekerja untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pendidikan Keterampilan Bekerja dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Draft URK Pendidikan Keterampilan Bekerja dalam rangka Akreditasi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja	1

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Pendidikan Menengah dan
Keterampilan Bekerja,

Raden Wijaya Kusumawardhana, ST, MMIB

Kepala Bidang
Pendidikan Keterampilan Bekerja,

Ratna Sofiana Lestari, S.Pi, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agustinus Budi Pramono, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Subbidang Ketenagaan dan Kesiswaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ratna Sofiana Lestari, S.Pi, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Keterampilan Bekerja

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pendidikan Keterampilan Bekerja,	Ketenagaan dan Kesiswaan,
Ratna Sofiana Lestari, S.Pi, M.Si	**Agustinus Budi Pramono, SE, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ketenagaan dan Kesiswaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Ketenagaan dan Kesiswaan dalam mendukung target IPM di Bidang Pendidikan Bahan Draft URK Ketenagaan dan Kesiswaan dalam penyusunan Draft URK Pendidikan Keterampilan Bekerja dalam rangka Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja	1
	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Ketenagaan dan Kesiswaan dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Ketenagaan dan Kesiswaan dalam penyusunan Draft URK Pendidikan Keterampilan Bekerja dalam rangka Penguatan Pendidikan Vokasi di Pendidikan Menengah	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ketenagaan dan Kesiswaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Ketenagaan dan Kesiswaan dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft URK Ketenagaan dan Kesiswaan dalam penyusunan Draft URK Pendidikan Keterampilan Bekerja dalam rangka Akreditasi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Pendidikan Keterampilan Bekerja,

Ratna Sofiana Lestari, S.Pi, M.Si

Kepala Subbidang
Ketenagaan dan Kesiswaan,

Agustinus Budi Pramono, SE, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi
Jabatan : Asisten Deputi PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama,	Asisten Deputi PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat,
Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A	**Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan (URK) di bidang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat dalam mendukung target IPM di bidang Pendidikan URK Peningkatan Efektifitas Bantuan Pendidikan Bagi Anak Usia Sekolah	1
	Jumlah URK di bidang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat dalam mendukung indikator pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar URK Peningkatan Kualitas Guru PAUD dan Dikdas	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,07 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat dalam mendukung indikator gotong royong URK Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan PAUD, Dikdas dan Pendidikan Non Formal	1

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kebijakan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat	2.400.000.000,-

Deputi Bidang Koordinasi
Pendidikan dan Agama,

Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A

Jakarta, Maret 2018
Asisten Deputi
PAUD, Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Masyarakat,

Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Dian Vitasari
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi
Jabatan : Asisten Deputi PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
PAUD, Pendidikan Dasar dan	Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat,	Pendidikan Masyarakat,
Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi	**Ir. Dian Vitasari**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam mendukung target IPM di Bidang Pendidikan Draft URK Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam rangka Peningkatan Efektifitas Bantuan Pendidikan Bagi Anak Usia Sekolah	1
	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Guru PAUD dan Dikdas	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Draft URK Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam rangka Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan PAUD, Dikdas dan Pendidikan Non Formal	1

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
PAUD, Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Masyarakat,

Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi

Kepala Bidang
Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat,

Ir. Dian Vitasari

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saiful Hawawi, S.AP
Jabatan : Kepala Subbidang Ketenagaan dan Kesiswaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Dian Vitasari
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pendidikan Anak Usia Dini dan	Ketenagaan dan Kesiswaan,
Pendidikan Masyarakat,	
Ir. Dian Vitasari	**Saiful Hawawi, S.AP**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ketenagaan dan Kesiswaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Ketenagaan dan Kesiswaan dalam mendukung target IPM di Bidang Pendidikan Bahan Draft URK Ketenagaan dan Kesiswaan dalam penyusunan Draft URK Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam rangka Peningkatan Efektifitas Bantuan Pendidikan Bagi Anak Usia Sekolah	1
	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Ketenagaan dan Kesiswaan dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Ketenagaan dan Kesiswaan dalam penyusunan Draft URK Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Guru PAUD dan Dikdas	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ketenagaan dan Kesiswaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Ketenagaan dan Kesiswaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Bahan Draft URK Ketenagaan dan Kesiswaan dalam penyusunan Draft URK Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam rangka Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan PAUD, Dikdas dan Pendidikan Non Formal	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat,

Ir. Dian Vitasari

Kepala Subbidang
Ketenagaan dan Kesiswaan,

Saiful Hawawi, S.AP

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jazziray Hartoyo, S.Sos, M.Ed, MM
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi
Jabatan : Asisten Deputi PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
PAUD, Pendidikan Dasar dan	Pendidikan Dasar,
Pendidikan Masyarakat,	
Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi	**Jazziray Hartoyo, S.Sos, M.Ed, MM**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan Dasar untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pendidikan Dasar dalam mendukung target IPM di Bidang Pendidikan Draft URK Pendidikan Dasar dalam rangka Peningkatan Efektifitas Bantuan Pendidikan Bagi Anak Usia Sekolah	1
	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pendidikan Dasar dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Pendidikan Dasar dalam rangka Peningkatan Kualitas Guru PAUD dan Dikdas	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan Dasar yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pendidikan Dasar yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Draft URK Pendidikan Dasar dalam rangka Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan PAUD, Dikdas dan Pendidikan Non Formal	1

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
PAUD, Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Masyarakat,

Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi

Kepala Bidang
Pendidikan Dasar,

Jazziray Hartoyo, S.Sos, M.Ed, MM

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Titisari Ramandini, S.E, M.E
Jabatan : Kepala Subbidang Ketenagaan dan Kesiswaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jazziray Hartoyo, S.Sos, M.Ed, MM
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pendidikan Dasar,	Ketenagaan dan Kesiswaan,
Jazziray Hartoyo, S.Sos, M.Ed, MM	**Titisari Ramandini, S.E, M.E**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ketenagaan dan Kesiswaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Ketenagaan dan Kesiswaan dalam mendukung target IPM di Bidang Pendidikan Bahan Draft URK Ketenagaan dan Kesiswaan dalam penyusunan Draft URK Pendidikan Dasar dalam rangka Peningkatan Efektifitas Bantuan Pendidikan Bagi Anak Usia Sekolah	1
	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Ketenagaan dan Kesiswaan dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Ketenagaan dan Kesiswaan dalam penyusunan Draft URK Pendidikan Dasar dalam rangka Peningkatan Kualitas Guru PAUD dan Dikdas	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ketenagaan dan Kesiswaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Ketenagaan dan Kesiswaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Bahan Draft URK Ketenagaan dan Kesiswaan dalam penyusunan Draft URK Pendidikan Dasar dalam rangka Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan PAUD, Dikdas dan Pendidikan Non Formal	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Pendidikan Dasar,

Jazziray Hartoyo, S.Sos, M.Ed, MM

Kepala Subbidang
Ketenagaan dan Kesiswaan,

Titisari Ramandini, S.E, M.E

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susi Nelitasari, SE
Jabatan : Kepala Subbidang Mutu, Sarana dan Prasarana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jazziray Hartoyo, S.Sos, M.Ed, MM
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pendidikan Dasar,	Mutu, Sarana dan Prasarana,
Jazziray Hartoyo, S.Sos, M.Ed, MM	**Susi Nelitasari, SE**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Mutu, Sarana dan Prasarana untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Mutu, Sarana dan Prasarana dalam mendukung target IPM di Bidang Pendidikan Bahan Draft Mutu, Sarana dan Prasarana dalam penyusunan Draft URK Pendidikan Dasar dalam rangka Peningkatan Efektifitas Bantuan Pendidikan Bagi Anak Usia Sekolah	1
	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Mutu, Sarana dan Prasarana dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft Mutu, Sarana dan Prasarana dalam penyusunan Draft URK Pendidikan Dasar dalam rangka Peningkatan Kualitas Guru PAUD dan Dikdas	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Mutu, Sarana dan Prasarana yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Mutu, Sarana dan Prasarana yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Bahan Draft Mutu, Sarana dan Prasarana dalam penyusunan Draft URK Pendidikan Dasar dalam rangka Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan PAUD, Dikdas dan Pendidikan Non Formal	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Pendidikan Dasar,

Jazziray Hartoyo, S.Sos, M.Ed, MM

Kepala Subbidang
Mutu, Sarana dan Prasarana,

Susi Nelitasari, SE

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Asril, M.Si
Jabatan : Asisten Deputi Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi	Asisten Deputi
Pendidikan dan Agama,	Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK,
Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A	**Ir. Asril, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan (URK) di bidang Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK dalam mendukung target IPM di bidang Pendidikan URK Peningkatan Kualitas dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK dalam mendukung indikator pemberdayaan URK Revitalisasi Pendidikan Vokasi	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,07 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK dalam mendukung indikator gotong royong URK Penguatan Science and Techno Park (STP) dan Lembaga Litbang	1
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental	1

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kebijakan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK	11.450.000.000,-

Jakarta, Maret 2018

Deputi Bidang Koordinasi
Pendidikan dan Agama,

Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A

Asisten Deputi
Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK,

Ir. Asril, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuswardana Sarodja, B.Eng., M.M
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Tinggi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Asril, M.Si
Jabatan : Asisten Deputi Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK,	Pendidikan Tinggi,
Ir. Asril, M.Si	**Nuswardana Sarodja, B.Eng., M.M**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan Tinggi untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pendidikan Tinggi dalam mendukung target IPM di Bidang Pendidikan Draft URK Pendidikan Tinggi dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan Tinggi untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pendidikan Tinggi dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Draft URK Pendidikan Tinggi dalam rangka Revitalisasi Pendidikan Vokasi	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan Tinggi yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pendidikan Tinggi yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Draft URK Pendidikan Tinggi dalam rangka Penguatan Science and Techno Park (STP) dan Lembaga Litbang	1

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK,

Ir. Asril, M.Si

Kepala Bidang
Pendidikan Tinggi,

Nuswardana Sarodja, B.Eng., M.M

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aria Setia Ningrum, S.Pd
Jabatan : Kepala Subbidang Kemahasiswaan dan Akademik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nuswardana Sarodja, B.Eng., M.M
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Tinggi

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pendidikan Tinggi,	Kemahasiswaan dan Akademik,
Nuswardana Sarodja, B.Eng., M.M	**Aria Setia Ningrum, S.Pd**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kemahasiswaan dan Akademik untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kemahasiswaan dan Akademik dalam mendukung target IPM di Bidang Pendidikan Bahan Draft URK Kemahasiswaan dan Akademik dalam penyusunan Draft URK Pendidikan Tinggi dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kemahasiswaan dan Akademik untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kemahasiswaan dan Akademik dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft URK Kemahasiswaan dan Akademik dalam penyusunan Draft URK Pendidikan Tinggi dalam rangka Revitalisasi Pendidikan Vokasi	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kemahasiswaan dan Akademik yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kemahasiswaan dan Akademik yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Bahan Draft URK Kemahasiswaan dan Akademik dalam penyusunan Draft URK Pendidikan Tinggi dalam rangka Penguatan Science and Techno Park (STP) dan Lembaga Litbang	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Pendidikan Tinggi,

Nuswardana Sarodja, B.Eng., M.M

Kepala Subbidang
Kemahasiswaan dan Akademik,

Aria Setia Ningrum, S.Pd

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mareta Pratiwi, SS
Jabatan : Kepala Subbidang Ketenagaan, Sarana dan Prasarana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nuswardana Sarodja, B.Eng., M.M
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Tinggi

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pendidikan Tinggi,	Ketenagaan, Sarana dan Prasarana,
Nuswardana Sarodja, B.Eng., M.M	**Mareta Pratiwi, SS**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ketenagaan, Sarana dan Prasarana untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Ketenagaan, Sarana dan Prasarana dalam mendukung target IPM di Bidang Pendidikan Bahan Draft URK Ketenagaan, Sarana dan Prasarana dalam penyusunan Draft URK Pendidikan Tinggi dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ketenagaan, Sarana dan Prasarana untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Ketenagaan, Sarana dan Prasarana dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft URK Ketenagaan, Sarana dan Prasarana dalam penyusunan Draft URK Pendidikan Tinggi dalam rangka Revitalisasi Pendidikan Vokasi	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ketenagaan, Sarana dan Prasarana yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Ketenagaan, Sarana dan Prasarana yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Bahan Draft URK Ketenagaan, Sarana dan Prasarana dalam penyusunan Draft URK Pendidikan Tinggi dalam rangka Penguatan Science and Techno Park (STP) dan Lembaga Litbang	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Pendidikan Tinggi,

Nuswardana Sarodja, B.Eng., M.M

Kepala Subbidang
Ketenagaan, Sarana dan Prasarana,

Mareta Pratiwi, SS

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda Restaningrum, SE, M.I.Kom
Jabatan : Kepala Bidang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Asril, M.Si
Jabatan : Asisten Deputi Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK,	Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
Ir. Asril, M.Si	**Linda Restaningrum, SE, M.I.Kom**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam mendukung target IPM di Bidang Pendidikan Draft URK Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Draft URK Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka Revitalisasi Pendidikan Vokasi	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Draft URK Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka Penguatan Science and Techno Park (STP) dan Lembaga Litbang	1

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK,

Ir. Asril, M.Si

Kepala Bidang
Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi,

Linda Restaningrum, SE, M.I.Kom

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anang Setiawan, S.T, M.A.P
Jabatan : Kepala Subbidang Kreatifitas dan Inovasi Teknologi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Linda Restaningrum, SE, M.I.Kom
Jabatan : Kepala Bidang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan	Kreatifitas dan Inovasi Teknologi,
dan Teknologi,	
Linda Restaningrum, SE, M.I.Kom	**Anang Setiawan, S.T, M.A.P**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kreatifitas dan Inovasi Teknologi untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kreatifitas dan Inovasi Teknologi dalam mendukung target IPM di Bidang Pendidikan Bahan Draft URK Kreatifitas dan Inovasi Teknologi dalam penyusunan Draft URK Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kreatifitas dan Inovasi Teknologi untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kreatifitas dan Inovasi Teknologi dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft URK Kreatifitas dan Inovasi Teknologi dalam penyusunan Draft URK Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka Revitalisasi Pendidikan Vokasi	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kreatifitas dan Inovasi Teknologi yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kreatifitas dan Inovasi Teknologi yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Bahan Draft URK Kreatifitas dan Inovasi Teknologi dalam penyusunan Draft URK Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka Penguatan Science and Techno Park (STP) dan Lembaga Litbang	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi,

Linda Restaningrum, SE, M.I.Kom

Kepala Subbidang
Kreatifitas dan Inovasi Teknologi,

Anang Setiawan, S.T, M.A.P

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Aris Darmansyah Edisaputra, M.Eng
Jabatan : Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama,	Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama,
Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A	**Ir. Aris Darmansyah Edisaputra, M.Eng**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan (URK) di bidang Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama dalam mendukung indikator pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar 1. URK Pengembangan Kelembagaan Kerukunan Umat Beragama 2. URK Penguatan Kelembagaan Kerukunan Umat Beragama	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama dalam mendukung indikator pemberdayaan URK Pemberdayaan Ekonomi Umat	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,07 (Skala 6)
	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan dan kerukunan umat beragama pada ormas keagamaan URK Pelaksanaan koordinasi ormas keagamaan	1

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama	4.350.000.000,-

Jakarta, Maret 2018

Deputi Bidang Koordinasi
Pendidikan dan Agama,

Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A

Asisten Deputi
Pemberdayaan dan Kerukunan
Umat Beragama,

Ir. Aris Darmansyah Edisaputra, M.Eng

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Fajriah, S.Ag
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Umat Beragama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Aris Darmansyah Edisaputra, M.Eng
Jabatan : Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Pemberdayaan dan Kerukunan	Pemberdayaan Umat Beragama,
Umat Beragama,	
Ir. Aris Darmansyah Edisaputra, M.Eng	**Nur Fajriah, S.Ag**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Umat Beragama untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemberdayaan Umat Beragama dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar 1. Draft URK Pemberdayaan Umat Beragama dalam rangka Pengembangan Kelembagaan Kerukunan Umat Beragama 2. Draft URK Pemberdayaan Umat Beragama dalam rangka Penguatan Kelembagaan Kerukunan Umat Beragama	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Umat Beragama untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemberdayaan Umat Beragama dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Draft URK Pemberdayaan Umat Beragama dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat	1

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Pemberdayaan dan Kerukunan
Umat Beragama,

Ir. Aris Darmansyah Edisaputra, M.Eng

Kepala Bidang
Pemberdayaan Umat Beragama,

Nur Fajriah, S.Ag

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abu Nasir, S.Ag, M.Pd.I
Jabatan : Kepala Subbidang Pemberdayaan Zakat Infak, Shadaqoh, Wakaf, dan Jaminan Produk Halal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nur Fajriah, S.Ag
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Umat Beragama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pemberdayaan Umat Beragama,	Pemberdayaan Zakat Infak, Shadaqoh, Wakaf, dan Jaminan Produk Halal,
Nur Fajriah, S.Ag	**Abu Nasir, S.Ag, M.Pd.I**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Zakat Infak, Shadaqoh, Wakaf, dan Jaminan Produk Halal untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemberdayaan Zakat Infak, Shadaqoh, Wakaf, dan Jaminan Produk Halal dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar 1. Bahan Draft URK Pemberdayaan Zakat Infak, Shadaqoh, Wakaf dan Jaminan Produk Halal dalam penyusunan Draft URK Pemberdayaan Umat Beragama dalam rangka Pengembangan Kelembagaan Kerukunan Umat Beragama 2. Bahan Draft URK Pemberdayaan Zakat Infak, Shadaqoh, Wakaf dan Jaminan Produk Halal dalam penyusunan Draft URK Pemberdayaan Umat Beragama dalam rangka Penguatan Kelembagaan Kerukunan Umat Beragama	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Zakat Infak, Shadaqoh, Wakaf, dan Jaminan Produk Halal untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemberdayaan Zakat Infak, Shadaqoh, Wakaf, dan Jaminan Produk Halal dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft URK Pemberdayaan Zakat Infak, Shadaqoh, Wakaf dan Jaminan Produk Halal dalam penyusunan Draft URK Pemberdayaan Umat Beragama dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Pemberdayaan Umat Beragama,

Nur Fajriah, S.Ag

Kepala Subbidang
Pemberdayaan Zakat Infak, Shadaqoh, Wakaf,
dan Jaminan Produk Halal,

Abu Nasir, S.Ag, M.Pd.I

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Cecep Khairul Anwar, S.Ag, M.Ag.
Jabatan : Kepala Bidang Kerukunan Umat Beragama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Aris Darmansyah Edisaputra, M.Eng
Jabatan : Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Pemberdayaan dan Kerukunan	Kerukunan Umat Beragama,
Umat Beragama,	
Ir. Aris Darmansyah Edisaputra, M.Eng	**H. Cecep Khairul Anwar, S.Ag, M.Ag.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kerukunan Umat Beragama untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kerukunan Umat Beragama dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar 1. Draft URK Kerukunan Umat Beragama dalam rangka Pengembangan Kelembagaan Kerukunan Umat Beragama 2. Draft URK Kerukunan Umat Beragama dalam rangka Penguatan Kelembagaan Kerukunan Umat Beragama	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kerukunan Umat Beragama untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kerukunan Umat Beragama dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Draft URK Kerukunan Umat Beragama dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat	1

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Pemberdayaan dan Kerukunan
Umat Beragama,

Ir. Aris Darmansyah Edisaputra, M.Eng

Kepala Bidang
Kerukunan Umat Beragama,

H. Cecep Khairul Anwar, S.Ag, M.Ag.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Supalah, SE
Jabatan : Kepala Subbidang Penanganan Isu Kerukunan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Cecep Khairul Anwar, S.Ag, M.Ag.
Jabatan : Kepala Bidang Kerukunan Umat Beragama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Kerukunan Umat Beragama,	Penanganan Isu Kerukunan,
H. Cecep Khairul Anwar, S.Ag, M.Ag.	**Dewi Supalah, SE**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanganan Isu Kerukunan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Penanganan Isu Kerukunan dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar 1. Bahan Draft URK Penanganan Isu Kerukunan dalam penyusunan Draft URK Kerukunan Umat Beragama dalam rangka Pengembangan Kelembagaan Kerukunan Umat Beragama 2. Bahan Draft URK Penanganan Isu Kerukunan dalam penyusunan Draft URK Kerukunan Umat Beragama dalam rangka Penguatan Kelembagaan Kerukunan Umat Beragama	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanganan Isu Kerukunan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Penanganan Isu Kerukunan dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft URK Penanganan Isu Kerukunan dalam penyusunan Draft URK Kerukunan Umat Beragama dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Kerukunan Umat Beragama,

H. Cecep Khairul Anwar, S.Ag, M.Ag.

Kepala Subbidang
Penanganan Isu Kerukunan,

Dewi Supalah, SE

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Sahlan, MSI
Jabatan : Asisten Deputi Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:
Deputi Bidang Koordinasi
Pendidikan dan Agama,

Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A

Pihak Pertama:
Asisten Deputi
Pembinaan Umat Beragama,
Pendidikan Agama dan Keagamaan,

Drs. H. Sahlan, MSI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan (URK) di bidang Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan dalam mendukung target IPM di bidang Pendidikan URK Peningkatan Kualitas Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan	1
	Jumlah URK di bidang Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan dalam mendukung indikator pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar URK Mendukung Efektifitas Bantuan Bagi Anak Usia Sekolah dan Perluasan Akses Pendidikan Agama dan Keagamaan	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan dalam mendukung indikator pemberdayaan URK Pembinaan Umat Beragama	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,07 (Skala 6)

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kebijakan Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan	2.350.000.000,-

Jakarta, Maret 2018

Deputi Bidang Koordinasi
Pendidikan dan Agama,

Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A

Asisten Deputi
Pembinaan Umat Beragama,
Pendidikan Agama dan Keagamaan,

Drs. H. Sahlan, MSI

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendriyanto, SE
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Umat Beragama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. Sahlan, MSI
Jabatan : Asisten Deputi Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Pembinaan Umat Beragama,	Pembinaan Umat Beragama,
Pendidikan Agama dan Keagamaan,	
Drs. H. Sahlan, MSI	**Hendriyanto, SE**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pembinaan Umat Beragama untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pembinaan Umat Beragama dalam mendukung target IPM di Bidang Pendidikan Draft URK Pembinaan Umat Beragama dalam rangka Peningkatan Kualitas Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan	1
	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pembinaan Umat Beragama dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Pembinaan Umat Beragama dalam rangka Mendukung Efektifitas Bantuan Bagi Anak Usia Sekolah dan Perluasan Akses Pendidikan Agama dan Keagamaan	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pembinaan Umat Beragama untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pembinaan Umat Beragama dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Draft URK Pembinaan Umat Beragama dalam rangka Pembinaan Umat Beragama	1

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Pembinaan Umat Beragama,
Pendidikan Agama dan Keagamaan,

Drs. H. Sahlan, MSI

Kepala Bidang
Pembinaan Umat Beragama,

Hendriyanto, SE

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ina Nurnina, S.E.
Jabatan : Kepala Subbidang Pelayanan dan Penghayatan Agama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hendriyanto, SE
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Umat Beragama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pembinaan Umat Beragama,	Pelayanan dan Penghayatan Agama,
Hendriyanto, SE	**Ina Nurnina, S.E.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pelayanan dan Penghayatan Agama untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pelayanan dan Penghayatan Agama dalam mendukung target IPM di Bidang Pendidikan Bahan Draft Pelayanan dan Penghayatan Agama dalam penyusunan Draft URK Pembinaan Umat Beragama dalam rangka Peningkatan Kualitas Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan	1
	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pelayanan dan Penghayatan Agama dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft Pelayanan dan Penghayatan Agama dalam penyusunan Draft URK Pembinaan Umat Beragama dalam rangka Mendukung Efektifitas Bantuan Bagi Anak Usia Sekolah dan Perluasan Akses Pendidikan Agama dan Keagamaan	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pelayanan dan Penghayatan Agama untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pelayanan dan Penghayatan Agama dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft Pelayanan dan Penghayatan Agama dalam penyusunan Draft URK Pembinaan Umat Beragama dalam rangka Pembinaan Umat Beragama	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Pembinaan Umat Beragama,

Hendriyanto, SE

Kepala Subbidang
Pelayanan dan Penghayatan Agama,

Ina Nurnina, S.E.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Tabaruddin, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. Sahlan, MSI
Jabatan : Asisten Deputi Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Pembinaan Umat Beragama,	Pendidikan Agama dan
Pendidikan Agama dan Keagamaan,	Pendidikan Keagamaan,
Drs. H. Sahlan, MSI	**Drs. H. Tabaruddin, M.Pd**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dalam mendukung target IPM di Bidang Pendidikan Draft URK Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dalam rangka Peningkatan Kualitas Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan	1
	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dalam rangka Mendukung Efektifitas Bantuan Bagi Anak Usia Sekolah dan Perluasan Akses Pendidikan Agama dan Keagamaan	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Draft URK Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dalam rangka Pembinaan Umat Beragama	1

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Pembinaan Umat Beragama,
Pendidikan Agama dan Keagamaan,

Drs. H. Sahlan, MSI

Kepala Bidang
Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan,

Drs. H. Tabaruddin, M.Pd

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aziz Syafiuddin, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Subbidang Pendidikan Agama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. Tabaruddin, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pendidikan Agama dan	Pendidikan Agama,
Pendidikan Keagamaan,	
Drs. H. Tabaruddin, M.Pd	**Aziz Syafiuddin, S.Sos, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan Agama untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pendidikan Agama dalam mendukung target IPM di Bidang Pendidikan Bahan Draft Pendidikan Agama dalam penyusunan Draft URK Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dalam rangka Peningkatan Kualitas Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan	1
	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pendidikan Agama dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft Pendidikan Agama dalam penyusunan Draft URK Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dalam rangka Mendukung Efektifitas Bantuan Bagi Anak Usia Sekolah dan Perluasan Akses Pendidikan Agama dan Keagamaan	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan Agama untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pendidikan Agama dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft Pendidikan Agama dalam penyusunan Draft URK Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dalam rangka Pembinaan Umat Beragama	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan,

Drs. H. Tabaruddin, M.Pd

Kepala Subbidang
Pendidikan Agama,

Aziz Syafiuddin, S.Sos, M.Si

DEPUTI 5

Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Nyoman Shuida
Jabatan	:	Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Puan Maharani
Jabatan	:	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Menteri Koordinator	Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Bidang Pembangunan Manusia dan	Kebudayaan,
Kebudayaan,	
Puan Maharani	**Nyoman Shuida**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEBUDAYAAN

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kebudayaan dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) mendukung Kemantapan Pelayanan Dasar dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar di bidang Kebudayaan	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kebudayaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kebudayaan dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
	Jumlah RK mendukung Kemantapan Pemberdayaan di bidang Kebudayaan	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,05 (Skala 6)
	Jumlah RK mendukung Kemantapan Gotong Royong di bidang Kebudayaan	2
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK	Nilai SAKIP	73,51

Program	Anggaran (Rp)
Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	90.423.000.000,-

Jakarta, Maret 2018

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan,

Puan Maharani

Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Kebudayaan,

Nyoman Shuida

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Redemtus Alfredo Sani Fenat
Jabatan : Asisten Deputi Kepemudaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nyoman Shuida
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan,	Asisten Deputi Kepemudaan,
Nyoman Shuida	**Redemtus Alfredo Sani Fenat**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Kepemudaan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepemudaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepemudaan dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang kepemudaan dalam mendukung indikator pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar URK Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Sosial, Politik, Ekonomi, Budaya dan Agama	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepemudaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepemudaan dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang kepemudaan dalam mendukung indikator pemberdayaan 1. URK Kewirausahaan Pemuda 2. URK Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pemuda	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepemudaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepemudaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,05 (Skala 6)
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jaringan Wirausaha Sosial Nusantara (JAWARA)	1
Dokumen Program dan Administratif Kegiatan di Bidang Kebudayaan	Jumlah dokumen Program dan Administratif Kegiatan di Bidang Kebudayaan	2

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kebijakan Kepemudaan	5.900.000.000,-

Jakarta, Maret 2018

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan,

Nyoman Shuida

Asisten Deputi Kepemudaan,

Redemtus Alfredo Sani Fenat

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amirullah, S.IP., M.A.P.
Jabatan : Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Redemtus Alfredo Sani Fenat, MAB.
Jabatan : Asisten Deputi Kepemudaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi Kepemudaan,	Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,
Ir. Redemtus Alfredo Sani Fenat, MAB.	**Amirullah, S.IP., M.A.P.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Kepemudaan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Draf Dokumen Penguatan Kegiatan dan Administrasi Tata Kelola di Bidang Kebudayaan	Jumlah Draf Dokumen Penguatan Kegiatan dan Administrasi Tata Kelola di Bidang Kebudayaan	2

Asisten Deputi
Kepemudaan,

Ir. Redemtus Alfredo Sani Fenat, MAB

Jakarta, Maret 2018
Kepala Bidang
Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,

Amirullah, S.IP., M.A.P.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Rahayu, S.E.
Jabatan : Kepala Subbidang Tata Kelola

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Amirullah, S.IP., M.A.P.
Jabatan : Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,	Tata Kelola,
Amirullah, S.IP., M.A.P.	**Budi Rahayu, S.E.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Kepemudaan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Draf Dokumen Administratif Tata Kelola di Bidang Kebudayaan	Jumlah Bahan Draf Dokumen Administratif Tata Kelola di Bidang Kebudayaan	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,

Amirullah, S.IP., M.A.P.

Kepala Subbidang
Tata Kelola,

Budi Rahayu, S.E.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yupi Hendriansah, S.Kom, M.M.
Jabatan : Kepala Subbidang Penguatan Kegiatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Amirullah, S.IP., M.A.P.
Jabatan : Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,	Penguatan Kegiatan,
Amirullah, S.IP., M.A.P.	**Yupi Hendriansah, S.Kom, M.M.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Kepemudaan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Draf Dokumen Penguatan Kegiatan di Bidang Kebudayaan	Jumlah Bahan Draf Dokumen Penguatan Kegiatan di Bidang Kebudayaan	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,

Amirullah, S.IP., M.A.P.

Kepala Subbidang
Penguatan Kegiatan,

Yupi Hendriansah, S.Kom, M.M.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Dwi Harjanto Muhamad
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Redemtus Alfredo Sani Fenat, MAB
Jabatan : Asisten Deputi Kepemudaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Kepemudaan,	Pemberdayaan Pemuda,
Ir. Redemtus Alfredo Sani, Penat, MAB	**Drs. Dwi Harjanto Muhamad**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Kepemudaan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Pemuda untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Pemberdayaan Pemuda dalam rangka Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Sosial, Politik, Ekonomi, Budaya dan Agama	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Pemuda untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan 1. Draft URK Pemberdayaan Pemuda dalam rangka Kewirausahaan Pemuda 2. Draft URK Pemberdayaan Pemuda dalam rangka Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pemuda	2

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Kepemudaan,

Ir. Redemtus Alfredo Sani Fenat, MAB

Kepala Bidang
Pemberdayaan Pemuda,

Drs. Dwi Harjanto Muhamad

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jaka Siswaya, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Pemuda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Redemtus Alfredo Sani Fenat, MAB
Jabatan : Asisten Deputi Kepemudaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Kepemudaan,	Pengembangan Pemuda,
Ir. Redemtus Alfredo Sani Fenat, MAB	**Jaka Siswaya, S.Sos**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Kepemudaan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Pemuda untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengembangan Pemuda dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Pengembangan Pemuda dalam rangka Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Sosial, Politik, Ekonomi, Budaya dan Agama	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Pemuda untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengembangan Pemuda dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan 1. Draft URK Pengembangan Pemuda dalam rangka Kewirausahaan Pemuda 2. Draft URK Pengembangan Pemuda dalam rangka Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pemuda	2

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Kepemudaan,

Ir. Redemtus Alfredo Sani Fenat, MAB

Kepala Bidang
Pengembangan Pemuda,

Jaka Siswaya, S.Sos

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Subkhan Awaludin, S.Kom
Jabatan : Kepala Subbidang Peningkatan Kreativitas Pemuda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jaka Siswaya, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Pemuda

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pengembangan Pemuda,	Peningkatan Kreativitas Pemuda,
Jaka Siswaya, S.Sos	**Subkhan Awaludin, S.Kom**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Kepemudaan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kreativitas Pemuda untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Peningkatan Kreativitas Pemuda dalam penyusunan Draft URK Pengembangan Pemuda dalam rangka Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Sosial, Politik, Ekonomi, Budaya dan Agama	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kreativitas Pemuda untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan 1. Bahan Draft URK Peningkatan Kreativitas Pemuda dalam penyusunan Draft URK Pengembangan Pemuda dalam rangka Kewirausahaan Pemuda 2. Bahan Draft URK Peningkatan Kreativitas Pemuda dalam penyusunan Draft URK Pengembangan Pemuda dalam rangka Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pemuda	2

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Pengembangan Pemuda,

Jaka Siswaya, S.Sos

Kepala Subbidang
Peningkatan Kreativitas Pemuda,

Subkhan Awaludin, S.Kom

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Redemtus Alfredo Sani Fenat
Jabatan : Plt. Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nyoman Shuida
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan,	Plt. Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya,
Nyoman Shuida	**Redemtus Alfredo Sani Fenat**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Nilai dan Kreativitas Budaya untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Nilai dan Kreativitas Budaya dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Nilai dan Kreativitas Budaya untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Nilai dan Kreativitas Budaya dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Nilai dan Kreativitas Budaya dalam mendukung indikator pemberdayaan 1. URK Peningkatan Nilai - Nilai Kearifan Lokal dan Tradisi Budaya dalam Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Adat 2. URK Peningkatan Kreativitas Budaya	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Nilai dan Kreativitas Budaya yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Nilai dan Kreativitas Budaya yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,05 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Nilai dan Kreativitas Budaya dalam mendukung indikator gotong royong URK Peningkatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Komunitas Budaya	1
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental	1

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kebijakan Nilai dan Kreativitas Budaya	76.775.000.000,-

Jakarta, Maret 2018

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan,

Nyoman Shuida

Plt. Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya,

Redemtus Alfredo Sani Fenat

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Maelan Khasani, SST , M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Industri Budaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Redemtus Alfredo Sani Fenat
Jabatan : Plt. Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Plt. Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya,	Kepala Bidang Industri Budaya,
Redemtus Alfredo Sani Fenat	**Arif Maelan Khasani, SST , M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Industri Budaya untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Industri Budaya dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan 1. Draft URK Industri Budaya dalam rangka Peningkatan Nilai - Nilai Kearifan Lokal dan Tradisi Budaya dalam Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Adat 2. Draft URK Industri Budaya dalam rangka Peningkatan Kreativitas Budaya	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Industri Budaya yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Industri Budaya yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Draft URK Industri Budaya dalam rangka Peningkatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Komunitas Budaya	1
Tersosialisasinya kegiatan Revolusi Mental kepada masyarakat	Jumlah Draf Laporan Pelaksanaan Revolusi Mental yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	3

Jakarta, Maret 2018

Plt. Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya,

Redemtus Alfredo Sani Fenat

Kepala Bidang
Industri Budaya,

Arif Maelan Khasani, SST , M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferdiansyah, S.Kom, M.T
Jabatan : Kepala Subbidang Budaya Kreatif

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arif Maelan Khasani, SST , M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Industri Budaya

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Industri Budaya,	Budaya Kreatif,
Arif Maelan Khasani, SST , M.Si	**Ferdiansyah, S.Kom, M.T**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Budaya Kreatif untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Budaya Kreatif dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan 1. Bahan Draft URK Budaya Kreatif dalam penyusunan Draft URK Industri Budaya dalam rangka Peningkatan Nilai - Nilai Kearifan Lokal dan Tradisi Budaya dalam Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Adat 2. Bahan Draft URK Budaya Kreatif dalam penyusunan Draft URK Industri Budaya dalam rangka Peningkatan Kreativitas Budaya	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Budaya Kreatif yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Budaya Kreatif yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Bahan Draft URK Budaya Kreatif dalam penyusunan Draft URK Industri Budaya dalam rangka Peningkatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Komunitas Budaya	1
Tersosialisasinya kegiatan Revolusi Mental kepada masyarakat	Jumlah Bahan Draf Laporan Pelaksanaan Revolusi Mental yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	3

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Industri Budaya,

Arif Maelan Khasani, SST , M.Si

Kepala Subbidang
Budaya Kreatif,

Ferdiansyah, S.Kom, M.T

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Dewita, S.Sos, MAB
Jabatan : Kepala Bidang Nilai Budaya dan Karakter Bangsa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Redemtus Alfredo Sani Fenat
Jabatan : Plt. Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:
Plt. Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya

Redemtus Alfredo Sani Fenat

Pihak Pertama:
Kepala Bidang
Nilai Budaya dan Karakter Bangsa,

Ayu Dewita, S.Sos, MAB

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Nilai Budaya dan Karakter Bangsa untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Nilai Budaya dan Karakter Bangsa dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan 1. Draft URK Nilai Budaya dan Karakter Bangsa dalam rangka Peningkatan Nilai - Nilai Kearifan Lokal dan Tradisi Budaya dalam Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Adat 2. Draft URK Nilai Budaya dan Karakter Bangsa dalam rangka Peningkatan Kreativitas Budaya	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Nilai Budaya dan Karakter Bangsa yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Nilai Budaya dan Karakter Bangsa yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Draft URK Nilai Budaya dan Karakter Bangsa dalam rangka Peningkatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Komunitas Budaya	1
Tersosialisasinya kegiatan Revolusi Mental kepada masyarakat	Jumlah Draf Laporan Pelaksanaan Revolusi Mental yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	3

Jakarta, Maret 2018
Kepala Bidang
Nilai Budaya dan Karakter Bangsa,

Ayu Dewita, S.Sos, MAB

Plt. Asisten Deputi
Nilai dan Kreativitas Budaya,

Redemtus Alfredo Sani Fenat

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saifullah Asad El Bihar, S.Kom
Jabatan : Kepala Subbidang Pengembangan dan Pembudayaan Karakter Bangsa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ayu Dewita, S.Sos, MAB
Jabatan : Kepala Bidang Nilai Budaya dan Karakter Bangsa

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Nilai Budaya dan Karakter Bangsa,	Pengembangan dan Pembudayaan
	Karakter Bangsa,
Ayu Dewita, S.Sos, MAB	**Saifullah Asad El Bihar, S.Kom**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan dan Pembudayaan Karakter Bangsa untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengembangan dan Pembudayaan Karakter Bangsa dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan 1. Bahan Draft URK Pengembangan dan Pembudayaan Karakter Bangsa dalam penyusunan Draft URK Nilai Budaya dan Karakter Bangsa dalam rangka Peningkatan Nilai - Nilai Kearifan Lokal dan Tradisi Budaya dalam Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Adat 2. Pengembangan dan Pembudayaan Karakter Bangsa dalam penyusunan Draft URK Nilai Budaya dan Karakter Bangsa dalam rangka Peningkatan Kreativitas Budaya	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan dan Pembudayaan Karakter Bangsa yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengembangan dan Pembudayaan Karakter Bangsa yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Bahan Draft URK Pengembangan dan Pembudayaan Karakter Bangsa dalam penyusunan Draft URK Nilai Budaya dan Karakter Bangsa dalam rangka Peningkatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Komunitas Budaya	1
Tersosialisasinya kegiatan Revolusi Mental kepada masyarakat	Jumlah Bahan Draf Laporan Pelaksanaan Revolusi Mental yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	3

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Nilai Budaya dan Karakter Bangsa,

Ayu Dewita, S.Sos, MAB

Kepala Subbidang
Pengembangan dan Pembudayaan
Karakter Bangsa,

Saifullah Asad El Bihar, S.Kom

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pamuji Lestari
Jabatan : Asisten Deputi Warisan Budaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nyoman Shuida
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan,	Asisten Deputi Warisan Budaya,
Nyoman Shuida	**Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Warisan Budaya
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Warisan Budaya untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Warisan Budaya dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Warisan Budaya untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Warisan Budaya dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan (URK) di bidang Warisan Budaya dalam mendukung indikator pemberdayaan 1. URK Pengelolaan dan pelestarian Rumah Budaya di Luar Negeri 2. URK Pengelolaan dan Pelestarian Museum dan Pusat Kesenian	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Warisan Budaya yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Warisan Budaya yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,05 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Warisan Budaya dalam mendukung indikator gotong royong URK Peningkatan Promosi Budaya Antar Provinsi dan Promosi Budaya Indonesia	1
	Jumlah Dokumen laporan Pelaksanaan Pekan Produk Budaya Indonesia	1

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kebijakan Warisan Budaya	4.200.000.000,-

Jakarta, Maret 2018
Asisten Deputi
Warisan Budaya,

Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc

Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Kebudayaan,

Nyoman Shuida

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Dohardo Pakpahan, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Sejarah dan Warisan Dunia

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc
Jabatan : Asisten Deputi Warisan Budaya

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Warisan Budaya,	Sejarah dan Warisan Dunia,
Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc	**Ir. Dohardo Pakpahan, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Warisan Budaya
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Sejarah dan Warisan Dunia untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draft Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Sejarah dan Warisan Dunia dalam mendukung 224indikator kemantapan pemberdayaan 1. Draft URK Sejarah dan Warisan Dunia dalam rangka Pengelolaan dan pelestarian Rumah Budaya di Luar Negeri 2. Draft URK Sejarah dan Warisan Dunia dalam rangka Pengelolaan dan Pelestarian Museum dan Pusat Kesenian	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Sejarah dan Warisan Dunia yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Draft Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Sejarah dan Warisan Dunia yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Draft URK Sejarah dan Warisan Dunia dalam rangka Peningkatan Promosi Budaya Antar Provinsi dan Promosi Budaya Indonesia	1

Asisten Deputi
Warisan Budaya,

Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc

Jakarta, Maret 2018
Kepala Bidang
Sejarah dan Warisan Dunia,

Ir. Dohardo Pakpahan, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hadri Pasaribu, SH
Jabatan : Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc
Jabatan : Asisten Deputi Warisan Budaya

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Warisan Budaya,	Cagar Budaya dan Permuseuman,
Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc	**Hadri Pasaribu, SH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Warisan Budaya
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Cagar Budaya dan Permuseuman untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draft Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Cagar Budaya dan Permuseuman dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan 1. Draft URK Cagar Budaya dan Permuseuman dalam rangka Pengelolaan dan pelestarian Rumah Budaya di Luar Negeri 2. Draft URK Cagar Budaya dan Permuseuman dalam rangka Pengelolaan dan Pelestarian Museum dan Pusat Kesenian	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Cagar Budaya dan Permuseuman yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Draft Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Cagar Budaya dan Permuseuman yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Draft URK Cagar Budaya dan Permuseuman dalam rangka Peningkatan Promosi Budaya Antar Provinsi dan Promosi Budaya Indonesia	1

Jakarta, Maret 2018
Kepala Bidang
Cagar Budaya dan Permuseuman,

Hadri Pasaribu, SH

Asisten Deputi
Warisan Budaya,

Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hikmah Rafika Mufti, S.Hum
Jabatan : Kepala Subbidang Sejarah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. Dohardo Pakpahan, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Sejarah dan Warisan Dunia

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Sejarah dan Warisan Dunia,	Sejarah,
Ir. Dohardo Pakpahan, M.Si	**Hikmah Rafika Mufti, S.Hum**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Warisan Budaya
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Sejarah untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draft Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Sejarah dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan 1. Bahan Draft URK Sejarah dalam penyusunan Draft URK Sejarah dan Warisan Dunia dalam rangka Pengelolaan dan pelestarian Rumah Budaya di Luar Negeri 2. Bahan Draft URK Sejarah dalam penyusunan Draft URK Sejarah dan Warisan Dunia dalam rangka Pengelolaan dan Pelestarian Museum dan Pusat Kesenian	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Sejarah yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draft Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Sejarah yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Bahan Draft URK Sejarah dalam penyusunan Draft URK Sejarah dan Warisan Dunia dalam rangka Peningkatan Promosi Budaya Antar Provinsi dan Promosi Budaya Indonesia	1

Jakarta, Maret 2018
Kepala Subbidang
Sejarah,

Hikmah Rafika Mufti, S.Hum

Kepala Bidang
Sejarah dan Warisan Dunia,

Ir. Dohardo Pakpahan, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gatot Hendrarto
Jabatan : Asisten Deputi Keolahragaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nyoman Shuida
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan,	Asisten Deputi Keolahragaan,
Nyoman Shuida	**Gatot Hendrarto**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Keolahragaan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Keolahragaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Keolahragaan dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan (URK) di bidang Keolahragaan dalam mendukung indikator pelayanan dasar dan kebutuhan dasar URK Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Keolahragaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Keolahragaan dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Keolahragaan dalam mendukung indikator pemberdayaan URK Peningkatan Prestasi Olahraga	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Keolahragaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Keolahragaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,05 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Keolahragaan dalam mendukung indikator gotong royong URK Pembudayaan Olahraga	1
Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi Event Olahraga Nasional dan Internasional	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi Event Olahraga Nasional dan Internasional	1

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kebijakan Keolahragaan	3.548.000.000,-

Jakarta, Maret 2018

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan,

Nyoman Shuida

Asisten Deputi Keolahragaan,

Gatot Hendrarto

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suwito, SH
Jabatan : Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Gatot Hendrarto, MSc
Jabatan : Asisten Deputi Keolahragaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Keolahragaan,	Pembudayaan Olahraga,
Ir. Gatot Hendrarto, MSc	**Suwito, SH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Keolahragaan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pembudayaan Olahraga untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pembudayaan Olahraga dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Pembudayaan Olahraga dalam rangka Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pembudayaan Olahraga untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pembudayaan Olahraga dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Draft URK Pembudayaan Olahraga dalam rangka Peningkatan Prestasi Olahraga	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pembudayaan Olahraga yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pembudayaan Olahraga yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Draft URK Pembudayaan Olahraga dalam rangka Pembudayaan Olahraga	1

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Keolahragaan,

Ir. Gatot Hendrarto, MSc

Kepala Bidang
Pembudayaan Olahraga,

Suwito, SH

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lili Isnaini, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kepala Subbidang Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Suwito, SH
Jabatan : Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pembudayaan Olahraga,	Olahraga Pendidikan
	dan Layanan Khusus,
Suwito, SH	**Lili Isnaini, S.Pd, M.Pd**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Keolahragaan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus dalam penyusunan Draft URK Pembudayaan Olahraga dalam rangka Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft URK Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus dalam penyusunan Draft URK Pembudayaan Olahraga dalam rangka Peningkatan Prestasi Olahraga	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Bahan Draft URK Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus dalam penyusunan Draft URK Pembudayaan Olahraga dalam rangka Pembudayaan Olahraga	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Pembudayaan Olahraga,

Suwito, SH

Kepala Subbidang
Olahraga Pendidikan
dan Layanan Khusus,

Lili Isnaini, S.Pd, M.Pd

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Gunawan, SAN, M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Prestasi Olahraga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Gatot Hendrarto, M.Sc.
Jabatan : Asisten Deputi Keolahragaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Keolahragaan,	Prestasi Olahraga,
Ir. Gatot Hendrarto, M.Sc.	**Achmad Gunawan, SAN, M.Si.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Keolahragaan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Prestasi Olahraga untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Prestasi Olahraga dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Prestasi Olahraga dalam rangka Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Prestasi Olahraga untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Prestasi Olahraga dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Draft URK Prestasi Olahraga dalam rangka Peningkatan Prestasi Olahraga	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Prestasi Olahraga yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Prestasi Olahraga yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Draft URK Prestasi Olahraga dalam rangka Pembudayaan Olahraga	1

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Keolahragaan,

Ir. Gatot Hendrarto, M.Sc

Kepala Bidang
Prestasi Olahraga,

Achmad Gunawan, SAN, M.Si

DEPUTI 6

Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ghafur Akbar Dharmaputra, SE, M.Com
Jabatan	:	Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Puan Maharani
Jabatan	:	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Menteri Koordinator	Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Bidang Pembangunan Manusia dan	Perlindungan Perempuan dan Anak,
Kebudayaan,	
Puan Maharani	**Ghafur Akbar Dharmaputra, SE, M.Com**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan PerempuandanAnak
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) mendukung Kemantapan Pelayanan Dasar dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
	Jumlah RK mendukung Kemantapan Pemberdayaan di bidang Perlindungan Perempuandan Anak	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	IndekskepuasanPemangkuKepentinganatasefektivitasdanefisiensikoordinasidansinkronisasiperumusan, penetapan,dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,05 (Skala 6)
	Jumlah RK mendukung Kemantapan Gotong Royong di bidang Perlindungan Perempuandan Anak	2
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK	Nilai SAKIP	73,51

Program	Anggaran (Rp)
Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	10.800.000.000,-

Jakarta, Mei 2018

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan,

Puan Maharani

Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Perlindungan Perempuan dan Anak,

Ghafur Akbar Dharmaputra, SE, M.Com

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Wahyuni Tri Indarty, M.Si
Jabatan : Asisten Deputi KetahanandanKesejahteraanKeluarga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ghafur Akbar Dharmaputra, SE, M.Com
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi PerlindunganPerempuandanAnak

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

PihakKedua:	PihakPertama:
Deputi Bidang Koordinasi	Asisten Deputi
Perlindungan Perempuan dan Anak,	KetahanandanKesejahteraanKeluarga,
Ghafur Akbar Dharmaputra, SE, M.Com	**Ir. Wahyuni Tri Indarty, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Ketahanandan Kesejahteraan Keluarga
TahunAnggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargauntuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ketahanandan Kesejahteraan Keluarga dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan (URK) di bidang Ketahanandan Kesejahteraan Keluarga dalam mendukung indikator pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar URK Penanganan Kelompok Marginal (Anak Jalanan dan Anak Terlantar)	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga dalam mendukung indikator pemberdayaan 1. URK Revitalisasi Fungsi-Fungsi Keluarga Melalui Optimalisasi Kegiatan Bimbingan Pra Nikah dan Sertifikasi Bagi Calon Pengantin 2. URK Reaktifisasi Pencegahandan Penanganan Pornografi dan LGBT	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian kebijakan pelaksanaan kebijakan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ketahanandan Kesejahteraan Keluargayang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,05 (Skala 6)
	Jumlah laporan pelaksanaan pembentukan keluarga berkarakter	1
Dokumen Program dan Administratif Kegiatan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah dokumen Program dan Administratif Kegiatandi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	2

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kebijakan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5.075.000.000,-

Jakarta, Mei 2018

Deputi Bidang Koordinasi
Perlindungan Perempuan dan Anak,

Ghafur Akbar Dharmaputra, SE, M.Com

Asisten Deputi
KetahanandanKesejahteraanKeluarga,

Ir. Wahyuni Tri Indarty, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yongky Suryanto S. S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Wahyuni Tri Indarty, M.Si.
Jabatan : Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,	Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,
Ir. Wahyuni Tri Indarty, M.Si.	**Yongky Suryanto S. Sos, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Draf Dokumen Penguatan Kegiatan dan Administrasi Tata Kelola di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Draf Dokumen Penguatan Kegiatan dan Administrasi Tata Kelola di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	2

Jakarta, Mei 2018

Asisten Deputi
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,

Ir. Wahyuni Tri Indarty, M.Si.

Kepala Bidang
Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,

Yongky Suryanto. S. S.Sos. M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Citra Nirmala Utami, S.Psi
Jabatan : Kepala Subbidang Penguatan Kegiatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yongky Suryanto S. Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,	Penguatan Kegiatan,
Yongky Suryanto S. Sos, M.Si	**Citra Nirmala Utami, S.Psi**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Draf Dokumen Penguatan Kegiatan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Bahan Draf Dokumen Penguatan Kegiatan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	1

Jakarta, Mei 2018

Kepala Bidang
Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,

Yongky Suryanto S. Sos, M.Si

Kepala Subbidang
Penguatan Kegiatan,

Citra Nirmala Utami, S.Psi

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Iman Gunadi, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Wahyuni Tri Indarty, M.Si.
Jabatan : Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga,
Ir. Wahyuni Tri Indarty, M.Si.	**Ir. Iman Gunadi, M.Pd**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka Penanganan Kelompok Marginal (Anak Jalanan dan Anak Terlantar)	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan 1. Draft URK Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka Revitalisasi Fungsi-Fungsi Keluarga Melalui Optimalisasi Kegiatan Bimbingan Pra Nikah dan Sertifikasi Bagi Calon Pengantin 2. Draft URK Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka Reaktifisasi Pencegahan dan Penanganan Pornografi dan LGBT	2

Jakarta, Mei 2018

Asisten Deputi
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,

Ir. Wahyuni Tri Indarty, M.Si.

Kepala Bidang
Peningkatan Kesejahteraan Keluarga,

Ir. Iman Gunadi, M.Pd.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Prasetya Adi Nugroho, SIP, MA
Jabatan : Kepala Subbidang Peningkatan Ketahanan Fisik Keluarga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Endang Sri Rahayu
Jabatan : Kepala Bidang Peningkatan Ketahanan Keluarga

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Peningkatan Ketahanan Keluarga,	Peningkatan Ketahanan Fisik Keluarga,
Dra. Endang Sri Rahayu	**Indra Prasetya Adi Nugroho, SIP, MA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Ketahanan Fisik Keluarga untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Peningkatan Ketahanan Fisik Keluarga dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Peningkatan Ketahanan Fisik Keluarga dalam penyusunan Draft URK Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam rangka Penanganan Kelompok Marginal (Anak Jalanan dan Anak Terlantar)	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Ketahanan Fisik Keluarga untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Peningkatan Ketahanan Fisik Keluarga dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan 1. Bahan Draft URK Peningkatan Ketahanan Fisik Keluarga dalam penyusunan Draft URK Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam rangka Revitalisasi Fungsi-Fungsi Keluarga Melalui Optimalisasi Kegiatan Bimbingan Pra Nikah dan Sertifikasi Bagi Calon Pengantin 2. Bahan Draft URK Peningkatan Ketahanan Fisik Keluarga dalam penyusunan Draft URK Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam rangka Reaktifisasi Pencegahan dan Penanganan Pornografi dan LGBT	2

Jakarta, Mei 2018

Kepala Bidang
Peningkatan Ketahanan Keluarga,

Dra. Endang Sri Rahayu

Kepala Subbidang
Peningkatan Ketahanan Fisik Keluarga,

Indra Prasetya Adi Nugroho, SIP, MA

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zeinnuri Adlan Rusmin, SE
Jabatan : Kepala Subbidang Pemberdayaan Keluarga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Iman Gunadi, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Peningkatan Kesejahteraan Keluarga,	Pemberdayaan Keluarga,
Ir. Iman Gunadi, M.Pd	**Zeinnuri Adlan Rusmin, SE**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Keluarga untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemberdayaan Keluarga dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Pemberdayaan Keluarga dalam penyusunan Draft URK Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka Penanganan Kelompok Marginal (Anak Jalanan dan Anak Terlantar)	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Keluarga untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemberdayaan Keluarga dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan 1. Bahan Draft URK Pemberdayaan Keluarga dalam penyusunan Draft URK Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka Revitalisasi Fungsi-Fungsi Keluarga Melalui Optimalisasi Kegiatan Bimbingan Pra Nikah dan Sertifikasi Bagi Calon Pengantin 2. Bahan Draft URK Pemberdayaan Keluarga dalam penyusunan Draft URK Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka Reaktifisasi Pencegahan dan Penanganan Pornografi dan LGBT	2

Jakarta, Mei 2018

Kepala Bidang
Peningkatan Kesejahteraan Keluarga,

Ir. Iman Gunadi, M.Pd

Kepala Subbidang
Pemberdayaan Keluarga,

Zeinnuri Adlan Rusmin, SE

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Endang Sri Rahayu
Jabatan : Kepala Bidang Peningkatan Ketahanan Keluarga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Wahyuni Tri Indarty, M.Si.
Jabatan : Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,	Peningkatan Ketahanan Keluarga,
Ir. Wahyuni Tri Indarty, M.Si.	**Dra. Endang Sri Rahayu**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam rangka Penanganan Kelompok Marginal (Anak Jalanan dan Anak Terlantar)	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam mendukung kemantapan pemberdayaan 1. Draft URK Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam rangka Revitalisasi Fungsi-Fungsi Keluarga Melalui Optimalisasi Kegiatan Bimbingan Pra Nikah dan Sertifikasi Bagi Calon Pengantin 2. Draft URK Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam rangka Reaktifisasi Pencegahan dan Penanganan Pornografi dan LGBT	2

Jakarta, Mei 2018

Asisten Deputi
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,

Ir. Wahyuni Tri Indarty, M.Si.

Kepala Bidang
Peningkatan Ketahanan Keluarga ,

Dra. Endang Sri Rahayu

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Wagiran, M.M
Jabatan : Asisten Deputi PemberdayaanPerempuan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ghafur Akbar Dharmaputra, SE, M.Com
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi PerlindunganPerempuandanAnak

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

PihakKedua:	PihakPertama:
Deputi Bidang Koordinasi	Asisten Deputi
Perlindungan Perempuan dan Anak,	PemberdayaanPerempuan,
Ghafur Akbar Dharmaputra, SE, M.Com	**Drs. Wagiran, M.M**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan
TahunAnggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Perempuan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaankebijakanPemberdayaanPerempuan dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah Usulan RekomendasiKebijakan (URK) di bidangPemberdayaanPerempuan dalam mendukung indicator pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar URK Peningkatan Kualitas Pelayanan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Perempuan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan PemberdayaanPerempuan dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dalam mendukung indikator pemberdayaan 1. URK Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan 2. URK Peningkatan Peran Perempuandalam Pembangunan	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Perempuanyang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Perempuan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,05 (Skala 6)

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan	1.775.000.000,-

Jakarta, Mei 2018

Deputi Bidang Koordinasi
Perlindungan Perempuan dan Anak,

Ghafur Akbar Dharmaputra, SE, M.Com

Asisten Deputi
PemberdayaanPerempuan,

Drs. Wagiran, M.M

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endrianti Dewi Poerwitasari, SE
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Wagiran, MM
Jabatan : Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

PihakKedua:	PihakPertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
PemberdayaanPerempuan,	Pemberdayaan Ekonomi,
Drs. Wagiran, MM	**Endrianti Dewi Poerwitasari, SE**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan
TahunAnggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, danpelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Ekonomi untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhandasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemberdayaan Ekonomi dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Pemberdayaan Ekonomi dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	1
Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Ekonomi untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Ekonomi dalam mendukung indicator kemantapan pemberdayaan 1. Draft URK Pemberdayaan Ekonomi dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan 2. Draft URK Pemberdayaan Ekonomi dalam rangka Peningkatan Peran Perempuandalam Pembangunan	2

Jakarta, Mei 2018

Asisten Deputi
PemberdayaanPerempuan,

Drs. Wagiran, MM

Kepala Bidang
Pemberdayaan Ekonomi,

Endrianti Dewi Poerwitasari, SE

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalia Tri Saraswati, S. Psi
Jabatan : Kepala SubbidangPengembangan Permodalan Dan Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Endrianti Dewi Poerwitasari, SE
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

PihakKedua:
Kepala Bidang
PemberdayaanEkonomi,

Endrianti Dewi Poerwitasari, SE

PihakPertama:
Kepala Subbidang
Pengembangan Permodalan
danUsaha,

Amalia Tri Saraswati, S. Psi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan
TahunAnggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Permodalan dan Usaha untuk mendukung pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengembangan Permodalan dan Usaha dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Pengembangan Permodalan dan Usaha dalam penyusunan Draft URK Pemberdayaan Ekonomi dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	1
Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Permodalan dan Usaha untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengembangan Permodalan dan Usaha dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan 1. Bahan Draft URK Pengembangan Permodalan dan Usaha dalam penyusunan Draft URK Pemberdayaan Ekonomi dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan 2. Bahan Draft URK Pengembangan Permodalan dan Usaha dalam penyusunan Draft URK Pemberdayaan Ekonomi dalam rangka Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan	2

Jakarta, Mei 2018

Kepala Bidang
PemberdayaanEkonomi,

Endrianti Dewi Poerwitasari, SE

Kepala Subbidang
Pengembangan Permodalan
danUsaha,

Amalia Tri Saraswati, S. Psi

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Purwatiningsih, MM
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Wagiran, MM
Jabatan : Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

PihakKedua:	PihakPertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
PemberdayaanPerempuan,	Pemberdayaan Sosial Budaya,
Drs. Wagiran, MM	**Dra. Purwatiningsih, MM**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan
TahunAnggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Sosial Budaya untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial Budaya dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Pemberdayaan Sosial Budaya dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	1
Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Sosial Budaya untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan 1. Draft URK Pemberdayaan Sosial Budaya dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan 2. Draft URK Pemberdayaan Sosial Budaya dalam rangka Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan	2

Jakarta, Mei 2018

Asisten Deputi
PemberdayaanPerempuan,

Drs. Wagiran, MM

Kepala Bidang
Pemberdayaan Sosial Budaya,

Dra. Purwatiningsih, MM

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rr. Puji Astuti, S.Sos
Jabatan : Kepala Subbidang Pemberdayaan Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Purwatiningsih, MM
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

PihakKedua:	PihakPertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pemberdayaan Sosial Budaya,	Pemberdayaan Sosial,
Dra. Purwatiningsih, MM	**Rr. Puji Astuti, S.Sos**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan
TahunAnggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Sosial untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan DrafUsulan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar. Bahan Draft URK Pemberdayaan Sosial dalam penyusunan Draft URK Pemberdayaan Sosial Budaya dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	1
Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Sosial untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan. 1. Bahan Draft URK Pemberdayaan Sosial dalam penyusunan Draft URK Pemberdayaan Sosial Budaya dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan 2. Bahan Draft URK Pemberdayaan Sosial dalam penyusunan Draft URK Pemberdayaan Sosial Budaya dalam rangka Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan	2

Jakarta, Mei 2018

Kepala Bidang
Pemberdayaan Sosial Budaya,

Dra. Purwatiningsih, MM

Kepala Subbidang
Pemberdayaan Sosial,

Rr. Puji Astuti, S.Sos

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Wagiran, M.M
Jabatan : Plt. Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ghafur Akbar Dharmaputra, SE, M.Com
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi PerlindunganPerempuandanAnak

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

PihakKedua:	PihakPertama:
Deputi Bidang Koordinasi	Plt. Asisten Deputi
Perlindungan Perempuan dan Anak,	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan,
Ghafur Akbar Dharmaputra, SE, M.Com	**Drs. Wagiran, M.M**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan
TahunAnggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakanPemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuanuntuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaankebijakanPemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan (URK) di bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dalam mendukung indikato rpelayanan dasar dan kebutuhan dasar URK Penguatan Sistem Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakanPemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dalam mendukung indikator pemberdayaan 1. URK Peningkatan Peran Perempuan dalam Politik dan Hukum 2. URK Peningkatan Pengarus utamaan Gender	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakanPemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuanyang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuanyang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,05 (Skala 6)

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan	1.950.000.000,-

Jakarta, Mei 2018
Plt. Asisten Deputi
Pemenuhan Hak dan Perlindungan
Perempuan,

Drs. Wagiran, M.M

Deputi Bidang Koordinasi
Perlindungan Perempuan dan Anak,

Ghafur Akbar Dharmaputra, SE, M.Com

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zuraini, S.Si, M.Ec
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Wagiran, M.M
Jabatan : Plt. Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Plt. Asisten Deputi	Kepala Bidang
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan,	Perlindungan Perempuan,
Drs. Wagiran, MM	**Zuraini, S.Si, M.Ec**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Perlindungan Perempuan dalam rangka Penguatan Sistem Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan 1. Draft URK Perlindungan Perempuan dalam rangka Peningkatan Peran Perempuan dalam Politik dan Hukum 2. Draft URK Perlindungan Perempuan dalam rangka Peningkatan Pengarusutamaan Gender	2

Jakarta, Mei 2018

Plt. Asisten Deputi
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan,

Drs. Wagiran, MM

Kepala Bidang
Perlindungan Perempuan,

Zuraini, S.Si, M.Ec

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Rohdiyati, S.Psi
Jabatan : Kepala Subbidang Pemenuhan Hak Sosial dan Budaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Wagiran, MM
Jabatan : Plt. Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Plt. Asisten Deputi	Kepala Subbidang
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan,	Pemenuhan Hak Sosial dan Budaya,
Drs. Wagiran, MM	**Suci Rohdiyati, S.Psi**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Sosial dan Budaya untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemenuhan Hak Sosial dan Budaya dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Pemenuhan Hak Sosial dan Budaya dalam penyusunan Draft URK Pemenuhan Hak Perempuan dalam rangka Penguatan Sistem Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Sosial dan Budaya untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemenuhan Hak Sosial dan Budaya dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan 1. Bahan Draft URK Pemenuhan Hak Sosial dan Budaya dalam penyusunan Draft URK Pemenuhan Hak Perempuan dalam rangka Peningkatan Peran Perempuan dalam Politik dan Hukum 2. Bahan Draft URK Pemenuhan Hak Sosial dan Budaya dalam penyusunan Draft URK Pemenuhan Hak Perempuan dalam rangka Peningkatan Pengarusutamaan Gender	2

Jakarta, Mei 2018

Plt. Asisten Deputi
Pemenuhan Hak dan Perlindungan
Perempuan,

Drs. Wagiran, MM

Kepala Subbidang
Pemenuhan Hak Sosial dan Budaya,

Suci Rohdiyati, S.Psi

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marrysa Nurina Derec, S.Pi, M.A.
Jabatan : Kepala Subbidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Zuraini, S.Si, M.Ec
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Perlindungan Perempuan,	Penanganan Masalah Sosial Perempuan,
Zuraini, S.Si, M.Ec	**Marrysa Nurina Derec, S.Pi, M.A.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanganan Masalah Sosial Perempuan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Penanganan Masalah Sosial Perempuan dalam penyusunan Draft URK Perlindungan Perempuan dalam rangka Penguatan Sistem Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanganan Masalah Sosial Perempuan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan 1. Bahan Draft URK Penanganan Masalah Sosial Perempuan dalam penyusunan Draft URK Perlindungan Perempuan dalam rangka Peningkatan Peran Perempuan dalam Politik dan Hukum 2. Bahan Draft URK Penanganan Masalah Sosial Perempuan dalam penyusunan Draft URK Perlindungan Perempuan dalam rangka Peningkatan Pengarusutamaan Gender	2

Jakarta, Mei 2018

Kepala Bidang
Perlindungan Perempuan,

Zuraini, S.Si, M.Ec

Kepala Subbidang
Penanganan Masalah Sosial Perempuan,

Marrysa Nurina Derec, S.Pi, M.A.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Assahinur. S.E., M. Dev.St
Jabatan : Kepala Subbidang Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Zuraini, S.Si, M.Ec
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Perlindungan Perempuan,	Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan,
Zuraini, S.Si, M.Ec	**Assahinur. S.E., M. Dev.St**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam penyusunan Draft URK Perlindungan Perempuan dalam rangka Penguatan Sistem Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan 1. Bahan Draft Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam penyusunan Draft URK Perlindungan Perempuan dalam rangka Peningkatan Peran Perempuan dalam Politik dan Hukum 2. Bahan Draft URK Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam penyusunan Draft URK Perlindungan Perempuan dalam rangka Peningkatan Pengarusutamaan Gender	2

Jakarta, Mei 2018

Kepala Bidang
Perlindungan Perempuan,

Zuraini, S.Si, M.Ec

Kepala Subbidang
Penanganan Kekerasan Terhadap
Perempuan,

Assahinur. S.E., M. Dev.St

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Marwan Syaukani, M.Sc
Jabatan : Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ghafur Akbar Dharmaputra, SE, M.Com
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi PerlindunganPerempuandanAnak

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

PihakKedua:
Deputi Bidang Koordinasi
Perlindungan Perempuan dan Anak,,

Ghafur Akbar Dharmaputra, SE, M.Com

PihakPertama:
Asisten Deputi
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak,

Dr. Ir. Marwan Syaukani, M.Sc

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
TahunAnggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaankebijakanPemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan (URK) di bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dalam mendukung indicator pelayanan dasar dan kebutuhan dasar URK Percepatan Kepemilikan Akte Kelahiran	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakanPemenuhan Hak dan Perlindungan Anak untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan URK Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Berkebutuhan Khusus	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anakyang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anakyang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,05 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dalam mendukung indicator gotong royong URK Penanganan Kekerasan Anak	1

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hakdan Perlindungan Anak	2.000.000.000,-

Jakarta, Mei 2018

Deputi Bidang Koordinasi
Perlindungan Perempuan dan Anak,

Ghafur Akbar Dharmaputra, SE, M.Com

Asisten Deputi Pemenuhan Hak
dan Perlindungan Anak,

Dr. Ir. Marwan Syaukani, M.Sc

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Silvanie Leane Christy Tompodung
Jabatan : Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Marwan Syaukani, M.Sc
Jabatan : Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak,	Pemenuhan Hak Anak,
Dr. Marwan Syaukani, M.Sc	**dr. Silvanie L. Ch. Tompodung**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Anak untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan (URK) di bidang Pemenuhan Hak Anak dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Pemenuhan Hak Anak dalam rangka Percepatan Kepemilikan Akte Kelahiran	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draft URK di bidang pemenuhan hak anak dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Draft URK Pemenuhan Hak Anak dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Berkebutuhan Khusus	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Draft URK di bidang pemenuhan hak anak yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Draft URK Pemenuhan Hak Anak dalam rangka Penanganan Kekerasan Anak	1

Jakarta, Mei 2018

Asisten Deputi
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak,

Dr. Marwan Syaukani, M.Sc

Kepala Bidang
Pemenuhan Hak Anak,

dr. Silvanie L. Ch. Tompodung

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Himelda, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Marwan Syaukani, M.Sc
Jabatan : Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak,	Perlindungan Anak,
Dr. Marwan Syaukani, M.Sc	**Dr. Ir. Himelda, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan (URK) di bidang Perlindungan Anak dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Perlindungan Anak dalam rangka Percepatan Kepemilikan Akte Kelahiran	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draft URK di bidang Perlindungan Anak dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Draft URK Perlindungan Anak dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Berkebutuhan Khusus	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Draft URK di bidang Perlindungan Anak yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Draft URK Perlindungan Anak dalam rangka Penanganan Kekerasan Anak	1

Jakarta, Mei 2018

Asisten Deputi
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak,

Dr. Marwan Syaukani, M.Sc

Kepala Bidang
Perlindungan Anak,

Dr. Ir. Himelda, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miranda Mindamora, SAP
Jabatan : Kepala Subbidang Penanganan Masalah Sosial Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Himelda, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Anak

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Perlindungan Anak,	Penanganan Masalah Sosial Anak,
Dr. Ir. Himelda, M.Si	**Miranda Mindamora, SAP**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanganan Masalah Sosial Anak untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan (URK) di bidang Penanganan Masalah Sosial Anak dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Penanganan Masalah Sosial Anak dalam penyusunan Draft URK Perlindungan Anak dalam rangka Percepatan Kepemilikan Akte Kelahiran	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanganan Masalah Sosial Anak untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draft URK di bidang Penanganan Masalah Sosial Anak dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft URK Penanganan Masalah Sosial Anak dalam penyusunan Draft URK Perlindungan Anak dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Berkebutuhan Khusus	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanganan Masalah Sosial Anak yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draft URK di bidang Penanganan Masalah Sosial Anak yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Bahan Draft URK Penanganan Masalah Sosial Anak dalam penyusunan Draft URK Perlindungan Anak dalam rangka Penanganan Kekerasan Anak	1

Jakarta, Mei 2018

Kepala Bidang
Perlindungan Anak,

Dr. Ir. Himelda, M.Si

Kepala Subbidang
Penanganan Masalah Sosial Anak,

Miranda Mindamora, SAP

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hestiana Endriantari W. SE
Jabatan : Kepala Subbidang Tumbuh Kembang Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Silvanie L. Christy Tompodung
Jabatan : Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pemenuhan Hak Anak,	Tumbuh Kembang Anak,
dr. Silvanie L. Christy Tompodung	**Hestiana Endriantari W. SE**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Tumbuh Kembang Anak ntuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan (URK) di bidang Tumbuh Kembang Anak dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Tumbuh Kembang Anak dalam penyusunan Draft URK Pemenuhan Hak Anak dalam rangka Percepatan Kepemilikan Akte Kelahiran	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Tumbuh Kembang Anak untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf URK di bidang Tumbuh Kembang Anak dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft URK Tumbuh Kembang Anak dalam penyusunan Draft URK Pemenuhan Hak Anak dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Berkebutuhan Khusus	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Tumbuh Kembang Anak yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf URK di bidang Tumbuh Kembang Anak yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Bahan Draft URK Tumbuh Kembang Anak dalam penyusunan Draft URK Pemenuhan Hak Anak dalam rangka Penanganan Kekerasan Anak	1

Jakarta, Mei 2018

Kepala Bidang
Pemenuhan Hak Anak,

dr. Silvanie L. Christy Tompodung

Kepala Subbidang
Tumbuh Kembang Anak,

Hestiana Endriantari W. SE

DEPUTI 7

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Nyoman Shuida
Jabatan	:	Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Puan Maharani
Jabatan	:	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Menteri Koordinator	Deputi Bidang Koordinasi
Bidang Pembangunan Manusia dan	Pemberdayaan Masyarakat,
Kebudayaan,	Desa dan Kawasan,
Puan Maharani	**Nyoman Shuida**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN KAWASAN

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) mendukung Kemantapan Pelayanan Dasar dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
	Jumlah RK mendukung Kemantapan Pemberdayaan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,05 (Skala 6)
	Jumlah RK mendukung Kemantapan Gotong Royong di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan	2
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK	Nilai SAKIP	73,51

Program	Anggaran (Rp)
Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	21.853.600.000,-

Jakarta, Maret 2018

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan,

Puan Maharani

Deputi Bidang Koordinasi
Pemberdayaan Masyarakat,
Desa dan Kawasan,

Nyoman Shuida

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Magdalena
Jabatan : Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nyoman Shuida
Jabatan : Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi	Asisten Deputi
Pemberdayaan Masyarakat,	Pemberdayaan Masyarakat,
Desa dan Kawasan,	
Nyoman Shuida	**Ir. Magdalena, M.M**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan (URK) di bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam mendukung indikator pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar URK Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam mendukung indikator pemberdayaan URK Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,05 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong URK Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal	1
	Jumlah Laporan Kegiatan Pembangunan Inklusif Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	1
Dokumen Program dan Administratif Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan	Jumlah dokumen Program dan Administratif Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan	2

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat	8.128.600.000

Jakarta, Maret 2018

Deputi Bidang Koordinasi
Pemberdayaan Masyarakat,
Desa dan Kawasan,

Nyoman Shuida

Asisten Deputi
Pemberdayaan Masyarakat,

Ir. Magdalena, M.M

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Juni Tediana, S.H., M.A.
Jabatan : Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Magdalena, M.M
Jabatan : Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat,	Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,
Ir. Magdalena, M.M	**Siti Juni Tediana, S.H., M.A.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Draf Dokumen Penguatan Kegiatan dan Administrasi Tata Kelola di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan	Jumlah Draf Dokumen Penguatan Kegiatan dan Administrasi Tata Kelola di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan	2

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Pemberdayaan Masyarakat,

Ir. Magdalena, M.M

Kepala Bidang
Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,

Siti Juni Tediana, S.H., M.A.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novita Sara Kusuma, SH
Jabatan : Kepala Subbidang Tata Kelola

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Siti Juni Tediana, S.H., M.A
Jabatan : Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,	Tata Kelola,
Siti Juni Tediana, S.H., M.A.	**Novita Sara Kusuma, SH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Draf Dokumen Administratif Tata Kelola di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan	Jumlah Bahan Draf Dokumen Administratif Tata Kelola di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,

Siti Juni Tediana, S.H., M.A.

Kepala Subbidang
Tata Kelola,

Novita Sara Kusuma, SH

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Mau Sari, ST
Jabatan : Kepala Subbidang Penguatan Kegiatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Siti Juni Tediana, S.H., M.A
Jabatan : Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,	Penguatan Kegiatan,
Siti Juni Tediana, SH., M.A	**Maria Mau Sari, ST**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Draf Dokumen Penguatan Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan	Jumlah Bahan Draf Dokumen Penguatan Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola,

Siti Juni Tediana, S.H., M.A.

Kepala Subbidang
Penguatan Kegiatan,

Maria Mau Sari, S.T

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haris Djayadi Ak. M.M
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Magdalena, M.M
Jabatan : Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat,	Pengembangan Ekonomi,
Ir. Magdalena, M.M	**Haris Djayadi Ak. M.M**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Ekonomi untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengembangan Ekonomi dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Pengembangan Ekonomi dalam rangka Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Ekonomi untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengembangan Ekonomi dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Draft URK Pengembangan Ekonomi dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Ekonomi yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengembangan Ekonomi yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Draft URK Pengembangan Ekonomi dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal	1

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Pemberdayaan Masyarakat,

Ir. Magdalena, M.M

Kepala Bidang
Pengembangan Ekonomi,

Haris Djayadi AK. M.M

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Sisindra, SE, M.Sc
Jabatan : Kepala Subbidang Permodalan dan Keuangan Mikro

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Haris Djayadi Ak. M.M
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Subbidang
Pemberdayaan Masyarakat,	Permodalan dan Keuangan Mikro,
Haris Djayadi Ak. M.M	**Rizki Sisindra, SE, M.Sc**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Permodalan dan Keuangan Mikro untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Permodalan dan Keuangan Mikro dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Permodalan dan Keuangan Mikro dalam penyusunan Draft URK Pengembangan Ekonomi dalam rangka Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Permodalan dan Keuangan Mikro untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Permodalan dan Keuangan Mikro dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft URK Permodalan dan Keuangan Mikro dalam penyusunan Draft URK Pengembangan Ekonomi dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Permodalan dan Keuangan Mikro yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Permodalan dan Keuangan Mikro dalam mendukung indikator kemantapan gotong royong Bahan Draft URK Permodalan dan Keuangan Mikro dalam penyusunan Draft URK Pengembangan Ekonomi yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Pengembangan Ekonomi,

Haris Djayadi AK. M.M

Kepala Subbidang
Permodalan dan Keuangan Mikro,

Rizki Sisindra, SE, M.Sc

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susilawati, SH.
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Sosial Budaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Magdalena, M.M
Jabatan : Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat,	Pengembangan Sosial Budaya,
Ir. Magdalena, M.M	**Susilawati, SH.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Sosial Budaya untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengembangan Sosial Budaya dalam mendukung kemantapan indikator pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Pengembangan Sosial Budaya dalam rangka Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Sosial Budaya untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengembangan Sosial Budaya dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Draft URK Pengembangan Sosial Budaya dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Sosial Budaya yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengembangan Sosial Budaya yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong Draft URK Pengembangan Sosial Budaya dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal	1

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Pemberdayaan Masyarakat ,

Ir. Magdalena, M.M

Kepala Bidang
Pengembangan Sosial Budaya,

Susilawati, SH.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Armansyah, ST
Jabatan : Kepala Subbidang Infrastruktur dan Teknologi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Susilawati, SH.
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Sosial Budaya

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pengembangan Sosial Budaya,	Infrastruktur dan Teknologi,
Susilawati, SH.	**Mohamad Armansyah, ST**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Infrastruktur dan Teknologi untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Infrastruktur dan Teknologi dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Infrastruktur dan Teknologi dalam penyusunan Draft URK Pengembangan Sosial Budaya dalam rangka Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Infrastruktur dan Teknologi untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Infrastruktur dan Teknologi dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft URK Infrastruktur dan Teknologi dalam penyusunan Draft URK Pengembangan Sosial Budaya dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Infrastruktur dan Teknologi yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Infrastruktur dan Teknologi dalam mendukung indikator kemantapan gotong royong Bahan Draft URK Infrastruktur dan Teknologi dalam penyusunan Draft URK Pengembangan Sosial Budaya yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Pengembangan Sosial Budaya ,

Susilawati, SH.

Kepala Subbidang
Infrastruktur dan Teknologi,

Mohamad Armansyah, ST

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herbert H.O. Siagian
Jabatan : Asisten Deputi Pemberdayaan Desa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nyoman Shuida
Jabatan : Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi	Asisten Deputi
Pemberdayaan Masyarakat,	Pemberdayaan Desa,
Desa dan Kawasan,	
Nyoman Shuida	**Dr. Ir. Herbert H.O Siagian, M.Sc**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Desa
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Desa untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Desa dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan (URK) di bidang Pemberdayaan Desa dalam mendukung indikator pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar URK Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Desa untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Desa dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Pemberdayaan Desa dalam mendukung indikator pemberdayaan URK Penguatan Pemerintahan Desa	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Desa yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Desa dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,05 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Pemberdayaan Desa yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong URK Sinkronisasi Regulasi Pelaksanaan UU Desa	1
	Jumlah Laporan Pelaksanaan pendampingan Desa	1

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Desa	8.600.000.000,-

Jakarta, Maret 2018

Deputi Bidang Koordinasi
Pemberdayaan Masyarakat,
Desa dan Kawasan,

Nyoman Shuida

Asisten Deputi
Pemberdayaan Desa,

Dr. Ir. Herbert H.O Siagian, M.Sc

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hotman Sahat Gayus, S.E, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Herbert H.O Siagian, M.Sc
Jabatan : Asisten Deputi Pemberdayaan Desa

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Pemberdayaan Desa,	Pengembangan Sarana dan Prasarana,
Dr. Ir. Herbert H.O Siagian, M.Sc	**Hotman Sahat Gayus, S.E, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Desa
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Pengembangan Sarana dan Prasarana dalam rangka Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Draft URK Pengembangan Sarana dan Prasarana dalam rangka Penguatan Pemerintahan Desa	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Draft URK Pengembangan Sarana dan Prasarana dalam rangka Sinkronisasi Regulasi Pelaksanaan UU Desa	1

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Pemberdayaan Desa,

Dr. Ir. Herbert H.O Siagian, M.Sc

Kepala Bidang
Pengembangan Sarana dan Prasarana,

Hotman Sahat Gayus, S.E, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedy Siswoyo Setiawan, ST, MM
Jabatan : Kepala Subbidang Sarana Desa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hotman Sahat Gayus, S.E, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pengembangan Sarana dan Prasarana,	Sarana Desa,
Hotman Sahat Gayus, S.E, M.Si	**Dedy Siswoyo Setiawan, ST, MM**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Desa
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Sarana Desa untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Sarana Desa dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Sarana Desa dalam penyusunan Draft URK Pengembangan Sarana dan Prasarana dalam rangka Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Sarana Desa untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Sarana Desa dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft URK Sarana Desa dalam penyusunan Draft URK Pengembangan Sarana dan Prasarana dalam rangka Penguatan Pemerintahan Desa	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Sarana Desa yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Sarana Desa yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Bahan Draft URK Sarana Desa dalam penyusunan Draft URK Pengembangan Sarana dan Prasarana dalam rangka Sinkronisasi Regulasi Pelaksanaan UU Desa	1

Jakarta, 2018

Kepala Bidang
Pengembangan Sarana dan Prasarana,

Hotman Sahat Gayus, S.E, M.Si

Kepala Subbidang
Sarana Desa,

Dedy Siswoyo Setiawan, ST., MM

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudi Hermawan, SE, MPH
Jabatan : Kepala Subbidang Prasarana Desa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hotman Sahat Gayus, S.E, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pengembangan Sarana dan Prasarana,	Prasarana Desa,
Hotman Sahat Gayus, S.E, M.Si	**Rudi Hermawan, S.E, MPH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Desa
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Prasarana Desa untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Prasarana Desa dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Prasarana Desa dalam penyusunan Draft URK Pengembangan Sarana dan Prasarana dalam rangka Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Prasarana Desa untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Prasarana Desa dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft URK Prasarana Desa dalam penyusunan Draft URK Pengembangan Sarana dan Prasarana dalam rangka Penguatan Pemerintahan Desa	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Prasarana Desa yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Prasarana Desa yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Bahan Draft URK Prasarana Desa dalam penyusunan Draft URK Pengembangan Sarana dan Prasarana dalam rangka Sinkronisasi Regulasi Pelaksanaan UU Desa	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Pengembangan Sarana dan Prasarana,

Hotman Sahat Gayus, S.E, M.Si

Kepala Subbidang
Prasarana Desa,

Rudi Hermawan, S.E, MPH

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melkianus Kebos, S.STP, M.T
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Herbert H.O Siagian, M.Sc
Jabatan : Asisten Deputi Pemberdayaan Desa

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Pemberdayaan Desa,	Pengelolaan Sumber Daya,
Dr. Ir. Herbert H.O Siagian, M.Sc	**Melkianus Kebos, S.STP, M.T**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Desa
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengelolaan Sumber Daya dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Pengelolaan Sumber Daya dalam rangka Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengelolaan Sumber Daya dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Draft URK Pengelolaan Sumber Daya dalam rangka Penguatan Pemerintahan Desa	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengelolaan Sumber Daya yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Draft URK Pengelolaan Sumber Daya dalam rangka Penguatan Pemerintahan Desa	1

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Pemberdayaan Desa,

Dr. Ir. Herbert H.O Siagian, M.Sc

Kepala Bidang
Pengelolaan Sumber Daya,

Melkianus Kebos, S.STP, M.T

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elfraim Dunov Rumabutar, ST., M.Si
Jabatan : Kepala Subbidang Ekonomi Kreatif

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Melkianus Kebos, S.STP, M.T
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pengelolaan Sumber Daya,	Ekonomi Kreatif,
Melkianus Kebos, S.STP, M.T	**Elfraim Dunov Rumabutar, ST., M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Desa
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Ekonomi Kreatif dalam penyusunan Draft URK Pengelolaan Sumber Daya dalam rangka Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft URK Ekonomi Kreatif dalam penyusunan Draft URK Pengelolaan Sumber Daya dalam rangka Penguatan Pemerintahan Desa	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Bahan Draft URK Ekonomi Kreatif dalam penyusunan Draft URK Pengelolaan Sumber Daya dalam rangka Sinkronisasi Regulasi Pelaksanaan UU Desa	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Pengelolaan Sumber Daya,

Melkianus Kebos, S.STP, M.T

Kepala Subbidang
Ekonomi Kreatif,

Elfraim Dunov Rumabutar, ST., M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nugroho, S.Sos, M.Sc
Jabatan : Kepala Subbidang Kearifan Lokal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Melkianus Kebos, S.STP, M.T
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pengelolaan Sumber Daya,	Kearifan Lokal,
Melkianus Kebos, S.STP, M.T	**Nugroho, S.Sos, M.Sc**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Desa
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kearifan Lokal untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kearifan Lokal dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Kearifan Lokal dalam penyusunan Draft URK Pengelolaan Sumber Daya dalam rangka Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kearifan Lokal untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kearifan Lokal dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft URK Kearifan Lokal dalam penyusunan Draft URK Pengelolaan Sumber Daya dalam rangka Penguatan Pemerintahan Desa	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kearifan Lokal yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kearifan Lokal yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Bahan Draft URK Kearifan Lokal dalam penyusunan Draft URK Pengelolaan Sumber Daya dalam rangka Sinkronisasi Regulasi Pelaksanaan UU Desa	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Pengelolaan Sumber Daya,

Melkianus Kebos, S.STP, M.T

Kepala Subbidang
Kearifan Lokal,

Nugroho, S.Sos, M.Sc

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Awal Subandar
Jabatan : Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nyoman Shuida
Jabatan : Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi	Asisten Deputi
Pemberdayaan Masyarakat,	Pemberdayaan Kawasan Perdesaan,
Desa dan Kawasan,	
Nyoman Shuida	**Dr. Ir. Awal Subandar, M.Sc**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan (URK) di bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan dalam mendukung indikator pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar URK Peningkatan Pelayanan Dasar dan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan dalam mendukung indikator pemberdayaan URK Keterkaitan Kawasan Perdesaan dengan Pusat - Pusat Pertumbuhan Ekonomi Lokal/Wilayah	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,05 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong URK Penetapan, Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perdesaan	1

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	2.900.000.000,-

Jakarta, Maret 2018

Deputi Bidang Koordinasi
Pemberdayaan Masyarakat,
Desa dan Kawasan,

Nyoman Shuida

Asisten Deputi
Pemberdayaan Kawasan Perdesaan,

Dr. Ir. Awal Subandar, M.Sc

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Totok Hendratmoko, AP, MBA
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Tertinggal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Awal Subandar, M.Sc
Jabatan : Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Pemberdayaan Kawasan Perdesaan,	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Tertinggal,
Dr. Ir. Awal Subandar, M.Sc	**Totok Hendratmoko, AP, MBA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Tertinggal untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Tertinggal dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Tertinggal dalam rangka Peningkatan Pelayanan Dasar dan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Tertinggal untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Tertinggal dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Draft URK Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Tertinggal dalam rangka Keterkaitan Kawasan Perdesaan dengan Pusat - Pusat Pertumbuhan Ekonomi Lokal/Wilayah	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Tertinggal yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Tertinggal yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Draft URK Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Tertinggal dalam rangka Penetapan, Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perdesaan	1

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Pemberdayaan Kawasan Perdesaan,

Dr. Ir. Awal Subandar, M.Sc

Kepala Bidang Pengembangan Sarana
dan Prasarana Kawasan Tertinggal,

Totok Hendratmoko, AP, MBA

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamzah Purwanto, ST
Jabatan : Kepala Subbidang Sarana dan Prasarana Pesisir

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Totok Hendratmoko, AP, MBA
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Tertinggal

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pengembangan Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana Pesisir,
Kawasan Tertinggal,	
Totok Hendratmoko, AP, MBA	**Hamzah Purwanto, ST**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Sarana dan Prasarana Pesisir untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana Pesisir dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Sarana dan Prasarana Pesisir dalam penyusunan Draft URK Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Tertinggal dalam rangka Peningkatan Pelayanan Dasar dan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Sarana dan Prasarana Pesisir untuk mendukung kemantapan Pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana Pesisir dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft URK Sarana dan Prasarana Pesisir dalam penyusunan Draft URK Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Tertinggal dalam rangka Keterkaitan Kawasan Perdesaan dengan Pusat - Pusat Pertumbuhan Ekonomi Lokal/Wilayah	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Sarana dan Prasarana Pesisir yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana Pesisir yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Bahan Draft URK Sarana dan Prasarana Pesisir dalam penyusunan Draft URK Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Tertinggal dalam rangka Penetapan, Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perdesaan	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Pengembangan Sarana dan Prasarana
Kawasan Tertinggal,

Totok Hendratmoko, AP, MBA

Kepala Subbidang
Sarana dan Prasarana Pesisir,

Hamzah Purwanto, ST

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Monalisa Herawati Rumayar, SPt, M.Si
Jabatan : Kepala Subbidang Sarana dan Prasarana Perdesaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Totok Hendratmoko, AP, MBA
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Tertinggal

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pengembangan Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana Perdesaan,
Kawasan Tertinggal,	
Totok Hendratmoko, AP, MBA	**Monalisa Herawati Rumayar, SPt, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Sarana dan Prasarana Pedesaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Sarana dan Prasarana Pedesaan dalam penyusunan Draft URK Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Tertinggal dalam rangka Peningkatan Pelayanan Dasar dan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Sarana dan Prasarana Pedesaan untuk mendukung kemantapan Pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft URK Sarana dan Prasarana Pedesaan dalam penyusunan Draft URK Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Tertinggal dalam rangka Keterkaitan Kawasan Perdesaan dengan Pusat - Pusat Pertumbuhan Ekonomi Lokal/Wilayah	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Sarana dan Prasarana Pedesaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Bahan Draft URK Sarana dan Prasarana Pedesaan dalam penyusunan Draft URK Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Tertinggal dalam rangka Penetapan, Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perdesaan	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Pengembangan Sarana dan Prasarana
Kawasan Tertinggal,

Totok Hendratmoko, AP, MBA

Kepala Subbidang
Sarana dan Prasarana Pedesaan,

Monalisa Herawati Rumayar, SPt,M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Mustikorini Indrijatiningrum, M.E
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan Kawasan Berkembang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Awal Subandar, M.Sc
Jabatan : Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Pemberdayaan Kawasan Perdesaan,	Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan Kawasan Berkembang,
Dr. Ir. Awal Subandar, M.Sc	**Ir. Mustikorini Indrijatiningrum, M.E**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan Kawasan Berkembang untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan Kawasan Berkembang dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan Kawasan Berkembang dalam rangka Peningkatan Pelayanan Dasar dan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan Kawasan Berkembang untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan Kawasan Berkembang dalam mendukung indikator pemberdayaan Draft URK Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan Kawasan Berkembang dalam rangka Keterkaitan Kawasan Perdesaan dengan Pusat - Pusat Pertumbuhan Ekonomi Lokal/Wilayah	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan Kawasan Berkembang yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan Kawasan Berkembang yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Draft URK Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan Kawasan Berkembang dalam rangka Penetapan, Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perdesaan	1

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Pemberdayaan Kawasan Perdesaan,

Dr. Ir. Awal Subandar, M.Sc

Kepala Bidang Pengembangan
Kemitraan dan Kelembagaan Kawasan
Berkembang,

Ir. Mustikorini Indrijatiningrum, M.E

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Merry Efriana, SE, MM
Jabatan : Kepala Subbidang Pengembangan Kemitraan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Mustikorini Indrijatiningrum, M.E
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan Kawasan Berkembang

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan Kawasan Berkembang,	Pengembangan Kemitraan,
Ir. Mustikorini Indrijatiningrum, M.E	**Merry Efriana, SE, MM**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kemitraan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengembangan Kemitraan dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Pengembangan Kemitraan dalam penyusunan Draft URK Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan Kawasan Berkembang dalam rangka Peningkatan Pelayanan Dasar dan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kemitraan untuk mendukung kemantapan Pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengembangan Kemitraan dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft URK Pengembangan Kemitraan dalam penyusunan Draft URK Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan Kawasan Berkembang dalam rangka Keterkaitan Kawasan Perdesaan dengan Pusat - Pusat Pertumbuhan Ekonomi Lokal/Wilayah	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kemitraan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengembangan Kemitraan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Bahan Draft URK Pengembangan Kemitraan dalam penyusunan Draft URK Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan Kawasan Berkembang dalam rangka Penetapan, Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perdesaan	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan
Kawasan Berkembang,

Ir. Mustikorini Indrijatiningrum, M.E

Kepala Subbidang
Pengembangan Kemitraan,

Merry Efriana, SE, MM

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R.M. Wijanarko Setyawan
Jabatan : Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nyoman Shuida
Jabatan : Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan,	Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus,
Nyoman Shuida	**R.M. Wijanarko Setyawan**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	5,08 (Skala 6)
	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan (URK) di bidang Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus dalam mendukung indikator pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar URK Pengelolaan PLBN, Kedaulatan dan Lintas Batas	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	5,11 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus dalam mendukung indikator pemberdayaan URK Penguatan Kelembagaan Kawasan Perbatasan dan Transmigrasi	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus dalam mendukung kemantapan gotong royong	5,05 (Skala 6)
	Jumlah URK di bidang Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong URK Kebijakan Kawasan Khusus	1

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus	2.225.000.000,-

Jakarta, Maret 2018

Deputi Bidang Koordinasi
Pemberdayaan Masyarakat,
Desa dan Kawasan,

Nyoman Shuida

Asisten Deputi
Pemberdayaan Kawasan
Strategis dan Khusus,

R.M. Wijanarko Setyawan

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nugroho Nono Arwendio, S.Sos
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pemberdayaan Kawasan Strategis

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. R.M. Wijanarko Setyawan, M.Sc
Jabatan : Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Plt. Kepala Bidang
Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus,	Pemberdayaan Kawasan Strategis,
Drs. R.M.Wijanarko Setyawan, M.Sc	**Nugroho Nono Arwendio, S.Sos**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Pemberdayaan Kawasan Strategis untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemberdayaan Kawasan Strategis dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Pemberdayaan Kawasan Strategis dalam rangka Pengelolaan PLBN, Kedaulatan dan Lintas Batas	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Pemberdayaan Kawasan Strategis untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemberdayaan Kawasan Strategis dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Draft URK Pemberdayaan Kawasan Strategis dalam rangka Penguatan Kelembagaan Kawasan Perbatasan dan Transmigrasi	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Kawasan Strategis yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemberdayaan Kawasan Strategis yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Draft URK Pemberdayaan Kawasan Strategis dalam rangka Kebijakan Kawasan Khusus	1

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus,

Drs. R.M.Wijanarko Setyawan, MSc

Plt. Kepala Bidang
Pemberdayaan Kawasan Strategis,

Nugroho Nono Arwendio, S.Sos

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Panca Dewi Setyarini, SE, MP
Jabatan : Kepala Subbidang Permukiman dan Transmigrasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nugroho Nono Arwendio, S.Sos.
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pemberdayaan Kawasan Strategis

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Plt. Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pemberdayaan Kawasan Strategis,	Permukiman dan Transmigrasi,
Nugroho Nono Arwendio, S.Sos	**Panca Dewi Setyarini, SE, MP**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Permukiman dan Transmigrasi untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Permukiman dan Transmigrasi dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Permukiman dan Transmigrasi dalam penyusunan Draft URK Pemberdayaan Kawasan Strategis dalam rangka Pengelolaan PLBN, Kedaulatan dan Lintas Batas	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Permukiman dan Transmigrasi untuk mendukung kemantapan Pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Permukiman dan Transmigrasi dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft URK Permukiman dan Transmigrasi dalam penyusunan Draft URK Pemberdayaan Kawasan Strategis dalam rangka Penguatan Kelembagaan Kawasan Perbatasan dan Transmigrasi	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Permukiman dan Transmigrasi yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Permukiman dan Transmigrasi yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Bahan Draft URK Permukiman dan Transmigrasi dalam penyusunan Draft URK Pemberdayaan Kawasan Strategis dalam rangka Kebijakan Kawasan Khusus	1

Jakarta, Maret 2018

Plt. Kepala Bidang
Pemberdayaan Kawasan Strategis,

Nugroho Nono Arwendio, S.Sos

Kepala Subbidang
Permukiman dan Transmigrasi,

Panca Dewi Setyarini, SE, MP

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurlela, S.Sos
Jabatan : Kepala Subbidang Kawasan Terisolir dan Perbatasan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nugroho Nono Arwendio, S.Sos
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pemberdayaan Kawasan Strategis

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Plt. Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pemberdayaan Kawasan Strategis,	Kawasan Terisolir dan Perbatasan,
Nugroho Nono Arwendio, S.Sos	**Nurlela, S.Sos**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kawasan Terisolir dan Perbatasan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kawasan Terisolir dan Perbatasan dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Kawasan Terisolir dan Perbatasan dalam penyusunan Draft URK Pemberdayaan Kawasan Strategis dalam rangka Pengelolaan PLBN, Kedaulatan dan Lintas Batas	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kawasan Terisolir dan Perbatasan untuk mendukung kemantapan Pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kawasan Terisolir dan Perbatasan dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft URK Kawasan Terisolir dan Perbatasan dalam penyusunan Draft URK Pemberdayaan Kawasan Strategis dalam rangka Penguatan Kelembagaan Kawasan Perbatasan dan Transmigrasi	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kawasan Terisolir dan Perbatasan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kawasan Terisolir dan Perbatasan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Bahan Draft URK Kawasan Terisolir dan Perbatasan dalam penyusunan Draft URK Pemberdayaan Kawasan Strategis dalam rangka Kebijakan Kawasan Khusus	1

Jakarta, Maret 2018

Plt. Kepala Bidang
Pemberdayaan Kawasan Strategis,

Nugroho Nono Arwendio, S.Sos

Kepala Subbidang
Kawasan Terisolir dan Perbatasan,

Nurlela, S.Sos

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr.Ir. Moon Cahyani
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Khusus

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. R.M. Wijanarko Setyawan, M.Sc
Jabatan : Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Asisten Deputi	Kepala Bidang
Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus,	Pengembangan Kawasan Khusus,
Drs. R.M.Wijanarko Setyawan, M.Sc	**Dr.Ir. Moon Cahyani**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kawasan Khusus untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengembangan Kawasan Khusus dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Draft URK Pengembangan Kawasan Khusus dalam rangka Pengelolaan PLBN, Kedaulatan dan Lintas Batas	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kawasan Khusus untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengembangan Kawasan Khusus dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Draft URK Pengembangan Kawasan Khusus dalam rangka Penguatan Kelembagaan Kawasan Perbatasan dan Transmigrasi	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kawasan Khusus yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengembangan Kawasan Khusus yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Draft URK Pengembangan Kawasan Khusus dalam rangka Kebijakan Kawasan Khusus	1

Jakarta, Maret 2018

Asisten Deputi
Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus,

Drs. R.M.Wijanarko Setyawan, MSc

Kepala Bidang
Pengembangan Kawasan Khusus,

Dr.Ir. Moon Cahyani

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nugroho Nono Arwendio, S.Sos
Jabatan : Kepala Subbidang Kawasan Industri dan Produktif

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr.Ir. Moon Cahyani
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Khusus

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang	Kepala Subbidang
Pengembangan Kawasan Khusus,	Kawasan Industri dan Produktif,
Dr.Ir. Moon Cahyani	**Nugroho Nono Arwendio, S.Sos**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kawasan Industri dan Produktif untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kawasan Industri dan Produktif dalam mendukung indikator kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar Bahan Draft URK Kawasan Industri dan Produktif dalam penyusunan Draft URK Pengembangan Kawasan Khusus dalam rangka Pengelolaan PLBN, Kedaulatan dan Lintas Batas	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kawasan Industri dan Produktif untuk mendukung kemantapan Pemberdayaan	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kawasan Industri dan Produktif dalam mendukung indikator kemantapan pemberdayaan Bahan Draft URK Kawasan Industri dan Produktif dalam penyusunan Draft URK Pengembangan Kawasan Khusus dalam rangka Penguatan Kelembagaan Kawasan Perbatasan dan Transmigrasi	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kawasan Industri dan Produktif yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	Jumlah Bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kawasan Industri dan Produktif yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong Bahan Draft URK Kawasan Industri dan Produktif dalam penyusunan Draft URK Pengembangan Kawasan Khusus dalam rangka Kebijakan Kawasan Khusus	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bidang
Pengembangan Kawasan Khusus,

Dr.Ir. Moon Cahyani

Kepala Subbidang
Kawasan Industri dan Produktif,

Nugroho Nono Arwendio, S.Sos

INSPEKTORAT

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gunarso Djoko Santoso, Ak, M.M
Jabatan : Inspektur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Puan Maharani
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Menteri Koordinator	Inspektur,
Bidang Pembangunan Manusia dan	
Kebudayaan,	
Puan Maharani	**Gunarso Djoko Santoso, Ak, M.M**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Inspektorat
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas pengawasan atas dokumen pelaksanaan anggaran	Tersedianya Jumlah dokumen Layanan Audit Internal	1

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kemenko PMK	Rp1.300.000.000,-

Jakarta, Maret 2018

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan,

Puan Maharani

Inspektur,

Gunarso Djoko Santoso, Ak, M.M

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anies Kristianita Dwihening, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Gunarso Djoko Santoso, Ak, M.M
Jabatan : Inspektur

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Inspektur,	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat,
Gunarso Djoko Santoso, Ak, M.M	**Anies Kristianita Dwihening, SE**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Inspektorat
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas pengawasan atas dokumen pelaksanaan anggaran	Jumlah draf dokumen administrasi tindak lanjut	2
	Jumlah draf dokumen kegiatan pengawasan	2

Jakarta, Maret 2018

Inspektur,

Gunarso Djoko Santoso, Ak, M.M

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat,

Anies Kristianita Dwihening, SE

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lucky Kristiawan, SE, M.Ak
Jabatan : Auditor Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Gunarso Djoko Santoso, Ak, M.M
Jabatan : Inspektur

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua: Inspektur,	Pihak Pertama: Auditor Muda,
Gunarso Djoko Santoso, Ak, M.M	**Lucky Kristiawan, SE, M.AK**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Inspektorat
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas pengawasan atas dokumen pelaksanaan anggaran	Jumlah draf Laporan hasil pemeriksaan	14

Jakarta, Maret 2018

Inspektur,

Gunarso Djoko Santoso, Ak, M.M

Auditor Muda,

Lucky Kristiawan, SE, M.Ak

STAF AHLI

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, S.E.,M.E.
Jabatan : Staf Ahli Bidang Kependudukan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Puan Maharani
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Menteri Koordinator	Staf Ahli
Bidang Pembangunan Manusia	Bidang Kependudukan,
dan Kebudayaan,	
Puan Maharani	**Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, S.E.,M.E.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Staf Ahli Bidang Kependudukan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	**2**	**3**
Tersusunnya kajian bidang Kependudukan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kependudukan	1
Tersusunnya kajian pencapaian kinerja bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang terkait dengan Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1
Tersusunnya laporan hasil Pelaksanaan Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri	1

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kajian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	812.000.000

Jakarta, Maret 2018

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan,

Puan Maharani

Staf Ahli
Bidang Kependudukan,

Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, S.E.,M.E.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, M.A.
Jabatan : Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif, dan Ketenagakerjaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Puan Maharani
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Menteri Koordinator	Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil dan
Bidang Pembangunan Manusia	Menengah, Ekonomi Kreatif, dan
dan Kebudayaan,	Ketenagakerjaan,
Puan Maharani	**Ir. Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, M.A.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif, dan Ketenagakerjaan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Tersusunnya kajian bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif, dan Ketenagakerjaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif, dan Ketenagakerjaan	1
Tersusunnya kajian pencapaian kinerja bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang terkait dengan Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak dan Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan	1

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kajian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	422.000.000

Jakarta, Maret 2018

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan,

Puan Maharani

Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif, dan Ketenagakerjaan,

Ir. Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, M.A.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Haswan Yunaz, MM, M.Si
Jabatan : Staf Ahli Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial, dan Jati Diri Bangsa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Puan Maharani
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Menteri Koordinator	Staf Ahli Bidang
Bidang Pembangunan Manusia	Multikulturalisme, Restorasi Sosial,
dan Kebudayaan,	dan Jati Diri Bangsa,
Puan Maharani	**Dr. Haswan Yunaz, MM, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Staf Ahli Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial, dan Jati Diri Bangsa
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	**2**	**3**
Tersusunnya kajian bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial, dan Jati Diri Bangsa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial, dan Jati Diri Bangsa	1
Tersusunnya kajian pencapaian kinerja bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang terkait dengan Bidang Koordinasi Kebudayaan dan Gerakan Nasional Revolusi Mental	1

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kajian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	422.000.000

Jakarta, Maret 2018

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan,

Puan Maharani

Staf Ahli Bidang
Multikulturalisme, Restorasi Sosial,
dan Jati Diri Bangsa,

Dr. Haswan Yunaz, MM, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghafur Akbar Dharmaputra, SE, M.Com
Jabatan : Staf Ahli Bidang *Sustainable Development Goals Pasca* 2015

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Puan Maharani
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Menteri Koordinator	Staf Ahli Bidang
Bidang Pembangunan Manusia	*Sustainable Development Goals Pasca* 2015,
dan Kebudayaan,	
Puan Maharani	**Ghafur Akbar Dharmaputra, SE, M.Com**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Staf Ahli Bidang *Sustainable Development Goals Pasca* 2015
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	**2**	**3**
Tersusunnya kajian bidang *Sustainable Development Goals Pasca* 2015	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di bidang *Sustainable Development Goals Pasca* 2015	1
Tersusunnya kajian pencapaian kinerja bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang terkait dengan Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, dan Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama	1

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Kajian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	422.000.000

Jakarta, Maret 2018

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan,

Puan Maharani

Staf Ahli Bidang
Sustainable Development Goals Pasca 2015,

Ghafur Akbar Dharmaputra, SE, M.Com

SETKEMENKO PMK

Sekretariat Kementerian Koordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Y.B. Satya Sananugraha
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Puan Maharani
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Menteri Koordinator	Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan	Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan,	Kebudayaan,
Puan Maharani	**Y.B. Satya Sananugraha**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Organisasi : Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya efektivitas birokrasi Kemenko PMK	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	75,01
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP
	Nilai SAKIP	73,51

Program	Anggaran (Rp)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK	150.733.720.000,-
Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	15.492.990.000,-
Jumlah Anggaran	166.226.710.000,-

Jakarta, Maret 2018

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan,

Puan Maharani

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan,

Y.B. Satya Sananugraha

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. Yohan, M.Si
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Y.B. Satya Sananugraha
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,	Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama,
Y.B. Satya Sananugraha	**Dr. Drs. Yohan, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Perencanaan dan Kerjasama
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya efektivitas birokrasi Perencanaan dan Kerjasama Kemenko PMK	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan koordinasi penanganan masalah strategis bidang PMK	1
	Jumlah dokumen layanan kerjasama internasional	1
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan Perencanaan dan Kerjasama Kemenko PMK	Jumlah dokumen layanan perencanaan	1
	Jumlah dokumen layanan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan	1

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Penyelenggaraan Penyusunan Program dan Anggaran, Penyusunan Data Pelaporan dan Administrasi KLN	7.765.500.000,-
Koordinasi Penanganan Masalah-Masalah Strategis Bidang PMK	15.492.990.000,-
Jumlah Anggaran	23.258.490.000,-

Jakarta, Maret 2018

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan,

Y.B. Satya Sananugraha

Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama,

Dr. Drs. Yohan, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heri Nugroho, SE
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Drs. Yohan., M.Si
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama,	Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran,
Dr. Drs. Yohan., M.Si	**Heri Nugroho, SE**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Perencanaan dan Kerjasama
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya akuntabilitas penyusunan perencanaan program dan anggaran Kemenko PMK	Jumlah draf dokumen perencanaan program	5
	Jumlah draf dokumen penyusunan anggaran	3
	Jumlah draf dokumen peningkatan perencanaan bidang PMK	3

Jakarta, Maret 2018

Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama,

Dr. Drs. Yohan., M.Si

Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran,

Heri Nugroho, SE

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heidy Ardhiastari, SE, M.M
Jabatan : Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heri Nugroho, SE
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran,	Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran I,
Heri Nugroho, SE	**Heidy Ardhiastari, SE, M.M**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Perencanaan dan Kerjasama
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya akuntabilitas penyusunan anggaran Kemenko PMK	Jumlah bahan draf dokumen penelitian penyusunan anggaran 2018	1
	Jumlah bahan draf dokumen penyusunan RKA dan DIPA Kemenko PMK	1
	Jumlah bahan draf dokumen hasil sosialisasi regulasi penyusunan anggaran	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran,

Heri Nugroho, SE

Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran I,

Heidy Ardhiastari, SE, M.M

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Kusmiati, S.Si
Jabatan : Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran II

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heri Nugroho, SE
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran,	Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran II,
Heri Nugroho, SE	**Nur Kusmiati, S.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Perencanaan dan Kerjasama
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya akuntabilitas koordinasi peningkatan perencanaan Kemenko PMK	Jumlah bahan draf dokumen hasil konsolidasi program dan kegiatan bidang PMK	1
	Jumlah bahan draf dokumen hasil rapat kerja pimpinan Kemenko PMK 2018	1
	Jumlah bahan draf dokumen Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran,

Heri Nugroho, SE

Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran II,

Nur Kusmiati, S.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Abdi Rizal, MA
Jabatan : Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Drs. Yohan., M.Si
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama,	Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri,
Dr. Drs. Yohan., M.Si	**Ir. Abdi Rizal, MA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Perencanaan dan Kerjasama
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya efektivitas birokrasi Kerjasama Luar Negeri Kemenko PMK	Jumlah draf dokumen kerjasama bilateral dan organisasi Internasional	2
	Jumlah draf dokumen kerjasama Regional dan Multilateral	2

Jakarta, Maret 2018

Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama,

Dr. Drs. Yohan., M.Si

Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri,

Ir. Abdi Rizal, MA

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfa Ruhama, S.IP
Jabatan : Kepala Subbagian Kerja Sama Regional dan Multilateral

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Abdi Rizal, MA
Jabatan : Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri,	Kepala Subbagian Kerja Sama Regional dan Multilateral,
Ir. Abdi Rizal, MA	**Zulfa Ruhama, S.IP**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Perencanaan dan Kerjasama
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya efektivitas birokrasi Kerjasama Regional dan Multilateral Kemenko PMK	Jumlah bahan draf dokumen kerjasama Regional	1
	Jumlah bahan draf dokumen kerjasama Multilateral	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri,

Ir. Abdi Rizal, MA

Kepala Subbagian Kerja Sama Regional dan Multilateral,

Zulfa Ruhama, S.IP

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Haryanto, S.ST
Jabatan : Kepala Subbagian Kerja Sama Bilateral dan Organisasi Internasional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Abdi Rizal, MA
Jabatan : Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri,	Kepala Subbagian Kerja Sama Bilateral dan Organisasi Internasional,
Ir. Abdi Rizal, MA	**Tri Haryanto, S.ST**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Perencanaan dan Kerjasama
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya efektivitas birokrasi Kerjasama Bilateral dan Organisasi Internasional Kemenko PMK	Jumlah bahan draf dokumen kerjasama bilateral	1
	Jumlah bahan draf dokumen kerjasama organisasi Internasional	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri,

Ir. Abdi Rizal, MA

Kepala Subbagian Kerja Sama Bilateral dan Organisasi Internasional,

Tri Haryanto, S.ST

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Dyah Ratnawati
Jabatan : Kepala Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis dan Kerjasama Antar Lembaga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Drs. Yohan., M.Si
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama,	Kepala Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis dan Kerjasama Antar Lembaga,
Dr. Drs. Yohan., M.Si	**Dra. Dyah Ratnawati**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Perencanaan dan Kerjasama
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya efektivitas birokrasi Pengelolaan Kegiatan Strategis dan Kerjasama Antar Lembaga Kemenko PMK	Jumlah draf laporan koordinasi dukungan kerjasama	2
	Jumlah draf laporan koordinasi percepatan Reformasi Birokrasi	1
	Jumlah draf laporan koordinasi dan sinkronisasi masalah strategis bidang PMK	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama,

Dr. Drs. Yohan., M.Si

Kepala Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis dan Kerjasama Antar Lembaga,

Dra. Dyah Ratnawati

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufik Rakhman, S.Sos
Jabatan : Kepala Subbagian Kerjasama Antar Lembaga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Dyah Ratnawati
Jabatan : Kepala Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis dan Kerjasama Antar Lembaga

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis dan Kerjasama Antar Lembaga,	Kepala Subbagian Kerjasama Antar Lembaga,
Dra. Dyah Ratnawati	**Taufik Rakhman, S.Sos**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Perencanaan dan Kerjasama
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya efektivitas birokrasi Kerjasama Antar Lembaga Kemenko PMK	Jumlah bahan draf laporan kerjasama antar Lembaga	1
	Jumlah bahan draf laporan koordinasi dukungan kerjasama internasional	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis dan Kerjasama Antar Lembaga,

Dra. Dyah Ratnawati

Kepala Subbagian Kerjasama Antar Lembaga,

Taufik Rakhman, S.Sos

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayyu Kencanasari, S.E.
Jabatan : Kepala Subbagian Pengelolaan Kegiatan Strategis

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Dyah Ratnawati
Jabatan : Kepala Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis dan Kerjasama Antar Lembaga

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis dan Kerjasama Antar Lembaga,	Kepala Subbagian Pengelolaan Kegiatan Strategis,
Dra. Dyah Ratnawati	**Ayyu Kencanasari, S.E.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Perencanaan dan Kerjasama
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya efektivitas birokrasi Pengelolaan Kegiatan Strategis Kemenko PMK	Jumlah bahan draf laporan koordinasi percepatan Reformasi Birokrasi	1
	Jumlah bahan draf laporan koordinasi dan sinkronisasi masalah strategis bidang PMK	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis dan Kerjasama Antar Lembaga,

Dra. Dyah Ratnawati

Kepala Subbagian Pengelolaan Kegiatan Strategis,

Ayyu Kencanasari, S.E.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwidoyo Supangkat, SE
Jabatan : Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Drs. Yohan., M.Si
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama,	Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan,
Dr. Drs. Yohan., M.Si	**Dwidoyo Supangkat, SE**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Perencanaan dan Kerjasama
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Kemenko PMK	Jumlah draf dokumen pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	2
	Jumlah draf dokumen laporan kemajuan	6
	Jumlah draf dokumen laporan pencapaian kinerja	2

Jakarta, Maret 2018

Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama,

Dr. Drs. Yohan., M.Si

Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan,

Dwidoyo Supangkat, SE

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anitha, S.IP, MA
Jabatan : Kepala Subbagian Pelaporan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dwidoyo Supangkat, SE
Jabatan : Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak [ertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan,	Kepala Subbagian Pelaporan,
Dwidoyo Supangkat, SE	**Anitha, S.IP, MA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Perencanaan dan Kerjasama
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	**2**	**3**
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan Pelaporan Kemenko PMK	Jumlah bahan draf dokumen laporan kemajuan periodik	4
	Jumlah bahan draf dokumen laporan tahunan	2

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan,

Dwidoyo Supangkat, SE

Kepala Subbagian Pelaporan,

Anitha, S.IP, MA

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Indah Suwarni, M.Si
Jabatan : Kepala Biro Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Y.B. Satya Sananugraha
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,	Kepala Biro Umum,
Y.B. Satya Sananugraha	**Dra. Indah Suwarni, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya efektivitas birokrasi Pengelolaan Layanan Umum Kemenko PMK	Jumlah dokumen layanan Manajemen SDM	1
	Jumlah dokumen layanan protokoler	1
	Jumlah dokumen layanan perkantoran	1
	Jumlah dokumen layanan umum	1
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan Pengelolaan Layanan Umum Kemenko PMK	Jumlah dokumen layanan manajemen keuangan	1
	Jumlah dokumen layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN)	1
	Jumlah dokumen layanan internal	1

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum	Rp119.336.120.000,-
Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp9.632.100.000,-
Jumlah Anggaran	Rp128.968.220.000,-

Jakarta, Maret 2018

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan,

Y.B. Satya Sananugraha

Kepala Biro Umum,

Dra. Indah Suwarni, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edy Wiyanto, S.Sos, M.A.P
Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian dan Kearsipan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Indah Suwarni, M.Si
Jabatan : Kepala Biro Umum

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:
Kepala Biro Umum,

Dra. Indah Suwarni, M.Si

Pihak Pertama:
Kepala Bagian
Kepegawaian dan Kearsipan,

Edy Wiyanto, S.Sos, M.A.P

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya efektivitas birokrasi Kepegawaian dan Kearsipan Kemenko PMK	Jumlah draf dokumen mutasi dan kepegawaian	3
	Jumlah draf dokumen pengembangan dan seleksi	6
	Jumlah draf dokumen kearsipan	2

Jakarta, Maret 2018

Kepala Biro Umum,

Dra. Indah Suwarni, M.Si

Kepala Bagian
Kepegawaian dan Kearsipan,

Edy Wiyanto, S.Sos, M.A.P

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muliyanti
Jabatan : Kepala Subbagian Kearsipan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Edy Wiyanto, S.Sos, M.A.P
Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian dan Kearsipan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian	Kepala Subbagian Kearsipan,
Kepegawaian dan Kearsipan,	
Edy Wiyanto, S.Sos, M.A.P	**Muliyanti**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya efektivitas birokrasi Kepegawaian dan Kearsipan Kemenko PMK	Jumlah bahan draf dokumen Kearsipan	2

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian
Kepegawaian dan Kearsipan,

Edy Wiyanto, S.Sos, M.A.P

Kepala Subbagian Kearsipan,

Muliyanti

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggariyani Kurniasih, A.Md
Jabatan : Kepala Subbagian Pengembangan dan Seleksi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Edy Wiyanto, S.Sos, M.A.P
Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian dan Kearsipan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian	Kepala Subbagian Pengembangan dan
Kepegawaian dan Kearsipan,	Seleksi,
Edy Wiyanto, S.Sos, M.A.P	**Anggariyani Kurniasih, A.Md**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya efektivitas birokrasi Kepegawaian dan Kearsipan Kemenko PMK	Jumlah bahan draf dokumen Pengembangan dan Seleksi	6

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian
Kepegawaian dan Kearsipan,

Edy Wiyanto, S.Sos, M.A.P

Kepala Subbagian Pengembangan dan Seleksi,

Anggariyani Kurniasih, A.Md

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Warsono, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Subbagian Mutasi dan Data Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Edy Wiyanto, S.Sos, M.A.P
Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian dan Kearsipan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian	Kepala Subbagian Mutasi dan Data
Kepegawaian dan Kearsipan,	Kepegawaian,
Edy Wiyanto, S.Sos, M.A.P	**Warsono, S.Sos, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya efektivitas birokrasi Kepegawaian dan Kearsipan Kemenko PMK	Jumlah bahan draf dokumen mutasi dan kepegawaian	3

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian
Kepegawaian dan Kearsipan,

Edy Wiyanto, S.Sos, M.A.P

Kepala Subbagian Mutasi dan Data
Kepegawaian,

Warsono, S.Sos, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eni Rukawiani, SE.
Jabatan : Kepala Bagian Rumah Tangga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Indah Suwarni, M.Si
Jabatan : Kepala Biro Umum

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Biro Umum,	Kepala Bagian Rumah Tangga,
Dra. Indah Suwarni, M.Si	**Eni Rukawiani, SE.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya akuntabilitas Layanan Rumah Tangga Kemenko PMK	Jumlah draf dokumen perlengkapan	1
	Jumlah draf dokumen urusan dalam	1
	Jumlah draf dokumen inventarisasi dan perawatan	3

Jakarta, Maret 2018

Kepala Biro Umum,

Dra. Indah Suwarni, M.Si

Kepala Bagian Rumah Tangga,

Eni Rukawiani, SE.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Furqon, S.Sos , M.Pd
Jabatan : Kepala Subbagian Urusan Dalam

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Eni Rukawiani, SE.
Jabatan : Kepala Bagian Rumah Tangga

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Rumah Tangga,	Kepala Subbagian Urusan Dalam,
Eni Rukawiani, SE.	**Ahmad Furqon, S.Sos , M.Pd**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya akuntabilitas Layanan Urusan Dalam Kemenko PMK	Jumlah bahan draf dokumen Urusan Dalam	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Rumah Tangga,

Eni Rukawiani, SE.

Kepala Subbagian Urusan Dalam,

Ahmad Furqon, S.Sos , M.Pd

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Yusuf Asnani, S.Kom
Jabatan : Kepala Subbagian Perlengkapan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Eni Rukawiani, SE.
Jabatan : Kepala Bagian Rumah Tangga

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Rumah Tangga,	Kepala Subbagian Perlengkapan,
Eni Rukawiani, SE.	**M. Yusuf Asnani, S.Kom**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya akuntabilitas Layanan Perlengkapan Kemenko PMK	Jumlah bahan draf dokumen perlengkapan	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Rumah Tangga,

Eni Rukawiani, SE.

Kepala Subbagian Perlengkapan,

M. Yusuf Asnani, S.Kom

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Arrozi, A.Md
Jabatan : Kepala Subbagian Inventaris dan Perawatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Eni Rukawiani, SE.
Jabatan : Kepala Bagian Rumah Tangga

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Rumah Tangga,	Kepala Subbagian Inventaris dan Perawatan,
Eni Rukawiani, SE.	**Moch. Arrozi, A.Md**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya akuntabilitas Layanan Inventaris dan Perawatan Kemenko PMK	Jumlah bahan draf dokumen Inventaris dan Perawatan	3

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Rumah Tangga,

Eni Rukawiani, SE.

Kepala Subbagian Inventaris dan Perawatan,

Moch. Arrozi, A.Md

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasannandi, S.Sos, M.A
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Indah Suwarni, M.Si
Jabatan : Kepala Biro Umum

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Biro Umum,	Kepala Bagian Keuangan,
Dra. Indah Suwarni, M.Si	**Hasannandi, S.Sos, M.A**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya akuntabilitas Keuangan Kemenko PMK	Jumlah draf dokumen perbendaharaan	1
	Jumlah draf dokumen verifikasi	1
	Jumlah draf dokumen akuntansi dan pelaporan	5

Jakarta, Maret 2018

Kepala Biro Umum,

Dra. Indah Suwarni, M.Si

Kepala Bagian Keuangan,

Hasannandi, S.Sos, M.A

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiki Ikrom Ibrahim, SE, M.Ak
Jabatan : Kepala Subbagian Verifikasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasannandi, S.Sos, M.A
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Keuangan,	Kepala Subbagian Verifikasi,
Hasannandi, S.Sos, M.A	**Fiki Ikrom Ibrahim, SE, M.Ak**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya akuntabilitas Verifikasi Keuangan Kemenko PMK	Jumlah bahan draf dokumen verifikasi	3

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Keuangan,

Hasannandi, S.Sos, M.A

Kepala Subbagian Verifikasi,

Fiki Ikrom Ibrahim, SE, M.Ak

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiji Lestari, A.Md
Jabatan : Kepala Subbagian Perbendaharaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasannandi, S.Sos, M.A
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Keuangan,	Kepala Subbagian Perbendaharaan,
Hasannandi, S.Sos, M.A	**Wiji Lestari, A.Md**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya akuntabilitas Perbendaharaan Keuangan Kemenko PMK	Jumlah bahan draf dokumen perbendaharaan	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Keuangan,

Hasannandi, S.Sos, M.A

Kepala Subbagian Perbendaharaan,

Wiji Lestari, A.Md

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heri Sukoco, S.E.
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Indah Suwarni, M.Si
Jabatan : Kepala Biro Umum

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Biro Umum,	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol,
Dra. Indah Suwarni, M.Si	**Heri Sukoco, S.E.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya efektivitas Layanan Penatausahaan Pimpinan dan Keprotokolan Kemenko PMK	Jumlah draf dokumen laporan Tata Usaha Menteri Koordinator	1
	Jumlah draf dokumen laporan Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator	1
	Jumlah draf dokumen laporan Tata Usaha Staf Ahli	1
	Jumlah draf dokumen laporan Protokol	1
	Jumlah draf dokumen laporan Perjalanan Dinas	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Biro Umum,

Dra. Indah Suwarni, M.Si

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol,

Heri Sukoco, S.E.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisya Yuliana Hidayat, S.IP
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heri Sukoco, S.E.
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol,	Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli,
Heri Sukoco, S.E.	**Nisya Yuliana Hidayat, S.IP**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya efektivitas Layanan Tata Usaha Staf Ahli Kemenko PMK	Jumlah bahan draf laporan Staf Ahli	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol,

Heri Sukoco, S.E.

Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli,

Nisya Yuliana Hidayat, S.IP

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fika Handayani, SKM
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heri Sukoco, S.E.
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol,	Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator,
Heri Sukoco, S.E.	**Fika Handayani, SKM**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya efektivitas Layanan Tata Usaha Menteri Koordinator PMK	Jumlah bahan draf laporan Tata Usaha Menteri Koordinator	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol,

Heri Sukoco, S.E.

Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator,

Fika Handayani, SKM

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dadang Iskandar, S.Sos
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heri Sukoco, S.E.
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol,	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator,
Heri Sukoco, S.E.	**Dadang Iskandar, S.Sos**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya efektivitas Layanan Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator PMK	Jumlah bahan draf laporan Sekretaris Kementerian Koordinator	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol,

Heri Sukoco, S.E.

Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator,

Dadang Iskandar, S.Sos

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lita Rahayuningsih
Jabatan : Kepala Subbagian Perjalanan Dinas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heri Sukoco, S.E.
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol,	Kepala Subbagian Perjalanan Dinas,
Heri Sukoco, S.E.	**Lita Rahayuningsih**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya efektivitas Layanan Perjalanan Dinas Kemenko PMK	Jumlah bahan draf laporan Perjalanan Dinas	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol,

Heri Sukoco, S.E.

Kepala Subbagian Perjalanan Dinas,

Lita Rahayuningsih

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si
Jabatan : Plh. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Y.B. Satya Sananugraha
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,	Plh. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,
Y.B. Satya Sananugraha	**Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya efektifitas birokrasi Hukum, Informasi, dan Persidangan Kemenko PMK	Jumlah dokumen layanan persidangan	1
	Jumlah dokumen layanan hukum	2
	Jumlah dokumen layanan humas dan komunikasi	3
	Jumlah dokumen layanan manajemen organisasi	1
	Jumlah dokumen layanan data dan informasi	3

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Peningkatan dan Pengelolaan Urusan Informasi dan Persidangan	Rp 10.200.000.000

Jakarta, Maret 2018

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan,

Y.B. Satya Sananugraha

Plh. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,

Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Nugroho Herusanto, SH
Jabatan : Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Cemy Wiediharsono, SH, Sp.N.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Organisasi pada Biro Hukum

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi pada Biro Hukum,	Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan,
Cemy Wiediharsono, SH, Sp.N.	**Tri Nugroho Herusanto, SH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya efektifitas birokrasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kemenko PMK	Jumlah bahan draf dokumen penyusunan peraturan perundang-undangan	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi pada Biro Hukum,

Cemy Wiediharsono, SH, Sp.N.

Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan,

Tri Nugroho Herusanto, SH

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elrika Rosanti, SH, MH
Jabatan : Kepala Subbagian Advokasi Hukum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Cemy Wiediharsono, SH, Sp.N.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Organisasi pada Biro Hukum

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi pada Biro Hukum,	Kepala Subbagian Advokasi Hukum,
Cemy Wiediharsono, SH, Sp.N.	**Elrika Rosanti, SH, MH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya efektifitas birokrasi Advokasi Hukum Kemenko PMK	Jumlah bahan draf dokumen advokasi hukum	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi pada Biro Hukum,

Cemy Wiediharsono, SH, Sp.N.

Kepala Subbagian Advokasi Hukum,

Elrika Rosanti, SH, MH

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Novico, S.Kom
Jabatan : Kepala Bagian Sistem dan Teknologi Informasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si
Jabatan : Plh. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Plh. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,	Kepala Bagian Sistem dan Teknologi Informasi,
Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si	**Dian Novico, S.Kom**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya efektifitas birokrasi Sistem dan Teknologi Informasi Kemenko PMK	Jumlah draf dokumen sistem informasi	1
	Jumlah draf dokumen jaringan informasi	1
	Jumlah draf dokumen pendayagunaan teknologi informasi	1

Jakarta, Maret 2018

Plh. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,

Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si

Kepala Bagian Sistem dan Teknologi Informasi,

Dian Novico, S.Kom

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rony Bintoro M.G, S.Kom, M.T.I
Jabatan : Kepala Subbagian Sistem Informasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dian Novico, S.Kom
Jabatan : Kepala Bagian Sistem dan Teknologi Informasi

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Sistem dan Teknologi Informasi,	Kepala Subbagian Sistem Informasi,
Dian Novico, S.Kom	**Rony Bintoro M.G, S.Kom, M.T.I**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya efektifitas birokrasi Sistem Informasi Kemenko PMK	Jumlah bahan draf dokumen sistem informasi	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Sistem dan Teknologi Informasi,

Dian Novico, S.Kom

Kepala Subbagian Sistem Informasi,

Rony Bintoro M.G, S.Kom, M.T.I

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firman Trisasongko, S.Kom
Jabatan : Kepala Subbagian Pendayagunaan Teknologi Informasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dian Novico, S.Kom
Jabatan : Kepala Bagian Sistem dan Teknologi Informasi

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Sistem dan Teknologi Informasi,	Kepala Subbagian Pendayagunaan Teknologi Informasi,
Dian Novico, S.Kom	**Firman Trisasongko, S.Kom**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya efektifitas birokrasi Pendayagunaan Teknologi Informasi Kemenko PMK	Jumlah bahan draf dokumen pendayagunaan teknologi informasi	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Sistem dan Teknologi Informasi,

Dian Novico, S.Kom

Kepala Subbagian Pendayagunaan Teknologi Informasi,

Firman Trisasongko, S.Kom

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Danang Ariwibowo I, S.IP
Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si
Jabatan : Plh. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Plh. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan,
Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si	**Danang Ariwibowo I, S.IP**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya efektifitas birokrasi Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan Kemenko PMK	Jumlah draf dokumen hubungan masyarakat	1
	Jumlah draf dokumen publikasi dan dokumentasi	1
	Jumlah draf dokumen perpustakaan	1

Jakarta, Maret 2018

Plh. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,

Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan,

Danang Ariwibowo I, S.IP

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Soleh, S.Kom
Jabatan : Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Danang Ariwibowo I, S.IP
Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan,	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat,
Danang Ariwibowo I, S.IP	**Achmad Soleh, S.Kom**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya efektifitas birokrasi Hubungan Masyarakat Kemenko PMK	Jumlah bahan draf dokumen hubungan masyarakat	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan,

Danang Ariwibowo I, S.IP

Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat,

Achmad Soleh, S.Kom

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ihti Oktarina, S.Sn
Jabatan : Kepala Subbagian Publikasi dan Dokumentasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Danang Ariwibowo I, S.IP
Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan,	Kepala Subbagian Publikasi dan Dokumentasi,
Danang Ariwibowo I, S.IP	**Ihti Oktarina, S.Sn**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya efektifitas birokrasi Publikasi dan Dokumentasi Kemenko PMK	Jumlah bahan draf dokumen publikasi dan dokumentasi	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan,

Danang Ariwibowo I, S.IP

Kepala Subbagian Publikasi dan Dokumentasi,

Ihti Oktarina, S.Sn

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rini Septiyanti, SS, M.Si
Jabatan : Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Cemy Wiediharsono, SH, Sp.N.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Organisasi pada Biro Hukum

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi pada Biro Hukum,	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana,
Cemy Wiediharsono, SH, Sp.N.	**Rini Septiyanti, SS, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya efektifitas birokrasi Organisasi dan Tata Laksana Kemenko PMK	Jumlah bahan draf dokumen organisasi dan tata laksana	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi pada Biro Hukum,

Cemy Wiediharsono, SH, Sp.N.

Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana,

Rini Septiyanti, SS, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Pengelolaan Data

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si
Jabatan : Plh. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Plh. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,	Kepala Bagian Persidangan dan Pengelolaan Data,
Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si	**Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya efektifitas birokrasi Persidangan dan Pengelolaan Data Kemenko PMK	Jumlah draf dokumen penyusunan bahan persidangan	1
	Jumlah draf dokumen penyusunan hasil persidangan	1
	Jumlah draf dokumen pengelolaan data hasil persidangan	1

Jakarta, Maret 2018

Plh. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,

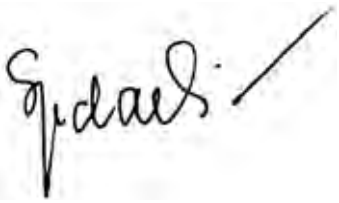

Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si

Kepala Bagian Persidangan dan Pengelolaan Data,

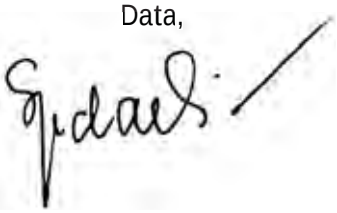

Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hyxsos Halomoan, SE
Jabatan : Kepala Subbagian Penyusunan Bahan Persidangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Pengelolaan Data

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Persidangan dan Pengelolaan Data,	Kepala Subbagian Penyusunan Bahan Persidangan,
Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si	**Hyxsos Halomoan, SE**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya efektifitas birokrasi Penyusunan Bahan Persidangan Kemenko PMK	Jumlah bahan draf dokumen penyusunan bahan persidangan	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Persidangan dan Pengelolaan Data,

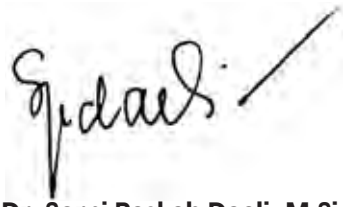

Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si

Kepala Subbagian Penyusunan Bahan Persidangan,

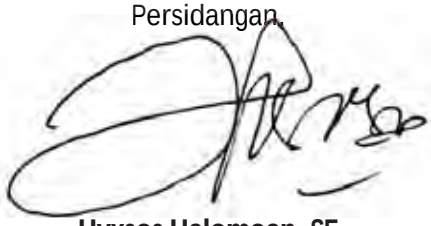

Hyxsos Halomoan, SE

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulansari Handayani, SS
Jabatan : Kepala Subbagian Penyusunan Hasil Persidangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Pengelolaan Data

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak [ertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Persidangan dan Pengelolaan Data,	Kepala Subbagian Penyusunan Hasil Persidangan,
Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si	**Wulansari Handayani, SS**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya efektifitas birokrasi Penyusunan Hasil Persidangan Kemenko PMK	Jumlah bahan draf dokumen penyusunan hasil persidangan	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Persidangan dan Pengelolaan Data,

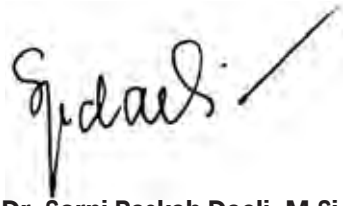

Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si

Kepala Subbagian Penyusunan Hasil Persidangan,

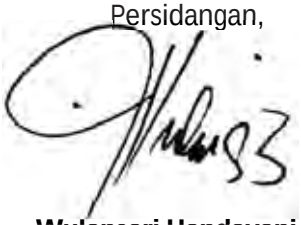

Wulansari Handayani, SS

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puji Wahyugiono, S.Si
Jabatan : Kepala Subbagian Pengelolaan Data Hasil Persidangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Pengelolaan Data

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak [ertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:
Kepala Bagian Persidangan dan Pengelolaan Data,

Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si

Pihak Pertama:
Kepala Subbagian Pengelolaan Data Hasil Persidangan,

Puji Wahyugiono, S.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya efektifitas birokrasi Pengelolaan Data Hasil Persidangan Kemenko PMK	Jumlah bahan draf dokumen pengelolaan data hasil persidangan	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Persidangan dan Pengelolaan Data,

Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si

Kepala Subbagian Pengelolaan Data Hasil Persidangan,

Puji Wahyugiono, S.Si

DJSN

Dewa Jaminan Sosial Nasional

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ir. Pudjo Hardijanto, MA
Jabatan	:	Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Y.B. Satya Sananugraha
Jabatan	:	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,	Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional,
Y.B. Satya Sananugraha	**Ir. Pudjo Hardijanto, MA.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar di Bidang Jaminan Sosial Nasional	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan DJSN	4
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan Tupoksi DJSN dan Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DJSN	Jumlah Layanan Internal	1
	Jumlah Layanan Perkantoran	1
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial (SJSN)	21.600.000.000,-

Jakarta, Maret 2018

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan,

Y.B. Satya Sananugraha

Sekretaris
Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Ir. Pudjo Hardijanto, MA

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ricky Radius Siregar, S.Sos., MAP
Jabatan	:	Kepala Bagian Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Ir. Pudjo Hardijanto, MA
Jabatan	:	Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Sekretaris	Kepala Bagian Umum
Dewan Jaminan Sosial Nasional,	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,
Ir. Pudjo Hardijanto, MA	**Ricky Radius Siregar, S.Sos., MAP**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya akuntabilitas dan pengelolaan umum Sekretariat DJSN	Jumlah laporan kesekretariatan DJSN	16
	Jumlah laporan pengadaan perangkat pengolah data, komunikasi dan fasilitas perkantoran	2
	Jumlah laporan pelaksanaan layanan perkantoran	1

Jakarta, Maret 2018

Sekretaris
Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Ir. Pudjo Hardijanto, MA

Kepala Bagian Umum
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Ricky Radius Siregar, S.Sos., MAP.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Dra. Usdianti Susanti, MM
Jabatan	:	Kepala Subbagian Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Ricky Radius Siregar, S.Sos., MAP
Jabatan	:	Kepala Bagian Umum

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Umum	Kepala Subbagian Keuangan
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,
Ricky Radius Siregar, S.Sos., MAP	**Dra. Usdianti Susanti, MM**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya akuntabilitas dan pengelolaan umum Sekretariat DJSN	Jumlah draf laporan keuangan kesekretariatan DJSN	3
	Jumlah draf laporan pelaksanaan layanan perkantoran	1

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Umum
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Ricky Radius Siregar, S.Sos., MAP

Kepala Subbagian Keuangan
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Dra. Usdianti Susanti, MM

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Agus Nendang, ST
Jabatan	:	Kepala Subbagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Ricky Radius Siregar, S.Sos., MAP
Jabatan	:	Kepala Bagian Umum

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Umum	Kepala Subbagian Tata Usaha
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,
Ricky Radius Siregar, S.Sos., MAP	**Agus Nendang, ST**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya akuntabilitas dan pengelolaan umum Sekretariat DJSN	Jumlah draf laporan ketatausahaan kesekretariatan DJSN	4
	Jumlah draf laporan pengadaan perangkat pengolah data, komunikasi dan fasilitas perkantoran	2

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Umum
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Ricky Radius Siregar, S.Sos., MAP

Kepala Subbagian Tata Usaha
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Agus Nendang, ST

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Putri wijayanti, S.Sos
Jabatan	:	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan Program, Anggaran dan Pelaporan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Ricky Radius Siregar, S.Sos., MAP
Jabatan	:	Kepala Bagian Umum

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Umum	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,	Program, Anggaran dan Pelaporan
	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,
Ricky Radius Siregar, S.Sos., MAP	**Putri wijayanti, S.Sos**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya akuntabilitas dan pengelolaan umum Sekretariat DJSN	Tersedianya draf laporan Perencanaan Program, Anggaran dan Pelaporan kesekretariatan DJSN	9

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Umum
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Ricky Radius Siregar, S.Sos., MAP

Plt. Kepala Subbagian Perencanaan
Program, Anggaran dan Pelaporan
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Putri wijayanti, S.Sos

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ir. Linda Darnel, MM
Jabatan	:	Kepala Bagian Penyiapan Kebijakan Jaminan Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Ir. Pudjo Hardijanto, MA
Jabatan	:	Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Sekretaris	Kepala Bagian Penyiapan Kebijakan
Dewan Jaminan Sosial Nasional,	Jaminan Sosial
	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,
Ir. Pudjo Hardijanto, MA	**Ir. Linda Darnel, MM**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam penyiapan kebijakan di Bidang Jaminan Sosial	Jumlah Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan Bidang Penyiapan Kebijakan Jaminan Sosial	4

Jakarta, Maret 2018

Sekretaris
Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Ir. Pudjo Hardijanto, MA

Kepala Bagian Penyiapan Kebijakan
Jaminan Sosial
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Ir. Linda Darnel, MM

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Dewi Mai Linda, SH
Jabatan	:	Kepala Subbagian Penyiapan Kebijakan Jaminan Sosial Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Ir. Linda Darnel, MM
Jabatan	:	Kepala Bagian Penyiapan Kebijakan Jaminan Sosial

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Penyiapan Kebijakan Jaminan Sosial	Kepala Subbagian Penyiapan Kebijakan Jaminan Sosial Kesehatan
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,
Ir. Linda Darnel, MM	**Dewi Mai Linda, SH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam penyiapan kebijakan di Bidang Jaminan Sosial	Jumlah bahan draf Usulan Rekomendasi Kebijakan Bidang Penyiapan Kebijakan Jaminan Sosial kesehatan	2

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Penyiapan Kebijakan
Jaminan Sosial
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Ir. Linda Darnel, MM

Kepala Subbagian Penyiapan Kebijakan
Jaminan Sosial Kesehatan
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Dewi Mai Linda, SH

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Dwi Janatun Rahayu, SKM
Jabatan	:	Kepala Subbagian Penyiapan Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Ir. Linda Darnel, MM
Jabatan	:	Kepala Bagian Penyiapan Kebijakan Jaminan Sosial

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Penyiapan Kebijakan Jaminan Sosial	PIt Kepala Subbagian Penyiapan Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,
Ir. Linda Darnel, MM	**Dwi Janatun Rahayu, SKM**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam penyiapan kebijakan di Bidang Jaminan Sosial	Jumlah bahan Draf Usulan Rekomendasi Kebijakan Bidang Penyiapan Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	2

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Penyiapan Kebijakan
Jaminan Sosial
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Ir. Linda Darnel, MM

PIt. Kepala Subbagian Penyiapan Kebijakan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Dwi Janatun Rahayu, SKM

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Dyah Tri Kumolosari, AKS, M.Si
Jabatan	:	Kepala Bagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Ir. Pudjo Hardijanto, MA
Jabatan	:	Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Sekretaris	Kepala Bagian Penyiapan Monitoring dan
Dewan Jaminan Sosial Nasional,	Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial
	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,
Ir. Pudjo Hardijanto, MA	**Dyah Tri Kumolosari, AKS, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam penyiapan kebijakan di Bidang Jaminan Sosial	Jumlah Draft Usulan Rekomendasi Kebijakan Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial	4

Jakarta, Maret 2018

Sekretaris
Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Ir. Pudjo Hardijanto, MA

Kepala Bagian Penyiapan Monitoring dan
Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Dyah Tri Kumolosari, AKS, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	drg. Citra Yuliyanti
Jabatan	:	Kepala Subbagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Dyah Tri Kumolosari, AKS, M.Si
Jabatan	:	Kepala Bagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,	Kepala Subbagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,
Dyah Tri Kumolosari, AKS, M.Si	**drg. Citra Yuliyanti**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam penyiapan kebijakan di Bidang Jaminan Sosial	Jumlah bahan draft Usulan Rekomendasi Kebijakan Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan	2

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Dyah Tri Kumolosari, AKS, M.Si

Kepala Subbagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,

drg. Citra Yuliyanti

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Andriawan Syahriar, SE, MM
Jabatan	:	Plt. Kepala Subbagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Dyah Tri Kumolosari, AKS, M.Si
Jabatan	:	Kepala Bagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,	Plt. Kepala Subbagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,
Dyah Tri Kumolosari, AKS, M.Si	**Andriawan Syahriar, SE, MM**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam penyiapan kebijakan di Bidang Jaminan Sosial	Jumlah bahan draft Usulan Rekomendasi Kebijakan Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	2

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Dyah Tri Kumolosari, AKS, M.Si

Plt. Kepala Subbagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Andriawan Syahriar, SE, MM

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Wenny Kartika Ayuningtyas, SKM
Jabatan	:	Plt. Kepala Subbagian Data dan Informasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Dyah Tri Kumolosari, AKS, M.Si
Jabatan	:	Kepala Bagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,	Plt. Kepala Subbagian Data dan Informasi Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,
Dyah Tri Kumolosari, AKS, M.Si	**Wenny Kartika Ayuningtyas, SKM**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam penyiapan kebijakan di Bidang Jaminan Sosial	Jumlah bahan draft Usulan Rekomendasi Kebijakan Penyiapan Data dan Informasi Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial	2

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Dyah Tri Kumolosari, AKS, M.Si

Plt. Kepala Subbagian Data dan Informasi Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Wenny Kartika Ayuningtyas, SKM

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Mardi Yusuf Djafar, SE
Jabatan	:	Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Partisipasi Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Ir. Pudjo Hardijanto, MA
Jabatan	:	Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Sekretaris	Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga
Dewan Jaminan Sosial Nasional,	dan Partisipasi Masyarakat
	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,
Ir. Pudjo Hardijanto, MA	**Mardi Yusuf Djafar, SE**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam penyiapan kebijakan di Bidang Jaminan Sosial	Jumlah Draft Usulan Rekomendasi Kebijakan Hubungan Antar Lembaga dan Partisipasi Masyarakat	4

Jakarta, Maret 2018

Sekretaris
Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Ir. Pudjo Hardijanto, MA

Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga
dan Partisipasi Masyarakat
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Mardi Yusuf Djafar, SE

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Nur Rachmad Widodo, STT, MPS.Sp
Jabatan	:	Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Mardi Yusuf Djafar, SE
Jabatan	:	Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Partisipasi Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Partisipasi Masyarakat	Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,
Mardi Yusuf Djafar, SE	**Nur Rachmad Widodo, STT, MPS.Sp**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam penyiapan kebijakan di Bidang Jaminan Sosial	Jumlah bahan draft Usulan Rekomendasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat	2

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga
dan Partisipasi Masyarakat
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Mardi Yusuf Djafar, SE

Kepala Subbgian Partisipasi Masyarakat
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Nur Rachmad Widodo, STT, MPS.Sp

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Miranti Putri Prihantika, SH
Jabatan	:	Plt. Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Mardi Yusuf Djafar, SE
Jabatan	:	Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Partisipasi Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Partisipasi Masyarakat	Plt. Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,
Mardi Yusuf Djafar, SE	**Miranti Putri Prihantika, SH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam penyiapan kebijakan di Bidang Jaminan Sosial	Jumlah Draft Usulan Rekomendasi Kebijakan Hubungan Antar Lembaga	2

Jakarta, Maret 2018

Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga
dan Partisipasi Masyarakat
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Mardi Yusuf Djafar, SE

Plt. Kepala Subbagian Hubungan Antar
Lembaga
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Miranti Putri Prihantika, SH

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA